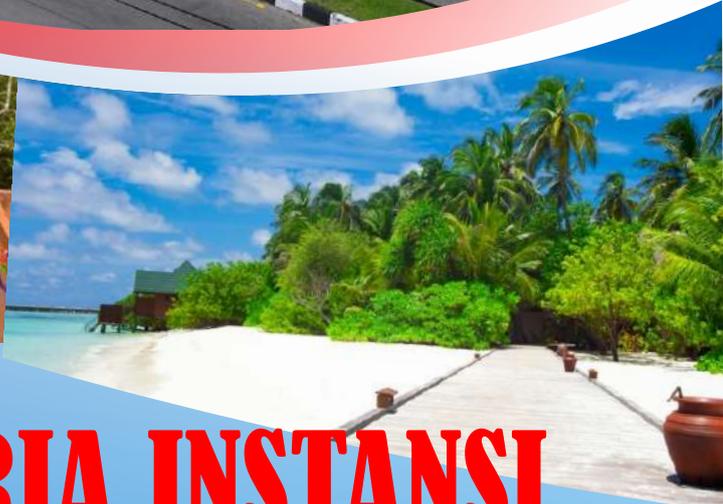




PEMERINTAH KOTA PARIAMAN



LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subbhanahuwata'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2021 merupakan laporan tahun ketiga dari pelaksanaan RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018 -2023 telah selesai disusun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan setiap Kepala Daerah wajib menyusun laporan Kinerja tahunan Pemerintah Daerah dan menyampaikannya kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan ini juga merupakan media akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban dari amanah yang diemban pemerintah daerah sebagai pengguna sumberdaya untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah serta menginformasikannya terkait dengan pencapaian sasaran strategis yang diukur dengan capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

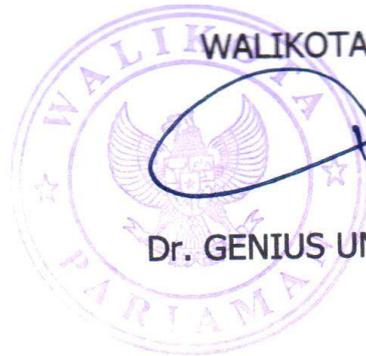
Sangat disadari bahwa laporan ini belum sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, perbaikan yang terus menerus akan terus Kami lakukan seperti pengembangan dan mensinkronkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan sistem perencanaan dan sistem penganggaran, peningkatan SDM, pengembangan anggaran berbasis kinerja dan manajemen kinerja untuk meningkatkan kinerja dan manajemen kinerja dimasa yang akan datang.

Dengan merebaknya Pandemi Covid-19 memberi dampak yang sangat signifikan terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat juga terhadap pelaksanaan pembangunan, sehingga banyak indikator yang belum sesuai dan

mencapai target yang diharapkan. Berkenaan dengan itu, laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, manajemen maupun keuangannya.

Kami juga mengharapkan laporan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh pihak-pihak yang terkait dan dapat memberikan umpan balik yang diperlukan guna perbaikan perencanaan dan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Pariaman dimasa yang akan datang.

Pariaman, Maret 2022


WALIKOTA PARIAMAN,

Dr. GENIUS UMAR, S.Sos, M.Si

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 03 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2018 – 2023, dimana Visi Pembangunan Kota Pariaman adalah “

" Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa, Yang Religius Dan Berbudaya"

Visi tersebut diwujudkan melalui beragam misi, kemudian dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran yang akan di capai. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2021 merupakan Laporan Kinerja Tahun ke Tiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2018 – 2023.

Beberapa sasaran strategis daerah sebagaimana dituangkan pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan RPJMD Kota Pariaman 2018-2023, mengalami perubahan yang disebabkan penyesuaian terhadap kerangka logis (logical framework) penyusunan perencanaan berbasis isu strategis daerah yang dibangun melalui skema pohon kinerja, sehingga terdapat penambahan sasaran strategis baru atau perubahan sasaran strategis maupun indikator sasaran yang relevan dalam mengukur pencapaian sasaran strategis

Untuk mewujudkan misi yang diemban, Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2021 telah menetapkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Pariaman yang terdiri dari 19 Sasaran Strategis yang pencapaiannya diukur dengan 23 Indikator Kinerja.

Adapun rata-rata capaian sasaran kinerja Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2021 meliputi :

Misi1 : Mewujudkan Wisata Kota Pesisir Yang Maju, Religius, Tertib dan Berbudaya terbaik Sumatra

Sasaran 1 : Meningkatnya Produktivitas Sektor Pariwisata yang didukung dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan rata-rata capaian minus 39 %.

Misi 2 : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berkualitas dan Berbudaya

- Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat yang didukung dengan 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian rata- rata sebesar 99,22 %;
- Sasaran 2 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang di dukung dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian rata- rata sebesar 99,79%;
- Sasaran 3 : Menurunnya Prevalensi Stunting dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian 97 %;
- Sasaran 4 : Meningkatnya Pendapatan Masyarakat yang didukung dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian rata- rata sebesar 97%;

Misi 3 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Prima Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Smart City

- Sasaran 1 : Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel didukung dengan 2 (dua) indikator kinerja dengan rata-rata capaian sebesar 96%;
- Sasaran 2 : Meningkatnya Birokrasi Yang Kapabel didukung dengan 2 (dua) indikator kinerja dengan rata-rata capaian sebesar 81%;
- Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan rata-rata capaian sebesar 111%;

Misi 4 : Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana

- Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan rata- rata capaian sebesar 102%;
- Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni di dukung dengan 2 (dua) indikator kinerja dengan rata- rata capaian sebesar 96 %
- Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan di dukung dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan rata-rata capaian sebesar 93%;

Sasaran 4 : Meningkatnya Mitigasi Bencana didukung dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan rata-rata capaian sebesar 100%.

Sasaran 5 : Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat dengan 1 (satu) indikator dengan rata-rata capaian sebesar 95%.

Misi 5 : Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif Yang Berbasis Lokal

Sasaran 1 : Meningkatnya Investasi di dukung dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan rata-rata capaian sebesar 1064%;

Sasaran 2 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian sebesar 66 %;

Sasaran 3 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB didukung 1 (satu) indikator kinerja dengan rata-rata capaian sebesar 97%.

Sasaran 4 : Menurunnya Angka Kemiskinan didukung dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan rata-rata capaian sebesar 112%.

Sasaran 5 : Menurunnya Angka Pengangguran dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan rata-rata capaian sebesar 112 %.

Sasaran 6 : Meningkatnya Kemandirian Desa dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan rata-rata capaian sebesar 111,15%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	VI
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Gambaran Umum Kota Pariaman	5
1.4 Analisis Isu-Isu Startegis	10
1.5 Sistematika Penulisan	42
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	43
2.1 Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023	43
a. Visi	43
b. Misi	45
c. Tujuan dan Sasaran	50
d. Konsistensi Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	54
2.2 Indikator Kinerja Utama	68
2.3 Perjanjian Kinerja	69
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	81
3.1 Pengukuran Kinerja	59
3.2 Metode Pengukuran Pencapaian Target Kinerja	59
a. Capaian Kinerja Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2020	61
b. Analisis Capaian Kinerja 2020	64
3.3 Akuntabilitas Keuangan	156
BAB IV PENUTUP	162
PENGHARGAAN-PENGHARGAAN	165

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Jumlah Kecamatan dengan desa/kelurahan di Kota Pariaman
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Per Kecamatan Kota Pariaman Tahun 2017 – 2021
Tabel 1.3	Kondisi Topografi Kota Pariaman
Tabel 1.4	Ketinggian, Panjang Garis Pantai Kota Pariaman Menurut Kecamatan
Tabel 1.5	Jenis dan Luas Tanah di Kota Pariaman
Tabel 1.6	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2021
Tabel 1.7	PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah/Jiwa) Tahun 2017-2021
Tabel 1.8	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/kota Se Sumatera Barat Tahun 2018-2021
Tabel 1.9	Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/kota Se Sumatera Barat Tahun 2017-2021
Tabel 1.10	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat Tahun 2017-2021
Tabel 1.11	Perkembangan Umur Harapan Hidup Kabupaten/kota Se Sumatera Barat Tahun 2017-2021
Tabel 1.12	Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat Tahun 2017-2021 (Ribu Rp/Org/Tahun)
Tabel 1.13	Capaian Nilai Sakip dan Indeks RB Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2017-2021
Tabel 1.14	Ketercapaian Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kota Pariaman
Tabel 1.15	Capaian Pelaksanaan TPB Kota Pariaman Menurut Pilar
Tabel 1.16	Sinkronisasi Program Unggulan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan Program Unggulan RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023
Tabel 2.1	Keselarasan Visi RPJPD, RPJMN, RPJMD Provinsi dengan Perubahan RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023
Tabel 2.2	Keselarasan Misi RPJMN 2020-2024, RPJMD Provinsi 2021-2026, RPJPD Kota Pariaman 2005-2025 Dan Perubahan RPJMD Kota Pariaman 2018-2023
Tabel 2.3	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerjanya pada Misi 1
Tabel 2.4	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerjanya pada Misi 2
Tabel 2.5	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerjanya pada Misi 3
Tabel 2.6	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerjanya pada Misi 4
Tabel 2.7	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerjanya pada Misi 5
Tabel 2.8	Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Tabel 3.1	Jumlah Wisatawan yang berkunjung ke Kota Pariaman Dari Tahun 2017-2021

Tabel 3.2	Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari Sasaran Terwujudnya Daya Saing Wisata dengan target akhir RPJMD 2018-2023
Tabel 3.3	Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi dan Kabupaten Kota di Sumatera Barat
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari sasaran Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berkualitas dan Berbudaya dengan target akhir RPJMD 2018-2023
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan target akhir RPJMD 2018-2023
Tabel 3.6	Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat
Tabel 3.7	Realisasi Capaian Indikator dari sasaran Menurunnya Prevalensi Stunting dengan target akhir RPJMD 2018-2023
Tabel 3.8	Realisasi Capaian Indikator dari Sasaran Meningkatnya Pendapatan Masyarakat dengan target akhir RPJMD 2018-2023
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel dengan target akhir RPJMD 2018-2023
Tabel 3.10	Perbandingan Realisasi Meningkatnya Birokrasi Yang Kapabel dengan target akhir RPJMD 2018-2023
Tabel 3.11	Listing Nilai Indeks Profesional ASN Instansi Pemerintah tahun 2021 Wilayah Kerja Regional XII BKN Pekanbaru
Tabel 3.12	Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan target akhir RPJMD 2018-2023
Tabel 3.13	Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Mantap
Tabel 3.14	Panjang Drainase Kota Dalam Kondisi Baik
Tabel 3.15	Panjang Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik
Tabel 3.16	Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dengan target akhir RPJMD 2018-2023
Tabel 3.17	Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh Tahun 2019
Tabel 3.18	Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh Tahun 2020
Tabel 3.19	Capaian Variabel Pembentuk Indikator Perumahan Permukiman Layak Huni
Tabel 3.20	Perbandingan Realisasi Capaian Indeks Kualitas Lingkungan dengan target akhir RPJMD 2018-2023
Tabel 3.21	Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari Sasaran Meningkatnya Mitigasi Bencana dengan target akhir RPJMD 2018-2023
Tabel 3.22	Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari Sasaran Terwujudnya Rasa Tertib dan Aman dalam Kehidupan Masyarakat dengan target akhir RPJMD 2018-2023
Tabel 3.23	Realisasi Investasi Kota Pariaman dari Tahun 2019-2021
Tabel 3.24	Realisasi Nilai Investasi Per 31 Desember 2021

Tabel 3. 25	Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi dengan target akhir RPJMD 2018-2023
Tabel 3. 26	Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari Sasaran Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB dengan target akhir RPJMD 2018-2023
Tabel 3. 27	Data Produksi Pertanian Tahun 2020-2021
Tabel 3. 28	Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari Sasaran Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB dengan target akhir RPJMD 2018-2023
Tabel 3. 29	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kota di Sumatera Barat Tahun 2019-2021
Tabel 3. 30	Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan dengan target akhir RPJMD 2018-2023
Tabel 3. 31	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat Tahun 2019-2021
Tabel 3. 32	Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari Sasaran Menurunnya Angka Pengangguran dengan target akhir RPJMD 2018-2023
Tabel 3. 33	Status Desa di Kota Pariaman pada Tahun 2020 dan 2021
Tabel 3. 34	Ranking IDM Tahun 2021 Tingkat Provinsi Sumatera Barat
Tabel 3. 35	Kenaikan Status IDM Tahun 2021 Dari Maju menjadi Mandiri
Tabel 3. 36	Kenaikan Status IDM Tahun 2021 Dari Berkembang menjadi Maju
Tabel 3. 37	Nama-nama dan Status Desa Tahun 2021
Tabel 3. 38	Data Komposit Indeks Desa Membangun (IDM) Kota Pariaman Tahun 2019-2021
Tabel 3. 39	Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari Sasaran Meningkatnya Meningkatnya Kemandirian Desa dengan target akhir RPJMD 2018-2023

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Peta Administrasi Kota Pariaman
Gambar 1.2	Mata Rantai Permasalahan Utama dan Pokok Pembangunan Daerah Kota Pariaman
Gambar 1.3	Fokus Kebijakan Setiap Tahapan dalam RPJPN 2005-2025
Gambar 1.4	Nawacita kedua RPJMN 2020-2024
Gambar 1.5	5 Arahkan Utama Presiden
Gambar 3.1	Puncak Perayaan Tabut

Daftar Grafik

- Grafik 3.1 Trend Angka Harapan Hidup di Kota Pariaman Tahun 2018-2021
- Grafik 3.2 Tren Balita Stunting di Kota Pariaman Tahun 2018-2021
- Grafik 3.3 Tren Angka Kematian Bayi Tahun 2016 – 2020

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Salah satu bentuk akuntabilitas tersebut adalah penyusunan Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan setiap tahun. Pelaporan dimaksud secara tidak langsung merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat tentang kualitas kinerja yang dihasilkan terkait pengelolaan dan penggunaan sumber daya yang dimiliki, termasuk sumber daya keuangan. Laporan Kinerja disampaikan kepada Presiden melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Laporan Kinerja disusun dalam kurun waktu satu tahun anggaran dan disampaikan setiap awal tahun pelaksanaan anggaran selanjutnya yang didasarkan pada realisasi capaian kinerja tahunan perencanaan strategis, dan pengaruhnya terhadap proses perwujudan kondisi akhir rencana lima tahunan, yang ditetapkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sehingga pelaporan ini pada prinsipnya menggambarkan realisasi tahapan pencapaian proses perwujudan cita-cita Kepala Daerah (Dr. GENIUS UMAR, M.Si dan Drs. MARDISON MAHYUDDIN, MM) yang dituangkan kedalam visi, misi dan program

strategis RPJMD Kota Pariaman 2018-2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2021 merupakan laporan realisasi hasil penyelenggaraan pemerintahan tahun Kedua dari RPJMD Kota Pariaman. RPJMD merupakan landasan utama yang mengarahkan seluruh gerak penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan Kota Pariaman, pada arah Visi dan Misi Kota Pariaman. RPJMD Kota Pariaman ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pariaman Tahun 2018 – 2023, maka pengukuran akuntabilitas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dapat digambarkan dan pertanggungjawabkan secara lebih tepat. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2021, sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemenuhan prinsip akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2021 ini juga merupakan bahan penting dalam proses evaluasi dan kajian internal organisasi, selain itu merupakan informasi penting untuk masyarakat tentang hasil-hasil kinerja pemerintahan di Tahun 2021.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pariaman merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 tahun, juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik, disamping itu juga menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan *stakeholders* demi perbaikan kinerja Pemerintah Kota Pariaman. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang

tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang dan sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

Pemerintah Kota Pariaman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018, yang terdiri dari :

A. Walikota dan Wakil Walikota Pariaman

1. Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
2. Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
3. Staf Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan dan SDM

B. Sekretaris Daerah membawahi 2 Asisten yaitu :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - Bagian Pemerintahan
 - Bagian Hukum
 - Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
2. Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum
 - Bagian Administrasi Pembangunan
 - Bagian Organisasi
 - Bagian Umum
3. Kelompok Jabatan Fungsional

B. SEKRETARIAT DPRD

C. INSPEKTORAT

D. DINAS

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum , Penataan Ruang, dan Pertanahan
4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
5. Dinas Sosial
6. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
8. Dinas Komunikasi dan Informatika
9. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
10. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
11. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13. Dinas Perhubungan
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

E. BADAN

1. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

G. KANTOR

1. Kantor Kesbangpol & Linmas
2. Kecamatan.

1.3. Gambaran Umum Kota Pariaman

❖ Letak, Luas dan Batas Wilayah

Secara astronomis Kota Pariaman terletak antara $00^{\circ} 33' 00''$ – $00^{\circ} 40' 43''$ Lintang Selatan dan $100^{\circ} 04' 46''$ – $100^{\circ} 10' 55''$ Bujur Timur, tercatat memiliki luas wilayah sekitar $73,36 \text{ Km}^2$, dengan panjang garis pantai $12,00 \text{ Km}^2$. Luas daratan daerah ini setara dengan 0,17 persen dari luas daratan wilayah Propinsi Sumatera Barat dengan 6 buah pulau-pulau kecil yaitu : Pulau Bando, Pulau Gosong, Pulau Ujung, Pulau Tengah, Pulau Angso dan Pulau Kasiak. Panjang pantai lebih kurang 12,7 kilometer.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman sebagai salah satu Kota yang berada dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat mempunyai luas wilayah sebesar $73,36 \text{ Km}^2$ dan luas lautan $282,56 \text{ km}^2$, dengan panjang garis pantai $12,00 \text{ Km}^2$ yang mencakup 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Tengah dan Kecamatan Pariaman Selatan. Dan kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2009, kecamatan di Kota Pariaman telah bertambah menjadi 4 (empat) kecamatan yakni: Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Tengah, Kecamatan Pariaman Selatan dan Kecamatan Pariaman Timur. Luas wilayah per kecamatan dapat dilihat pada dibawah ini :

Tabel 1.1
Jumlah Kecamatan dengan desa/kelurahan di Kota Pariaman

No	Kecamatan	Ibu Kota	Kelurahan	Desa	Luas Daerah(Km ²)
1	Pariaman Utara	Naras	-	17	23.35
2	Pariaman Tengah	Pariaman	16	6	15.68
3	Pariaman Selatan	Kurai taji	-	16	16.82
4	Pariaman Timur	Sei,Pasak	-	16	17.51
Kota Pariaman			16	55	73.36

Sumber : Kota Pariaman Dalam Angka Tahun 2020

Kota Pariaman terdiri dari 4 kecamatan 16 Kelurahan 55 desa dengan jumlah penduduk sampai bulan Juni Tahun 2020 berjumlah 91.942 jiwa penduduk yang tersebar di 4 kecamatan dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Per Kecamatan Kota Pariaman Tahun 2017– 2021

No	Kecamatan	Tahun					% Penduduk/ Kec
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Pariaman Tengah	31.101	31.413	31.690	31.947	32.349	33,82
2	Pariaman Utara	22.548	22.887	23.314	23.280	23.754	24,84
3	Pariaman Selatan	19.146	19.398	19.899	19.992	20.219	21,14
4	Pariaman Timur	17.932	18.244	18.871	19.140	19.318	20,20
	KOTA PARIAMAN	90.727	91.942	93.774	94.359	95.640	100

Sumber :Dinas Kependudukan dan Sipil

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah Penduduk per kecamatan kota Pariaman dari tahun 2017 - 2021 terus meningkat, dan terjadi penambahan jumlah penduduk tiap tahunnya.

Kota Pariaman secara administrasi berbatasan langsung dengan daerah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Kecamatan V Koto Kp. Dalam dan V Koto Timur (Kab. Padang Pariaman)
- 2) Sebelah Selatan : Kecamatan Nan Sabaris (Kab. Pd. Pariaman)
- 3) Sebelah timur : Kecamatan VII Koto Sungai Sarik (Kab. Pd. Pariaman)
- 4) Sebelah Barat : Samudra Indonesia

Gambar 1.1
Peta Administrasi Kota Pariaman



❖ **Topografi**

Kota Pariaman merupakan hamparan dataran rendah yang terletak di pantai barat Propinsi Sumatera Barat dengan ketinggian antara 2 sampai dengan 35 meter di atas permukaan laut dengan sedikit daerah perbukitan. Memiliki 6 buah pulau-pulau kecil yaitu Pulau Bando, Pulau Gosong, Pulau Ujung, Pulau Tengah, Pulau Angso dan Pulau Kasiak. panjang pantai lebih kurang 12,7 kilometer.

Keadaan topografi wilayah, geomorfologi dan bentuk wilayah secara bersama-sama membentuk pola aliran sungai. Kota Pariaman dilalui oleh tiga buah sungai yaitu Batang Manggung yang melalui Kecamatan Pariaman Utara, Batang Piaman yang melewati Kecamatan Pariaman Tengah dan Batang Mangau yang melalui Pariaman Selatan.

Tabel 1.3
Kondisi Topografi Kota Pariaman

No	Kondisi Topografi	Pariaman Utara	Pariaman Tengah	Pariaman Selatan	Jumlah (Ha)
1	Datar - (0-2%)	2.479	2.313	1.994	6.786
2	Bergelombang - (3-15%)	0	64	120	184
3	Curam - (16-40%)	366	0	0	366
4	Sangat Curam - (>40%)	0	0	0	0
Jumlah (ha)		2.845	2.377	2.114	7.336

Sumber : Profil Kota Pariaman

Seperti pada umumnya daerah lain, Kota Pariaman yang berada di bagian Pantai Barat Pulau Sumatera, memiliki jenis batuan resen dan tunda vulkan. Kondisi tanah relatif subur dan sangat berpotensi untuk dikembangkan pada kegiatan pertanian. Adapun jenis-jenis tanah yang terdapat di Kota Pariaman terdiri dari tanah Glaisol Distrik, Latosol Kronik, Andosol Humik, dan Folkal Datar.

Kota Pariaman merupakan daerah yang beriklim tropis basah yang sangat dipengaruhi oleh angin barat dan memiliki bulan kering yang sangat pendek. Curah hujan rata-rata pertahun mencapai angka sekitar 336 mm, dengan lama hari hujan 199 hari. Suhu rata-rata 25,14°Celsius, dengan kelembaban udara rata-rata 86,57% dan kecepatan angin rata-rata 1,80 km/jam.

Kota Pariaman merupakan salah satu kota yang berhawa cukup panas, hal ini disebabkan karena secara geomorfologi wilayah Kota Pariaman berada di daerah pesisir pantai dengan panjang garis pantai sekitar 12,00 Km dan ketinggian rata-rata 0-15 M dpl, sehingga suhu rata-rata pada siang hari cukup panas dan kelembaban yang cukup tinggi.

Tabel 1.4
Ketinggian, Panjang Garis Pantai Kota Pariaman
Menurut Kecamatan

Kecamatan	Ketinggian (dpl)	Panjang Garis Pantai (Km)
Pariaman Selatan	0 – 10	3,30
Pariaman Tengah	0 – 10	4,30
Pariaman Timur	5 – 15	0,00
Pariaman Utara	0 – 10	4,40
Kota Pariaman	0 - 15	12,00

Sumber : Kota Pariaman Dalam Angka Tahun 2022

Ketersediaan air tanah di Kota Pariaman terdiri dari tiga tipe akuifer, yaitu pertama, akuifer produktif dengan penyebaran luas yang terdapat disebagian besar wilayah kota. Kedua, akuifer produktif sedang dengan

penyebaran luas terdapat di bagian tenggara kota, dan ketiga, akuifer produktif sedang setempat terdapat di bagian tengah wilayah kota membelah dari utara ke selatan.

Geomorfologi Kota Pariaman terdiri atas dataran estuarin sepanjang hilir sungai pantai. Pada daerah sepanjang aliran sungai di bagian selatan terdapat dataran banjir pada sungai meander di bagian hilir pesisir. Dibagian tengah dan utara terdapat dataran vulkanik dan perbukitan vulkanik.

Kondisi tanah wilayah Kota Pariaman umumnya memiliki kondisi yang relatif subur. Dengan kondisi seperti itu, maka kegiatan pertanian sangat berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut di Kota Pariaman. Adapun jenis-jenis tanah yang terdapat di Kota Pariaman yang tersebar di empat kecamatan Kota Pariaman, seperti Tabel

Tabel 1.5
Jenis dan Luas Tanah di Kota Pariaman

Jenis Tanah	Luas (km ²)
Glaisol Distrik	1,335
Latosol Kronik	835
Andosol Humik	50
Volkan Datar	2,507
pasir pantai	826
glaisol autrik	1,254

Berdasarkan sistem klasifikasi Soil Survey Staff USDA, jenis tanah yang terdapat di Kota Pariaman yaitu:

- a. Satuan lahan tanah Dystropept, Paleudults, Tropaquept yang terdapat di dataran bergelombang di bagian utara.
- b. Satuan tanah Tropaquets, Dystropepts, Tropopsamments, Tropofluvents yang terdapat pada daerah aliran sungai di bagian utara.
- c. Satuan tanah Tropaquets, Tropohemist yang terdapat pada daerah dataran di bagian tengah
- d. Satuan tanah Tropopsamments, Tropaquents dan Sulfaquents yang terdapat di bagian barat di pesisir pantai.

1.4. Analisis Isu-Isu Strategis

Pembangunan daerah dilakukan bertujuan untuk mengatasi permasalahan daerah. Dengan pembangunan yang berkualitas diharapkan masyarakat akan merasakan dampaknya sehingga akan memperbaiki daya saing kualitas kehidupan masyarakat yang akan berakhir pada kesejahteraan masyarakat.

1.4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan sebuah “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan tersebut dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum diperdayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi, peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal, serta ancaman yang belum diantisipasi.

Kota Pariaman menghadapi permasalahan pembangunan secara makro antara lain sebagai berikut :

1) Permasalahan Pembangunan Ekonomi

Permasalahan pembangunan ekonomi Kota Pariaman tergambar dari tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, antara tahun 2016 sampai 2020, memperlihatkan kecenderungan yang semakin melambat. Walaupun pada tahun 2017 mengalami sedikit kenaikan. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 sebesar 5,59 % . Dan pada tahun 2017 mengalami sedikit peningkatan menjadi 5,61 Kemudian pada tahun 2018 dan 2019, turun lagi menjadi masing-masing 5,47 % dan 5,30 %, Kemudian pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman sebesar -1,32 % akibat pandemi covid-19. Dan pertumbuhan yang minus ini hampir dialami oleh semua daerah di Indonesia. Memang secara data

BPS tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman yang cenderung melambat, Hal yang sama juga dialami oleh provinsi Sumatera Barat. Pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman dalam 5 tahun terakhir tersebut masih diatas pertumbuhan ekonomi provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Namun jika dibandingkan dengan sesama Kota di Provinsi Sumatera Barat. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman berada pada nomor urut ke-7 dari 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini dianggap sebagai suatu permasalahan makro daerah Kota Pariaman yang harus secara bertahap bisa diatasi.

Tabel 1.6
**Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
 Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten/Kota
 di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2021**

Wilayah	2019	2020	2021
Sumatera Barat (Provinsi)	5,05	-1,60	3,29
Kabupaten :			
Kepulauan Mentawai	4,76	-1,85	2,89
Pesisir Selatan	4,81	-1,11	3,37
Kab.Solok	5,07	1,12	3,32
Sijunjung	4,83	-1,10	3,15
Tanah Datar	5,01	-1,13	3,30
Padang Pariaman	2,51	-10,46	2,18
Agam	4,81	-1,38	3,70
Lima Puluh Kota	5,10	-1,16	3,33
Pasaman	4,84	-0,87	3,39
Solok Selatan	4,89	-1,24	3,35
Dharmasraya	4,98	-1,39	3,42
Pasaman Barat	4,49	-1,34	3,75
Kota :			
Padang	5,65	-1,86	3,66
Kota Solok	5,49	-1,42	3,32
Sawah Lunto	5,49	-1,27	2,49
Padang Panjang	5,56	-1,44	3,46
Bukittinggi	5,84	-1,74	3,61
Payakumbuh	5,89	-1,66	3,58
Pariaman	5,30	-1,32	3,53

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat dan BPS Statistik Indonesia

Pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman selama tahun 2021 tercatat sebesar 3,53 persen. Angka ini diperoleh dari besarnya kenaikan jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dari 3.544.659,85 juta rupiah pada tahun 2020 menjadi 3.669.629,10 juta rupiah pada tahun 2021.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kota Pariaman pada tahun 2021 tercatat 5.258.657,03 juta rupiah, nilai tersebut mengalami kenaikan dari tahun yang lalu dimana pada tahun 2020 yaitu sebesar 4.994.093,58 juta rupiah.

Struktur perekonomian Kota Pariaman tahun 2021 menunjukkan 4 kategori lapangan usaha yang kontribusinya diatas 10 persen dalam pembentukan nilai tambah bruto. Secara berurutan masing-masing yaitu kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 17,93 persen, kedua kategori lapangan usaha konstruksi sebesar 15,42 persen, dan yang ketiga kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,90 persen, dan yang keempat dari sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,21 persen.

Laju pertumbuhan PDRB Kota Pariaman pada tahun 2021 sebesar 3,53% berada pada urutan ke tujuh jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya se Sumatera Barat. Seperti yang tertera pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.7
**PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Atas
 Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah/Jiwa)
 Tahun 2017-2021**

Wilayah	2017	2018	2019	2020	2021
Sumatera Barat (Provinsi)	49,75	42,80	45,21	44,03	45,29
Kabupaten :					
Kepulauan Mentawai	45,12	47,06	50,44	49,46	54,80
Pesisir Selatan	26,39	28,32	30,25	29,96	29,29
Kab.Solok	31,96	34,10	36,36	35,96	35,72
Sijunjung	34,45	36,31	38,46	37,87	40,31
Tanah Datar	32,97	35,13	37,58	37,34	36,31
Padang Pariaman	46,32	49,45	51,14	42,95	42,62
Agam	36,83	39,24	41,80	41,19	39,96
Lima Puluh Kota	35,98	38,27	40,79	40,24	41,99
Pasaman	28,30	29,87	31,66	31,32	31,12
Solok Selatan	29,55	30,97	32,57	31,81	31,26
Dharmasraya	38,45	40,14	41,78	40,41	46,52
Pasaman Barat	32,06	33,52	34,69	33,75	36,51
Kota :					
Padang	57,27	61,24	65,65	64,67	71,36
Kota Solok	50,57	53,43	57,00	56,05	57,10
Sawah Lunto	51,55	55,00	58,85	58,02	58,62
Padang Panjang	56,74	60,35	64,72	63,82	64,09
Bukittinggi	58,78	62,21	66,49	65,00	74,24
Payakumbuh	42,78	45,88	50,34	49,63	51,64
Pariaman	49,75	52,68	56,56	55,86	55,18

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat dan BPS Statistik Indonesia

Adapun permasalahan Pembangunan Ekonomi disebabkan oleh:

1. Masih rendahnya kontribusi beberapa sektor strategis daerah terhadap peningkatan perekonomian ;
2. Masih belum optimalnya; serta
3. nilai investasi Produktivitas sektor pariwisata masih rendah

2) Permasalahan Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pembangunan manusia Kota Pariaman selama 2018-2021 yang diindikasikan oleh indeks pembangunan manusia. Secara umum, dalam empat tahun terakhir yaitu 2018-2021, pembangunan manusia di Kota Pariaman terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, capaian IPM Kota Pariaman adalah sebesar 76,26 dan pada tahun 2019 capaian IPM

meningkat menjadi 76,70. pada tahun 2020 sebesar 76.90, serta tahun 2021 sebesar 77,07. Angka IPM Kota Pariaman secara umum lebih tinggi dari IPM Provinsi yang sebesar 72,38 tahun 2020 dan IPM Nasional yang sebesar 71,94 ditahun 2020. Jika diakumulasikan, telah terjadi peningkatan sebesar 1,72 selama periode tersebut. Namun jika dibandingkan dengan sesama Kota lain di provinsi Sumatera Barat, dari 19 Kabupaten/Kota capaian IPM Kota Pariaman berada pada rangking ke-6. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.8
**Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/kota
 Se Sumatera Barat Tahun 2018-2021**

Wilayah	2018	2019	2020	2021
Sumatera Barat (Provinsi)	71,73	72,39	72,38	72,65
Kabupaten :				
Kepulauan Mentawai	60,28	61,26	61,09	61,35
Pesisir Selatan	69,40	70,08	69,90	70,03
Kab.Solok	68,60	69,08	69,08	69,24
Sijunjung	66,97	67,66	67,74	67,86
Tanah Datar	71,25	72,14	72,33	72,46
Padang Pariaman	69,71	70,59	70,61	70,76
Agam	71,70	72,37	72,46	72,57
Lima Puluh Kota	69,17	69,67	69,47	69,68
Pasaman	65,60	66,46	66,64	66,77
Solok Selatan	68,45	68,94	69,04	69,23
Dharmasraya	70,86	71,52	71,51	71,76
Pasaman Barat	67,43	68,21	68,49	68,76
Kota :				
Padang	82,52	82,68	82,82	82,9
Kota Solok	77,89	78,38	78,29	78,41
Sawah Lunto	71,72	72,39	72,64	72,88
Padang Panjang	77,30	78,00	77,93	77,97
Bukittinggi	80,11	80,71	80,58	80,7
Payakumbuh	78,23	78,95	78,90	79,08
Pariaman	76,26	76,70	76,90	77,07

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat dan BPS Statistik Indonesia

Permasalahannya akan lebih terlihat pada komponen pembentuk IPM meliputi :

- 1) Angka Harapan Lama Sekolah,
- 2) Angka Rata-Rata Lama sekolah,
- 3) Umur Harapan Hdup (UHH), dan,
- 4) Daya Beli Masyarakat.

Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-Rata Lama Sekolah mencerminkan pembangunan manusia dalam bidang pendidikan. Berdasarkan data yang tersaji pada Tabel 1.9 dan Tabel 1.10 capaian Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Pemerintah Kota Pariaman mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 capaian Angka Harapan Lama Sekolah sebesar 14,51 dan menjadi 14,55 pada tahun 2021. Sementara itu capaian pada Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2017 sebesar 10,10 dan menjadi 10,67 pada Tahun 2021. Namun jika dibandingkan dengan sesama Kota di Provinsi Sumatera Barat. Untuk capaian Angka Harapan Lama Sekolah Pemerintah Kota Pariaman masih kalah dari Kota Padang Panjang dan Kota Bukittnggi. Sedangkan untuk capaian Angka Rata-Rata Lama Sekolah Pemerintah Kota Pariaman berada di urutan ke-6 dari 7 Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Seperti yang tertera pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.9
Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/kota
Se Sumatera Barat Tahun 2017-2021

Wilayah	2017	2018	2019	2020	2021
Sumatera Barat (Provinsi)	13,94	13,95	14,01	14,02	14,09
Kabupaten :					
Kepulauan Mentawai	12,07	12,39	12,76	12,82	12,89
Pesisir Selatan	13,06	13,30	13,31	13,32	13,33
Kab.Solok	13,01	13,02	13,03	13,04	13,05
Sijunjung	12,34	12,35	12,36	12,37	12,38
Tanah Datar	13,59	13,88	14,32	14,33	14,34
Padang Pariaman	13,56	13,57	13,62	13,67	13,68
Agam	13,94	13,85	13,86	13,87	13,88
Lima Puluh Kota	13,26	13,27	13,28	13,29	13,3
Pasaman	12,72	12,78	12,79	12,80	12,81
Solok Selatan	12,68	12,69	12,70	12,71	12,72
Dharmasraya	12,40	12,41	12,42	12,43	12,44
Pasaman Barat	13,06	13,22	13,40	13,61	13,68
Kota :					
Padang	16,15	16,50	16,51	16,52	16,53
Kota Solok	14,29	14,30	14,31	14,32	14,33
Sawah Lunto	13,14	13,15	13,16	13,17	13,18
Padang Panjang	15,03	15,04	15,05	15,06	15,07
Bukittinggi	14,94	14,95	14,96	14,97	14,98
Payakumbuh	14,23	14,24	14,25	14,26	14,27
Pariaman	14,51	14,52	14,53	14,54	14,55

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Tabel 1.10
**Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota
 Se Sumatera Barat Tahun 202017-2021**

Wilayah	2017	2018	2019	2020	2021
Sumatera Barat (Provinsi)	8,72	8,76	8,92	8,99	9,07
Kabupaten :					
Kepulauan Mentawai	6,69	6,95	7,08	7,09	7,20
Pesisir Selatan	8,13	8,14	8,25	8,26	8,27
Kab.Solok	7,60	7,84	7,85	7,86	7,87
Sijunjung	7,72	7,77	8,10	8,11	8,12
Tanah Datar	8,14	8,44	8,45	8,61	8,62
Padang Pariaman	7,21	7,50	7,86	7,87	7,88
Agam	8,39	8,69	8,85	8,96	8,97
Lima Puluh Kota	7,96	7,97	7,98	7,99	8,07
Pasaman	7,65	7,66	7,86	8,09	8,10
Solok Selatan	8,00	8,15	8,16	8,28	8,32
Dharmasraya	8,24	8,25	8,46	8,47	8,55
Pasaman Barat	7,85	7,86	8,06	8,19	8,27
Kota :					
Padang	11,32	11,33	11,34	11,58	11,59
Kota Solok	10,95	11,01	11,02	11,03	11,04
Sawah Lunto	9,93	9,94	9,97	10,17	10,32
Padang Panjang	11,43	11,44	11,45	11,62	11,63
Bukittinggi	11,30	11,31	11,32	11,33	11,34
Payakumbuh	10,45	10,46	10,72	10,73	10,81
Pariaman	10,10	10,36	10,37	10,59	10,67

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Sementara itu pada Usia Harapan Hidup penduduk yang mencerminkan pembangunan manusia dalam bidang kesehatan, menunjukkan usia harapan hidup penduduk Pemerintah Kota Pariaman dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada Tahun 2016 Usia Harapan Hidup Kota Pariaman sebesar 69,63 menjadi sebesar 70,28 Pada Tahun 2020. Namun kondisi ini capaian usia harapan hidup ini masih berada pada nomor urut ke-6 dari 7 Kota di Provinsi Sumatera Barat. Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya akses dan kualitas layanan kesehatan. Komponen pertama dalam pembentuk IPM yaitu Umur Harapan Hidup (UHH). Seperti yang tertera pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.11
Perkembangan Umur Harapan Hidup Kabupaten/kota
Se Sumatera Barat Tahun 2017-2021

Wilayah	2017	2018	2019	2020	2021
Sumatera Barat (Provinsi)	68,78	69,01	69,31	69,47	69,59
Kabupaten :					
Kepulauan Mentawai	64,37	64,49	64,68	64,73	64,73
Pesisir Selatan	70,23	70,45	70,73	70,86	70,96
Kab.Solok	67,65	67,95	68,34	68,58	68,79
Sijunjung	65,44	65,69	66,02	66,21	66,36
Tanah Datar	69,11	69,38	69,73	69,94	70,12
Padang Pariaman	67,96	68,23	68,58	68,79	68,97
Agam	71,57	71,83	72,17	72,37	72,53
Lima Puluh Kota	69,31	69,47	69,70	69,79	69,84
Pasaman	66,54	66,82	67,18	67,40	67,59
Solok Selatan	66,92	67,21	67,58	67,81	68,01
Dharmasraya	70,44	70,73	71,10	71,33	71,53
Pasaman Barat	67,15	67,37	67,67	67,82	67,94
Kota :					
Padang	73,20	73,55	73,57	73,65	73,69
Kota Solok	72,92	73,14	73,45	73,61	73,73
Sawah Lunto	69,39	69,59	69,87	70,00	70,1
Padang Panjang	72,46	72,58	72,77	72,82	72,82
Bukittinggi	73,69	73,91	74,22	74,38	74,5
Payakumbuh	73,13	7,33	73,61	73,74	73,84
Pariaman	69,67	69,87	70,15	70,28	70,38

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Untuk komponen yang lain dari pembentuk IPM yaitu Daya Beli Masyarakat/ Pengeluaran Per Kapita. Selama dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2017 Daya Beli Masyarakat/ Pengeluaran Per Kapita sebesar Rp. 12.425,- menjadi pada Tahun 2021 sebesar Rp. 12.818,-. Kondisi ini sedikit lebih baik karena berada karena pada urutan ke-4 diantara 7 Kota di Provinsi Sumatera Barat. Seperti yang tertera pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.12

**Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten/Kota
Se Sumatera Barat Tahun 2017-2021 (Ribu Rp/Org/Tahun)**

Wilayah	2017	2018	2019	2020	2021
Sumatera Barat (Provinsi)	10.306	10.638	10.925	10.733	10.790
Kabupaten :					
Kepulauan Mentawai	6.010	6.211	6.429	6.281	6.321
Pesisir Selatan	8.819	9.089	9.444	9.212	9.270
Kab.Solok	9.743	10.035	10.309	10.171	10.215
Sijunjung	10.093	10.277	10.395	10.361	10.389
Tanah Datar	10.331	10.417	10.709	10.588	10.616
Padang Pariaman	10.579	10.919	11.158	10.998	11.050
Agam	9.388	9.489	9.780	9.651	9.662
Lima Puluh Kota	9.151	9.500	9.842	9.596	9.668
Pasaman	7.882	8.238	8.599	8.425	8.440
Solok Selatan	9.891	10.199	10.505	10.325	10.367
Dharmasraya	10.851	11.189	11.431	11.273	11.324
Pasaman Barat	8.704	8.979	9.180	9.047	9.089
Kota :					
Padang	13.957	14.312	14.728	14.481	14.540
Kota Solok	11.673	11.968	12.337	12.117	12.168
Sawah Lunto	9.343	9.765	10.238	10.182	10.195
Padang Panjang	10.240	10.440	11.013	10.734	10.754
Bukittinggi	12.816	13.035	13.586	13.282	13.331
Payakumbuh	12.858	13.114	13.464	13.281	13.317
Pariaman	12.425	12.611	12.958	12.796	12.818

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Pariaman dalam bidang Pembangunan Manusia yang berkualitas adalah:

- 1 Kualiras pendidikan masyarakat Kota Pariaman masih rendah;
 - 2 Kualits kesehatan masyarakat Kota Pariaman masih rendah;
 - 3 Pendapatan perkapita masyarakat masih rendah.
- 3) Permasalahan penerapan reformasi birokrasi yang masih belum optimal

Permasalahan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah belum optimalnya penerapan program reformasi birokrasi untuk mendukung pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Kelembagaan yang ramping struktur dan kaya fungsi belum

didukung dengan kualitas SDM, sarana dan prasarana yang memadai. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang masih terbatas bagi penyelenggara pemerintahan menjadi kendala dalam menerapkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Kemudian dalam proses pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum dilakukan merata secara optimal. SPIP dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak.

Dalam cakupan 8 (delapan) program reformasi birokrasi, permasalahan yang mendapat perhatian dalam kurun waktu lima tahun mendatang, meliputi:

1 Manajemen Perubahan

Pemerintahan Kota Pariaman merupakan Pemerintah Kota punya visi perubahan yang jelas dalam tatakelola pemerintahan. Beranjak dari kondisi tersebut, Pemerintah Kota Pariaman saat ini memiliki orientasi budaya kerja yang berbeda, tata nilai yang berbeda, serta etika kerja yang berbeda dalam menyelenggarakan pemerintahan. Keadaan seperti ini akan menjadi problem apabila tidak ditangani dengan benar dan tepat.

2 Penguatan Pengawasan

Di sisi lain, pemerintah Kota Pariaman juga menghadapi masalah dalam hal kurangnya kemampuan dan jumlah personil aparatur pengawas. Belum dapat diselenggarakannya kegiatan pencanangan (launching) Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan pemerintah Kota Pariaman secara menyeluruh. Masalah lain yang muncul terkait dengan hal di atas adalah masalah sistem dokumentasi dan monitoring yang terintegrasi belum dimanfaatkan secara maksimal. Kondisi itu dapat dilihat pengelolaan

dokumentasi dan kearsipan yang masih bersifat manual dan belum terdokumentasi secara elektronik.

3 Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Dari hasil evaluasi yang dilakukan Kementerian PAN-RB tahun 2021, bahwa secara umum penerapan manajemen kinerja menunjukkan belum membaik dan bersifat implementatif sampai ke level operasional. Hal yang masih perlu menjadi perhatian adalah masalah pengukuran kinerja, khususnya indikator kinerja.

4 Penguatan Kelembagaan

Desain organisasi yang dirancang saat ini belum optimal menjawab kebutuhan organisasi yang ideal. Akibatnya masih terdapat tumpang tindih tugas dan fungsi pada unit kerja pada unit utama serta masih terdapatnya besaran organisasi unit pelaksana teknis yang tidak sesuai dengan beban kerja yang harus dilaksanakan. Dalam tataran implementasi, masih terdapat beberapa program/kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya, terdapatnya ketidakseimbangan beban kerja antar bagian, serta kurang berimbangannya penjabaran tugas dan fungsi ke dalam program/kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibandingkan dengan program/kegiatan fasilitasi.

5 Penguatan Tata Laksana

Dalam bidang tata laksana masih ditemui beberapa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kota Pariaman yang belum sepenuhnya didasarkan atas prosedur yang baku dan terstandarisasi. Hal ini berakibat pada layanan yang seharusnya dapat dilakukan secara cepat seringkali harus berjalan tanpa proses yang pasti karena terdapat sistem tata laksana yang tidak baik. Penerapan e-government telah dilaksanakan pada beberapa layanan di pemerintah Kota Pariaman, namun demikian pemanfaatannya belum efektif efisien, dan terintegasi dalam satu sistem. Selain itu manajemen kearsipan berbasis TIK belum berjalan baik dan belum diterapkan di semua unit utama.

6 Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur

SDM pemerintah Kota Pariaman, masih belum memenuhi jumlah yang sesuai untuk menjalankan fungsi organisasi. Ditinjau dari aspek lain, jenis pegawai yang ada di pemerintah Kota Pariaman secara kualitas kurang memadai, masih terdapat kesenjangan antara kualifikasi dan kompetensi dengan kebutuhan organisasi, belum akuratnya penempatan pegawai sesuai dengan kompetensinya, serta belum efektifnya sistem pengelolaan kepegawaian berdasarkan kinerja. Permasalahan lainnya terkait dengan data/informasi kepegawaian, yakni kurangnya kesadaran dan partisipasi unit kerja dalam mengelola data-data kepegawaiannya sehingga berpengaruh pada tingkat keakuratan, kemutakhiran, keterpaduan, dan pemanfaatannya secara terpadu. Sementara itu, pemerintah Kota Pariaman belum ada diklat yang digunakan sebagai tempat pelatihan dan pendidikan pegawai.

7 Deregulasi Kebijakan

8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Banyak ditemukan problem kelembagaan dan masyarakat yang menyangkut pelayanan diantaranya: Ditemukan adanya keterlambatan pelayanan, menumpuk urusan pelayanan pada satu OPD (Organisasi Pemerintahan Daerah), pegawai yang mempersulit pelayanan, rantai birokrasi pelayanan yang masih panjang. Untuk itu, maka perubahan yang besar di dalam reformasi birokrasi ini harus dikelola dengan baik. Peningkatan kualitas pelayanan publik akan dirancang serta diimplementasikan sesuai dengan kondisi yang ada di pemerintah Kota Pariaman.

Secara umum, masing-masing program area perubahan pemerintahan memiliki tujuan spesifik sebagai berikut:

- Manajemen Perubahan bertujuan mendorong terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi

yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas.

- Penguatan Pengawasan bertujuan menciptakan penyelenggaraan birokrasi yang bersih dan bebas KKN.
- Penguatan Akuntabilitas Kinerja bertujuan mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan segala sumber yang dipergunakannya.
- Penguatan Kelembagaan bertujuan mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien
- Penguatan Tata Laksana bertujuan mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintah Kota Pariaman dan pelayanan, sekaligus juga untuk mengubah mental aparatur.
- Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur bertujuan memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional.
- Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan di Lingkungan pemerintah Kota Pariaman bertujuan terciptanya sistem peraturan perundang-undangan dan Peraturan di Lingkungan pemerintah Kota Pariaman yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bertujuan mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta meningkatkan kualitas pelayanan.

Untuk menjalankan agenda reformasi ini, diperlukan adanya dukungan dana serta unit pelaksana yang bertanggung jawab menjalankan program ini. Garis besar rencana anggaran reformasi birokrasi di pemerintah Kota Pariaman dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 telah tersusun bagi terlaksananya reformasi birokrasi pada kedelapan program area perubahan.

Tabel 1.13
Capaian Nilai Sakip dan Indeks RB Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2017-2021

No.	Urain	Tahun					Ket
		2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Nilai Sakip	52,35 (CC)	53,22 (CC)	56,15 (CC)	56,50 (CC)	60,06 (B)	
2.	Indeks RB	-		51,62 (CC)	53,42 (CC)	58,19 (CC)	

Sumber : Kemenpan & RB Republik Indonesia

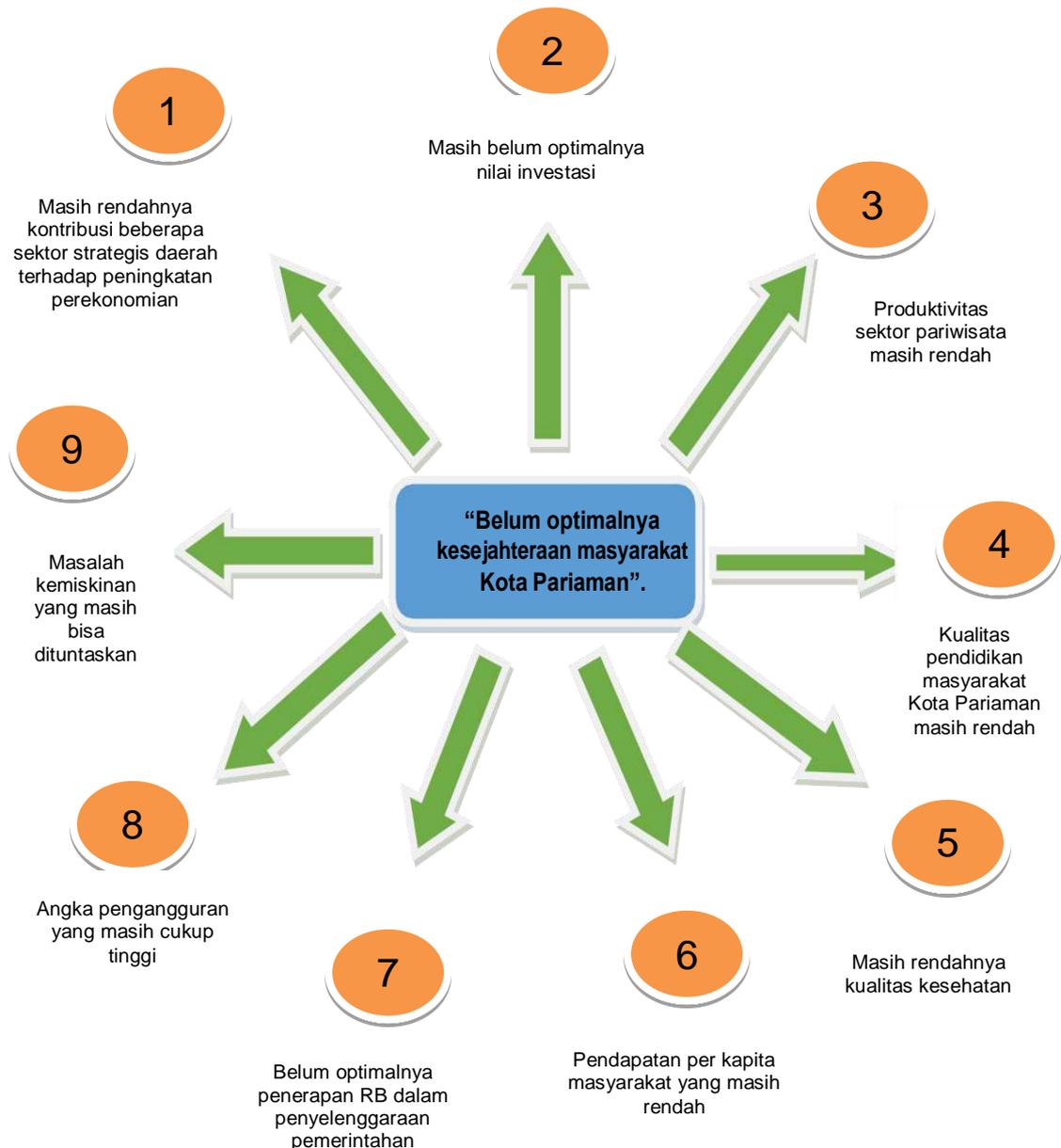
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yaitu:

1. belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik;
2. belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel
3. belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah yang kapabel;

Permasalahan makro pembangunan Kota Pariaman tersebut, selanjutnya dijabarkan ke dalam 8 (delapan) pokok permasalahan sebagai berikut:

- 1 Masih rendahnya kontribusi beberapa sektor strategis daerah terhadap peningkatan perekonomian.
- 2 Masih belum optimalnya nilai investasi.
- 3 Produktivitas sektor pariwisata masih rendah.
- 4 Kualitas pendidikan masyarakat Kota Pariaman masih rendah.
- 5 Masih rendahnya kualitas kesehatan masyarakat
- 6 Pendapatan perkapita masyarakat yang masih rendah
- 7 Belum optimalnya penerapan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
- 8 Angka pengangguran yang masih cukup tinggi
- 9 Masalah kemiskinan yang masih bisa dituntaskan

Gambar 1.2
Mata Rantai Permasalahan Utama dan Pokok Pembangunan Daerah
Kota Pariaman



1.4.2 Isu Strategis Pembangunan Daerah

Penentuan isu strategis menjadi bagian penting dalam penyusunan rencana pembangunan daerah 5 tahun, dimana identifikasi dan klasifikasi isu-isu didasarkan kepada asumsi pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah, luas dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit yang signifikan dengan memperhatikan pada tugas dan

tanggung jawab pemerintah daerah dan prioritas janji politik yang perlu diwujudkan. Perumusan isu strategis yang berangkat dari permasalahan pembangunan daerah, akan menjadi dasar yang tepat dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang strategis.

- 1) Kajian Kebijakan dan Agenda Pembangunan Sektor, Regional, Nasional dan Global
 - a) Sustainable Development Goals / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs/TPB)

Milenium Development Goals atau biasa kita kenal dengan MDG`s merupakan komitmen dari 189 negara untuk tujuan pembangunan yang lebih baik, yang dicanangkan mulai September 2000 hingga 2015 telah dianggap gagal. Sejak diadopsi di Majelis Umum Perserikatan Bangsa- Bangsa pada bulan September 2015, Indonesia telah mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Pemerintah telah menunjukkan komitmen yang kuat dan mengambil tindakan awal, termasuk menghubungkan sebagian besar target dan indikator SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Mendengah Daerah (RPJMD) Kota.

Penandatanganan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan oleh Presiden Jokowi pada bulan Juli 2017 merupakan tonggak utama, yang menetapkan struktur dan mekanisme tata kelola SDGs nasional untuk perencanaan, penganggaran, pembiayaan, pemantauan dan pelaporan.

Sustainable Development Goals terdiri dari tiga tujuan yang dibangun melalui 5 pondasi dan 4 pilar. Lima pondasi SDGs meliputi manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan

kemitraan. Sedangkan 4 Pilar SDGs yakni Sosial, Lingkungan, Ekonomi, dan Hukum & Tata Kelola dengan diturunkannya menjadi 17 tujuan .



Sebagai upaya dalam mencapai 17 tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut, maka selanjutnya DNA SDGs harus diintegrasikan terhadap setiap arah pembangunan baik Kota, Provinsi, dan Nasional. Untuk itu diamanatkan dalam Permendagri 86 Tahun 2017, bahwa sebagai upaya untuk memastikan SDGs telah menjadi dasar dan isu yang harus diperhatikan dalam pembangunan, maka penelaahan KLHS RPJMD sebagai bagian penting dalam tahapan penyusunan isu-isu strategis.

Merujuk terhadap Permendagri No 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD dijelaskan, bahwa KLHS RPJMD adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. Dari total 17 indikator kemudian diinterpretasikan melalui indikator yang dibagi sesuai prioritas kewenangannya. Total terdapat 222 indikator yang menjadi

acuan Kota Pariaman, yang harus dicapai untuk mendukung indikator SDG`s. Berikut merupakan capaian KLHS Kota Pariaman yang dirumpunkan dari 17 Goals SDG`s.

Tabel 1.14

Ketercapaian Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Pariaman

NO	Nama TPB	Jumlah Indikator	Evaluasi Capaian			
			SS	SB	NA	BK
TPB 1	Tanpa Kemiskinan	25	14	9	1	1
TPB 2	Tanpa Kelaparan	11	7	3	1	0
TPB 3	Kehidupan sehat dan sejahtera	34	29	4	1	0
TPB 4	Pendidikan berkualitas	13	8	5	0	0
TPB 5	Kesetaraan gender	14	9	4	1	0
TPB 6	Air bersih dan sanitasi layak	18	8	7	1	2
TPB 7	Menjamin akses energi	2	0	0	0	2
TPB 8	Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak	19	7	8	4	0
TPB 9	Infrastruktur, industri dan inovasi	13	7	2	2	2
TPB 10	Mengurangi kesenjangan	6	4	1	1	0
TPB 11	Kota dan pemukiman berkelanjutan	20	8	4	0	8
TPB 12	Pola produksi dan konsumsi berkelanjutan	5	1	1	1	2
TPB 13	Penanganan perubahan iklim	2	2	0	0	0
TPB 15	Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat	4	1	0	2	1
TPB 16	Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh	21	13	5	3	0
TPB 17	Kemitraan untuk mencapai tujuan	15	8	5	2	0
Total		222	126	58	20	18
Persentase		100%	57%	26%	9%	8%

Sumber : Bappeda Kota Pariaman, 2021

Menurut pilar, capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Pariaman, bahwa Pilar yang capaian tertinggi adalah pilar sosial (67 indikator dengan kategori SS), pilar ekonomi (26 indikator dengan kategori SS) dan pilar lingkungan (22 indikator dengan kategori SS). Kategori SB tertinggi adalah pilar sosial (25 indikator) sedangkan kategori NA tertinggi adalah pilar ekonomi (9 indikator). Rincian masing-masing indikator TPB dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.15

Capaian Pelaksanaan TPB Kota Pariaman Menurut Pilar

NO	Nama TPB	Jumlah Indikator	Evaluasi Capaian			
			SS	SB	NA	BK
1	Sosial	97	67	25	4	1
2	Ekonomi	55	26	16	9	4
3	Lingkungan	49	20	12	4	13
4	Hukum dan Tata Kelola	21	13	5	3	0
Total		222	126	58	20	18
Persentase		100%	57%	26%	9%	8%

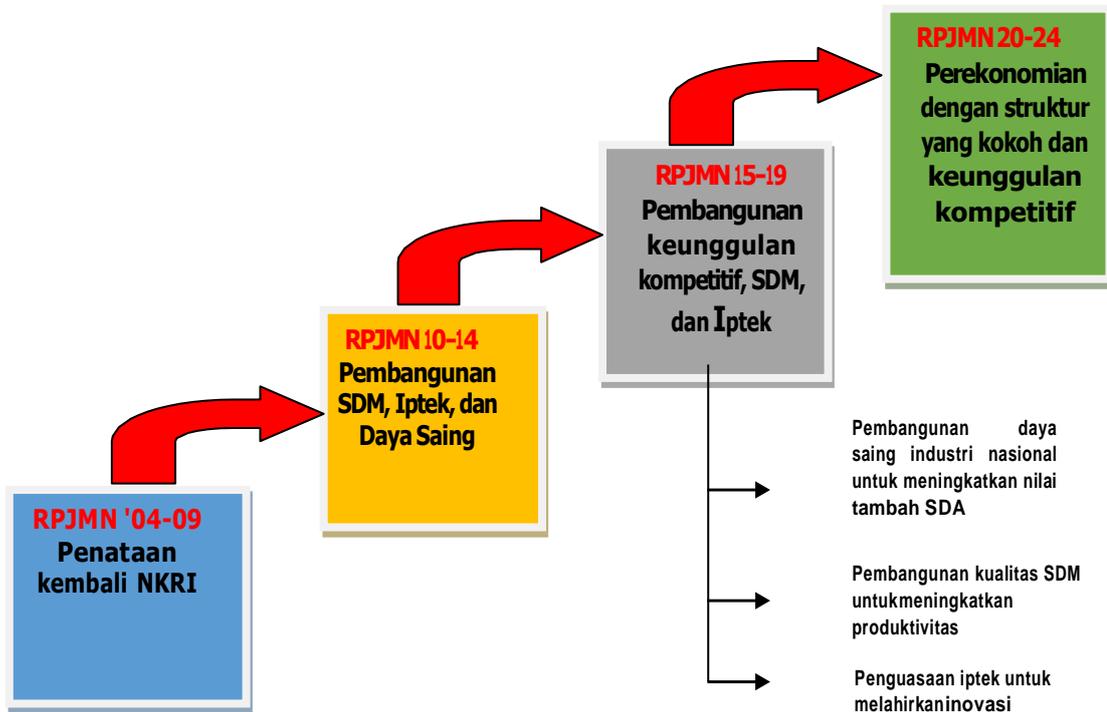
Sumber : Bappeda Kota Pariaman, 2021

b) RPJPN Tahun 2005-2025

Isu-isu secara nasional yang memiliki potensi besar untuk memengaruhi arah pembangunan Kota Pariaman pada masa mendatang adalah kebijakan dari pemerintah pusat. Dokumen perencanaan tingkat nasional merupakan salah satu sumber kebijakan yang memiliki kepastian tinggi dan dalam amanat peraturan perundangan harus diikuti karena penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RPJMN. Mengingat perodesasi RPJMD Kota Pariaman mengikuti periode RPJMN III dan IV. maka arah kebijakan RPJMD Kota Kota Pariaman menyelaraskan dengan periode RPJMN III (2015-2019) dan IV (2019-2024) yang mengacu pada RPJPN tahap ketiga (2015-2019) dan tahap ke empat (2019-2024).

Gambar 1.3.

Fokus Kebijakan Setiap Tahapan dalam RPJPN 2005-2025



Arah kebijakan untuk RPJMN tahap III ditekankan pada pembangunan daya saing industri nasional untuk meningkatkan nilai tambah SDA, pembangunan kualitas SDM untuk meningkatkan produktivitas, dan penguasaan IPTEK untuk melahirkan inovasi. Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM tahap III, RPJM tahap III ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Kualitas sumber daya manusia terus mengalami perubahan positif yang ditandai oleh meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal serta kesejahteraan dan perlindungan anak; tercapainya kondisi

penduduk tumbuh seimbang; serta mantapnya budaya dan karakter bangsa.

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan semakin efektif dan efisien yang dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari; terus membaiknya pengelolaan

dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup; meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat terhadap lingkungan hidup; serta semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah Indonesia.

Daya saing perekonomian Indonesia semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, kelautan, dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan; terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha; makin selarasnya pembangunan pendidikan, industri, ilmu pengetahuan dan teknologi; serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan, dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian. Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi; terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai; mulai dimanfaatkannya tenaga nuklir untuk pembangkit listrik dengan mempertimbangkan faktor keselamatan secara ketat; terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi Indonesia; terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan

pengembangan sumber daya air; serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Wilayah perdesaan merupakan titik vital pembangunan masyarakat ekonomi lemah. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur perdesaan harus terus dikedukung terutama untuk mendukung pembangunan pertanian. Selain itu, pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi sarana prasarana pendukung kehidupan bagi seluruh masyarakat harus terus ditingkatkan dengan didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang, berkelanjutan, efisien, dan akuntabel. Diharapkan, dengan terpenuhinya kondisi tersebut semakin mendorong terwujudnya kabupaten/kota tanpa permukiman kumuh.

Berdasarkan telaahan RPJPN tahap III (2015-2019), maka pembangunan Kota Pariaman harus selaras dengan arahan RPJPN tahap III dengan menyesuaikan karakteristik lokal seperti:

- 1 Meningkatkan daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat;
- 2 Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari;
- 3 Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan didukung oleh meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat; serta
- 4 Semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, kelautan, dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan untuk mendukung daya saing perekonomian Indonesia yang semakin kuat dan kompetitif.

c) RPJMN Tahun 2020-2024

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Gambar 1. 4
Nawacita kedua RPJMN 2020-2024



Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Gambar 1.5

5 Arahan Utama Presiden



Pencapaian visi 2045 melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi.

- 1 | Pembangunan SDM**
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
- 2 | Pembangunan Infrastruktur**
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
- 3 | Penyederhanaan Regulasi**
Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.
- 4 | Penyederhanaan Birokrasi**
Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
- 5 | Transformasi Ekonomi**
Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selanjutnya visi dan misi Presiden diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan sebagai berikut :

- 1 memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
- 2 mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- 3 meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- 4 revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- 5 memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- 6 membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
- 7 memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik;

d) RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Visi Pembangunan Sumatera Barat merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2021-2026. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka Visi Provinsi Sumatera Barat untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya yang akan diwujudkan pada akhir tahun 2026. Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. Visi dan Misi menjadi gambaran otentik Provinsi Sumatera Barat dalam 5 tahun (lima) tahun mendatang pada kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk periode RPJMD Tahun 2021-2026.

Sesuai dengan visi Gubernur terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 adalah:

***“Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang
Unggul dan Berkelanjutan”***

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Provinsi Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN 2019-2024, dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025.

Untuk memahami Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat tersebut dijelaskan pengertian sebagai berikut:

Masyarakat Madani

Sumatera Barat Madani dimaksudkan sebagai masyarakat yang memiliki tatanan kehidupan yang demokratis. Masyarakat madani berpegang teguh pada demokrasi, menghargai hak asasi manusia, taat

hukum dan menghormati nilai keadilan dan peradaban. Misi untuk mewujudkan masyarakat Sumatera Barat yang madani tentu selaras dengan adat dan budaya Minangkabau yang egaliter dengan pengetahuan dan pemahaman tentang adat dan agama yang berkaitan dengan etika dan moral.

Sumatera Barat Yang Unggul

Masyarakat madani akan tercipta jika masyarakatnya memiliki pengetahuan yang luas dan pendidikan yang berkualitas. Orientasi pendidikan masyarakat madani lebih mengutamakan pembangunan jiwa dan karakter masyarakat sehingga menjadi masyarakat madani yang unggul dan mampu bersaing secara global. Makna unggul dan berdaya saing yang dimaksud adalah masyarakat madani yang memiliki keunggulan sebagai sumber daya insani dalam mengelola sumber daya pembangunan, dan secara kompetitif menunjukkan kemampuan bersaing, baik di tingkat regional, nasional bahkan internasional. Unggul dan berdaya saing ditandai oleh tingginya produktivitas dan daya saing manusia sebagai sumberdaya pembangunan melalui pendidikan berkualitas dan berkembangnya pertanian, Industri Kecil dan Menengah serta pariwisata di Sumatera Barat.

Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan yaitu memenuhi kebutuhan dari generasi sekarang tanpa membahayakan kesanggupan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Artinya pembangunan ekonomi, selalu memanfaatkan sumber daya alam, dijalankan sedemikian rupa, sehingga generasi mendatang dapat melanjutkan pembangunan yang dijalankan sekarang. Tiga hal pokok yang menjadi perhatian utama kita dalam Pembangunan berkelanjutan ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, Keberlanjutan Sosial dan Keberlanjutan Lingkungan. Pertumbuhan ekonomi, yakni menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan me-restrukturisasi sistem

produktif untuk menghemat sumber daya dan energi, Keberlanjutan sosial, yakni menjamin keadilan sosial dalam pelayanan kepada masyarakat, Keberlanjutan lingkungan, yakni dengan menjaga lingkungan agar nyaman dan aman serta tidak merusak agar dapat dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang.

Dalam pencapaian visi tersebut. Adapun misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- 1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing;
- 2 Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaiik Basandi
- 3 Syara', Syara' Basandi Kitabullah;
- 4 Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan Perikanan;
- 5 Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis Digital;
- 6 Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan;
- 7 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
- 8 Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Prioritas Pembangunan Daerah yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

- 1 Pembangunan Mental Pengamalan Agama dan ABS-SBK Dalam Kehidupan Masyarakat;
- 2 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan;
- 3 Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan;
- 4 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat;
- 5 Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis;

- 6 Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi;
- 7 Peningkatan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman dan Kelautan;
- 8 Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal;
- 9 Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur;
- 10 Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana.

Berdasarkan visi, misi dan prioritas tersebut, Provinsi Sumatera Barat menekankan pembangunan daerah pada masyarakat yang berperadaban tinggi dan maju yang berbasis pada nilai-nilai, norma hukum, moral yang ditopang oleh keimanan melalui perbaikan sikap mental yang sesuai dengan nilai agama, adat dan kearifan lokal budaya Minangkabau, yang kemudian diikuti dengan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan SDM, ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan. Prioritas pembangunan daerah provinsi yang diusulkan dikembangkan dari persyaratan minimum standar pembangunan daerah (SPM). Dan Memperhatikan kondisi daerah dan isu global Sustainable, maka prioritas pembangunan untuk provinsi Sumatera Barat juga difokuskan pada pengembangan sumber energi terbarukan dan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan, disamping kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana.

Dalam rangka menunjang pembangunan berdimensi kewilayahan provinsi Sumatera Barat maka kebijakan dan strategi pembangunan yang akan dilakukan pemerintah Kota Pariaman juga akan memperhatikan pembangunan berdimensi kewilayahan yang telah ditetapkan Provinsi Sumatera Barat untuk Kota Pariaman meliputi :

- 1 Pengembangan Sistem Perkotaan yang menetapkan Kota Pariaman sebagai salah satu daerah untuk Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).
- 2 Sebagai Kawasan sepadan pantai.

- 3 Sebagai Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya. Dan Kota Pariaman ditetapkan sebagai Kawasan Pantai Berhutan Bakau.
- 4 Sebagai Kawasan pengembangan Kawasan Sentra Industri dengan komoditi : 1) Industri Tekstil dan Produksi Tekstil, 2) Industri Makanan dan Ringan, 3) Industri Pengelohan Hasil Laut dan Perikanan.
- 5 Sebagai Kawasan Pariwisata dengan komoditi : 1) Kawasan yang dikembangkan, 2) Kawasan Pantai Gandorih dan Pulau Angso Duo.

Tabel 1.16

Sinkronisasi Program Unggulan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan Program Unggulan RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023

NO	Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat RPJMD Tahun 2021-2026	NO	Program Unggulan Kota Pariaman RPJMD Tahun 2018-2023
1	Sumbar Sehat dan Cerdas	1	Lanjutkan Program Kesehatan Gratis
		2	Lanjutkan Program Pendidikan Gratis
		3	Kartu Pariaman Pintar
		4	Lanjutkan Bis Sekolah Gratis
		5	Program <i>satu keluarga satu sarjana</i>
		6	Kesejahteraan Guru honor PAUD, TK, SD, SMP
2	Sumbar Religius dan Berbudaya	1	Pembangunan Pusat Pendidikan Alquran (Read Alquran Centre)
		2	Pengembangan Pendidikan agama non formal MDA (tk. SD), MDW (tk. SLTP), MDU (tk SLTA)
		3	Magrib Mengaji dan Subuh Mubarakah
		4	Lanjutkan Pembangunan Masjid Terapung Pariaman
3	Sumbar Sejahtera dan Berkeadilan	1	Program Pariaman Sejahtera
		2	Kesempatan Kerja Keluarga Miskin
		3	Revitalisasi Pasar Yang Ada Di Kota Pariaman

e) Isu Regional Provinsi Sumatera Barat

- a. Peningkatan jalan dan jembatan lintas pantai barat Sumatera dan Kabupaten Pasaman Barat.
- b. Peningkatan jalan dan jembatan Simpang Duku (Ketaping) — Pariaman sebagai jalan alternatif dan Padang menuju Padang Pariaman/Agam/Pasaman/Pasaman Barat.

f) RPJPD Kota Pariaman Tahun 2005-2025

RPJPD Kota Pariaman Tahun 2005-2025 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan RPJMD, karena RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan tahapan keempat pelaksanaan pembangunan dari RPJPD Kota Pariaman. Alur tahapan dan penetapan skala prioritas yang ditetapkan ini mencerminkan pentingnya permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan yang lain. Oleh karena itu, tekanan pada skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua terus berkesinambungan dari periode satu ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang yang telah disusun. Visi RPJPD Kota Pariaman tahun 2005-2025 adalah

“Mewujudkan Pariaman Sebagai Kota Perdagangan Dan Jasa Di Wilayah Pesisir Barat Sumatera Menuju Masyarakat Madani ”.

Rumusan visi tersebut dapat diterjemahkan adanya cita dan citra Kota Pariaman dimasa mendatang untuk menjadi salah satu Kota Perdagangan Dan Jasa yang terletak dipantai Barat Sumatera. Perwujudan Kota Perdagangan Dan Jasa dimaksud utamanya dibangun dalam kerangka sistem ekonomi kerakyatan yang berwawasan lingkungan menuju masyarakat madani.

Kota Perdagangan merupakan Kota perdagangan mengandung arti bahwa Kota Pariaman dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang, akan berkembang menjadi pusat aktivitas perdagangan baik skala regional, nasional maupun internasional.

Kota Jasa.

Kota Jasa mengandung arti bahwa Kota Pariaman dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang akan berkembang menjadi pusat aktivitas jasa pelayanan antara lain : hotel, restoran, transportasi, komunikasi, keuangan perbankan, pendidikan, kesehatan dan pelayanan jasa lainnya.

Wilayah Pesisir Barat Sumatera merupakan Suatu wilayah yang batasan cakupannya meliputi di sepanjang pesisir barat pulau sumatera.

Masyarakat Madani merupakan Masyarakat Madani mengandung arti bahwa dalam 20 tahun mendatang diharapkan terwujud masyarakat Kota Pariaman yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, berbudi pekerti luhur, peradaban maju, memiliki kesadaran sosial yang kuat, gotong royong, sehat, cerdas, makmur, sejahtera, dalam lingkungan yang damai, tenteram, dan nyaman.

Dalam rangka mewujudkan visi Kota Pariaman sebagai Kota Perdagangan dan Jasa di Wilayah Pesisir Barat Sumatera menuju masyarakat madani maka misi Kota Pariaman dirumuskan sebagai berikut:

- 1 Meningkatkan Kualitas SDM dan Derajat Sosial Masyarakat;
- 2 Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berwawasan lingkungan;
- 3 Mewujudkan rasa tertib dan aman dalam kehidupan beragama dan bernegara;
- 4 Mewujudkan tata pemerintahan yang baik didukung peningkatan kualitas aparatur dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
- 5 Mewujudkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pembangunan daerah.

RPJPD 2005-2025 pada tahun RPJMD ke 4 (2018-2023), diarahkan dengan tetap berpegang pada capaian kinerja pada RPJMD ke 3. Sesuai dengan hasil implementasi, pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-3, maka pada RPJM ke-4 diarahkan untuk lebih memantapkan penguatan upaya pencapaian keunggulan daerah melalui sarana-sarana pendukung lanjut, penguatan orientasi kompetisi pada pembangunan SDM unggul, serta ekspansi perekonomian dan industri berbasis keunggulan daerah yang didukung dengan ketersediaan energy.

Berbagai tujuan dan target pencapaian SDGs yang relevan untuk rujukan perumusan isu strategis pembangunan Kota Pariaman untuk jangka panjang yaitu :

- 1 Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan dengan target :
 - a. Menurunkan proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per hari.
 - b. Menciptakan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda.
 - c. Menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan.
- 2 Mencapai pendidikan dasar untuk semua dengan target :
 - a. Menjamin semua anak laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar.
- 3 Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dengan target :
 - a. Menghilangkan ketimpangan gender ditingkat pendidikan dasar dan lanjutan.
- 4 Menurunkan angka kematian anak dengan target : menurunkan angka kematian balita, bayi dan neonatal.
- 5 Meningkatkan kesehatan ibu dengan target: menurunkan angka kematian ibu dan mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua.
- 6 Memastikan kelestarian lingkungan hidup dengan target:
 - a. Memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumberdaya lingkungan yang hilang.
 - b. Mengurangi laju kehilangan keanekaragaman hayati, dan mencapai pengurangan laju kehilangan yang signifikan.

- c. Menurunkan proporsi penduduk tanpa akses terhadap air minum yang aman dan berkelanjutan layak serta sanitasi dasar.
- d. Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin dipermukiman kumuh.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2021 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum Kota Pariaman, analisis isu-isu strategis, strategi dan arah kebijakan, dan sistematika penulisan.

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Memuat Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023, Indikator Kinerja Utama, dan Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Memuat Pengukuran Kinerja, Metode Pengukuran Pencapaian Target Kinerja, capaian dan analisis kinerja Tahun 2021, dan Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah, agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

a. Visi

Visi berkaitan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, untuk mewujudkan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu. Jadi visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi Pemerintah.

Berdasarkan kondisi Kota Pariaman dewasa ini, serta peluang, tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi dalam 5 tahun, pasangan **GENIUS UMAR (Walikota)–MARDISON MAHYUDDIN (Wakil Walikota)** membuat Visi Kota Pariaman tahun 2018-2023 sebagai berikut:

" Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa, Yang Religius Dan Berbudaya"

Memperhatikan Visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kota Pariaman dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global.

Visi tersebut mengandung maksud, bahwa Pariaman sebagai kota kecil berwawasan lingkungan akan menjadi kota yang handal dan maju

dalam wisata, perdagangan dan jasa, yang religius dan berbudaya dengan dukungan infrastuktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan dukungan pengembangan politik, keamanan, sosial, ekonomi, agama dan budaya.

Untuk memahami Visi Pembangunan Kota Pariaman tersebut jelaskan pengertian sebagai berikut:

Kota Wisata : Kota Pariaman diarahkan sebagai kota tujuan wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun domestik. Dengan gerakan yang menyatukan seluruh potensi daerah dan stakeholder dalam penyediaan sarana pariwisata dan prasarana wisata atau fasilitas umum sehingga menarik wisatawan untuk datang ke destinasi wisata yang disediakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perdagangan dan Jasa : mengandung arti bahwa Kota Pariaman akan menjadi Kota Perdagangan dan Jasa yang maju, yang didukung oleh kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap memerhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan Kota Pariaman. Kota Pariaman yang maju dalam perdagangan dan jasa dapat terlihat antara lain melalui laju pertumbuhan ekonomi yang tiap tahun terus meningkat, kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB dan kontribusi kategori Industri Pengolahan serta terhadap PDRB yang semakin meningkat serta nilai investasi yang semakin besar

Religius : mengandung arti bahwa masyarakat Kota Pariaman meyakini kebenaran ajaran Agama Islam serta mengamalkannya dalam wujud keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tindakan nyata dalam keseharian, dengan menjunjung tinggi toleransi dan kepedulian dalam menjalankan kehidupannya.

Berbudaya : mempunyai arti bahwa setiap perilaku kehidupan

masyarakat yang dilandasi oleh etos kerja, tata cara, adat istiadat, tradisi, kearifan lokal, norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta diyakini sebagai nilai-nilai budi pekerti yang luhur yang diwujudkan dalam perilaku interaksi sosial sebagai identitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Tabel 2.1
Keselarsan Visi RPJP, RPJMN, RPJMD Provinsi dengan Perubahan RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023

RPJPD Kota Pariaman Tahun 2005-2025	RPJMN Tahun 2020-2024	RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026	RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023
“Mewujudkan Pariaman Sebagai Kota Perdagangan dan Jasa Di Wilayah Pesisir Barat Sumatera Menuju Masyarakat Madani ”	Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul dan Berkelanjutan	" Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa, yang Religius dan Berbudaya"

b. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Atau MISI adalah kondisi yang harus dipenuhi agar visi yang telah ditetapkan diatas dapat tercapai dengan memperhatikan kondisi objektif daerah.

Dalam rangka mewujudkan visi jangka menengah Kota Pariaman sebagai Kota Wisata, Perdagangan, Jasa, Yang Religius Dan Berbudaya" maka misi Kota Pariaman dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Wisata Kota Pesisir Yang Maju, Religius, Tertib dan Berbudaya Terbaik Sumatra;
2. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berkualitas dan Berbudaya;
3. Mewujudkan Pemerintahan Yang Prima Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik berbasiskan Smart City;
4. Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana;

5. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif Yang Berbasis Lokal.

Lima butir misi diatas didasarkan kepada kebutuhan pembangunan yang telah di temakan dalam bentuk Visi pembangunan daerah. Dalam upaya penyamaan persepsi terhadap misi tersebut serta mengurangi potensi ambiguitas dalam memahami butir misi, maka penjabaran Misi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut;

1. Mewujudkan Wisata Kota Pesisir Yang Maju, Religius, Tertib dan Berbudaya Terbaik Sumatra

Pembangunan diprioritaskan pada pembangunan destinasi wisata dan peningkatan pengelolaan wisata yang maju, religious, tertib dan berbudaya dengan cara meningkatkan daya saing pariwisata adalah bagaimana cara menarik minat para wisatawan untuk datang berkunjung yang tentunya akan mendatangkan devisa dan menciptakan nilai tambah *multipliers effect* terhadap akselerasi pembangunan daerah. Kota Pariaman yang kaya akan nilai sejarah, seni dan budaya dapat dikembangkan untuk tujuan pelestarian sejarah, seni dan budaya islam. Semua daya pesona tersebut memberi nilai tambah diiringi dengan usaha minat wisatawan untuk menikmati berbagai objek wisata serta hasil industri kreatif yang ada. Selain itu perlu jaminan wisata yang mempertahankan nilai-nilai agama dan budaya yang tertib.

2. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berkualitas dan Berbudaya

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi serta menjunjung tinggi budaya asli Kota Pariaman. Misi membangun sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi, berbudaya, dan berkualitas melalui penguasaan iptek serta memiliki etos kerja yang tinggi ditandai dengan meningkatnya status kesehatan dan taraf pendidikan masyarakat dengan ukuran penilaian dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pengembangan dan Peningkatan mutu SDM dapat dilihat dari tiga dimensi, yaitu kualitas pendidikan yang bermutu tinggi disemua

strata, perkembangan IPTEK yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan derajat kesehatan yang tinggi dan merata keseluruh pelosok daerah dan lapisan masyarakat. Termasuk dalam kualitas sumberdaya manusia ini adalah adanya disiplin dan etos kerja yang tinggi sehingga tingkat efisiensi dan produktivitas tenaga kerja menjadi tinggi serta terdapatnya kesetaraan gender sehingga produktivitas tinggi tersebut mampu memanfaatkan peluang, dapat menghadapi tantangan dan siap mengantisipasi kompetisi global.

3. Mewujudkan Pemerintahan Yang Prima Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Smart City.

Misi ini diarahkan untuk membangun tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan pada pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, efektif, efisien dan akuntabel dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

4. Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana;

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan Kota Pesisir Yang Modern yang ditunjukkan dengan peningkatan kualitas infrastruktur, pengembangan *waterfront city*, peningkatan pendapatan masyarakat yang lebih tinggi dan merata dengan mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat pesisir yang lebih produktif berbasis kerakyatan, mendorong sektor unggulan daerah dan memanfaatkan sumberdaya lokal untuk menghasilkan produk yang berdaya saing. Dengan tetap memperhatikan pembangunan yang dinamis, berwasasan lingkungan hidup serta mitigasi bencana.

5. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif Yang Berbasis Lokal.

Misi ini diarahkan pada peningkatan kemampuan perekonomian daerah dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan

keunggulan kompetitif yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, berorientasi pada ekonomi kerakyatan dan sektor ekonomi basis yang mempunyai daya saing baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional serta meningkatkan investasi pada sektor industri kecil dan menengah untuk menyerap tenaga kerja yang didukung oleh keberadaan kawasan industri dan perdagangan serta dibangunnya sentra-sentra industri kecil dan rumah tangga.

Untuk mencapai kualitas perencanaan yang berkelanjutan, maka pada setiap tingkatan dan tahapan perencanaan harus selaras dan konsisten. Keselarasan hubungan antara misi RPJPD, misi RPJMN, misi RPJMD Provinsi dengan misi RPJMD Perubahan Kota Pariaman dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Keselarasn Misi RPJMN 2020-2024, RPJMD Provinsi 2021-2026,
RPJPD Kota Pariaman 2005-2025 Dan
Perubahan RPJMD Kota Pariaman 2018-2023

RPJMN 2020-2024		RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026		RPJPD Kota Pariaman 2005-2025		Perubahan RPJMD KotaPariaman 2018-2023	
No.	Misi	No.	Misi	No.	Misi	No.	Misi
1	Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing.	1	Meningkatkan Kualitas SDM dan Derajat Sosial Masyarakat	2	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berkualitas dan Berbudaya
2	Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing	3	Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktifitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan	2	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Yang Berwawasan Lingkungan	5	Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif yang Berbasis Lokal
		5	Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Daya Saing Kepariwisataa				
		4	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil / Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital				

RPJMN 2020-2024		RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026		RPJPD Kota Pariaman 2005-2025		Perubahan RPJMD KotaPariaman 2018-2023	
No.	Misi	No.	Misi	No.	Misi	No.	Misi
3	Pembangunan Yang Merata Dan Berkeadilan	6	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan.	5	Mewujudkan Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Pembangunan Daerah	4	Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana;
4	Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan						
5	Kemajuan budayayang mencerminkan kepribadian bangsa	2	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah <i>Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah</i>	-	-	2	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berkualitas dan Berbudaya
6	Penegakan Sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya	7	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	4	Mewujudkan tata pemerintahan yang baik didukung peningkatan kualitas aparatur dan peningkatan kualitas pelayanan publik	3	Mewujudkan Pemerintahan Yang Prima Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Smart City
7	Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga						
8	Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya						
9	Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan						

c. Tujuan dan Sasaran

Untuk mencapai kelima misi pembangunan Kota Pariaman dalam jangka menengah, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi tersebut. Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran operasional untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi.

Perumusan tujuan adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (policy planning) yang memiliki titik kritis (critical point) dalam penyusunan RPJMD.

Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran. Perumusan tujuan dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih juga menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Berangkat dari pada Visi dan Misi tersebut, maka dapat dirumuskan Tujuan dan Sasaran RPJMD sebelum perubahan maupun RPJMD setelah perubahan dijelaskan dibawah ini:

1. Dalam rangka pencapaian misi *Mewujudkan Pengelolaan Wisata Kota Yang Maju, Religius, Tertib Dan Berbudaya*, maka ditetapkan tujuan dan sasaran serta indikatornya sebagai berikut:

Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran dan Indakator Kinerja Misi I

RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023			
	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan
No.	Tujuan	NO	Tujuan
1	Meningkatkan Sektor Pariwisata Dalam Perekonomian Indikator : Presentase Sektor Pawisata Terhadap PDRB	1	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian Indikator : % Kontribusi Sektor Pawisata Terhadap PAD % Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB
	Sasaran		Sasaran
1.	Terwujudnya Daya Saing Wisata Indikator : Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata % Pertumbuhan Spending Of Money	1.	Meningkatnya Produktivitas Sektor Pariwisata. Indikator : 1. % Pertumbuhan Spending Of Money

2. Dalam rangka pencapaian misi *Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berkualitas Dan Berbudaya*, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran dan Indakator Kinerja Misi 2

RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023			
	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan
No.	Tujuan	NO	Tujuan
	Meningkatnya Kualitas SDM Indikator : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		Meningkatnya Kualitas SDM Masyarakat Indikator : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
	Sasaran		Sasaran
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Indikator: 1) Angka Harapan Lama Sekolah 2) Angka Rata-rata Lama Sekolah	1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Indikator : 1) Angka Harapan Lama Sekolah 2) Angka Rata-rata Lama Sekolah
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Indikator : 1) Angka Usia Harapan Hidup (UHH) 2) Indeks Keluarga Sehat	2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Indikator : Angka Usia Harapan Hidup (UHH)
			Menurunnya prevalensi stunting Indikator : Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita

3	Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat Indikator : Indeks Daya Beli Masyarakat	4	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Indikator : Pendapatan/PDRB perkapita
4	Menurunnya angka kemiskinan dan Pengangguran Indikator : 1) Angka Kemiskinan 2) Angka Pengangguran		
5	Meningkatnya Kemandirian Desa Indikator : 1) Indeks Desa Membangun		

3. *Mewujudkan Pemerintahan Yang Handal dan Prima Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik berbasis Smart City*, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

Tabel II.5
Tujuan, Sasaran dan Indakator Kinerja Misi 3

RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023			
	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan
No.	Tujuan	NO	Tujuan
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi Indikator : Indeks RB	1	Meningkatnya Birokrasi Yang Baik dan Bersih Indikator : Indeks RB
	Sasaran		Sasaran
1	Meningkatnya Kapasitas tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan Indikator : 1) Indeks Kepuasan Masyarakat 2) Opini WTP BPK Terhadap LKPD 3) Indeks SPBE	1	Meningkatnya Birokrasi Yang Akuntabel Indikator : 1) Nilai Sakip 2) Opini WTP BPK Terhadap LKPD
		2	Meningkatnya Birokrasi Yang Kapabel Indikator : 1) Indeks SPBE 2) Indeks Profesional ASN
		3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Indikator : Indeks Pelayanan Publik

4. *Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana*, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.6
Tujuan, Sasaran dan Indakator Kinerja Misi 4

RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023			
	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan
No.	Tujuan	NO	Tujuan
1	Terwujudnya pembangunan berkelanjutan yangberwawasan lingkungan serta Mitigasi Bencana Indikator : % Pencapaian Target SDG's	1	Terwujudnya Kota Pariaman Layak Huni Indikator : Indeks Kota Layak Huni (Liveable City)
	Sasaran		Sasaran
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Indikator : Indeks Infrastruktur Daerah	1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Indikator Indeks Infrastruktur Daerah
2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Indikator : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indikator : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
		3	Meningkatnya Kulitas Perumahan danPermukiman Layak Huni Indikator : Persentase Perumahan danPermukiman Layak Huni Penurunan Luasan KawasanPermukiman Kumuh
3	Meningkatnya Mitigasi Bencana Indikator : Indeks Resiko Bencana	4	Meningkatnya Mitigasi Bencana Indikator Indeks Resiko Bencana
4	Terwujudnya rasa tertib dan aman dalam kehidupan Masyarakat Indikator Indeks Ketentraman dan ketertiban	5	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat Indikator Indeks Ketentraman dan ketertiban

5. *Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif Yang Berbasis Lokal*, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.7
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Misi 5

RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023			
	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan
No.	Tujuan	NO	Tujuan
1	Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang bertumpu ekonomi kerakyatan dan ekonomikreatif untuk meningkatkan daya saing kota Pariaman Indikator : Angka Pertumbuhan Ekonomi	1	Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi Masyarakat Indikator : 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 2. Gini Ratio (Indeks Gini)
	Sasaran		Sasaran
1	Menurunnya Ketimpangan pendapatan antarpenduduk Indikator : Indeks Gini (Gini Ratio)	1	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Indikator % Kontribusi Sektor Perdagangan TerhadapPDRB
2	Meningkatnya Nilai Investasi Indikator : Laju Pertumbuhan Investasi	2	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Indikator : % Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB
3	Meningkatnya peran industri dan perdaganganserta jasa dalam stabilitas perekonomian Indikator : 1. Laju pertumbuhan Sektor Industri (%) 2. Laju pertumbuhan Sektor Perdaganganan Jasa (%)	3	Meningkatnya Investasi Indikator : Laju Pertumbuhan Investasi (%)
	-	4.	Menurunnya Angka Kemiskinan Indikator : Angka Kemiskinan
	-	5.	Menurunnya Angka Pengangguran Indikator : Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
		6	Meningkatnya Kemandirian Desa Indikator : Indeks Desa Membangun (IDM)

d. Konsistensi Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD menjadi tuntutan yang perlu diperhatikan. Konsistensi penjabaran Visi dan Misi kedalam Tujuan dan Sasaran menentukan efektivitas pembangunan daerah sesuai dengan amanat pembangunan yang tertuang dalam Visi dan Misi Walikota terpilih. Berangkat dari tuntutan tersebut, maka dapat dijabarkan konsistensi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut kedalam matriks berikut ini.

Tabel 2.8
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa Yang Religius Dan Berbudaya	Mewujudkan Wisata Kota Pesisir Yang Maju, Religius, Tertib dan Berbudaya terbaik Sumatra	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata Dalam Perekonomian	Meningkatnya Produktivitas Sektor Pariwisata
	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berkualitas dan Berbudaya	Meningkatkan Kualitas SDM Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pendidikan
			Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
			Meningkatnya Pendapatan Masyarakat
	Mewujudkan Pemerintahan Yang Prima Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Smart City	Meningkatkan Birokrasi yang baik dan bersih	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel
			Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang Kapatabel
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
	Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana.	Terwujudnya Kota Pariaman Layak Huni	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur
			Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
			Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni
			Meningkatnya Mitigasi Bencana
	Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif Yang Berbasis Lokal	Meningkatnya Pemerataan dan Pertumbuhan ekonomi masyarakat	Meningkatnya Ketentraman, Keter-tiban dan keamanan Masyarakat
			Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB
			Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB
			Meningkatnya Nilai Investasi
			Menurunnya Angka Kemiskinan
		Meningkatnya Kemandirian Desa	

e. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Pariaman Sebagai "Kota Wisata, Perdagangan, Jasa, Yang Religius Dan Berbudaya", memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun mulai 2018 sampai dengan 2023. Arah kebijakan memberi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Rumusan strategi dan arah kebijakan dalam mendukung tujuan dan sasaran pembangunan Kota:

Visi : " Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa Yang Religius Dan Berbudaya"							
Misi 1 : Mewujudkan Wisata Kota Pesisir Yang Maju, Religius, Tertib dan Berbudaya terbaik Sumatra							
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
(1)		(2)		(3)		(4)	
1	Meningkatkan Sektor Pariwisata Dalam Perekonomian	1	Meningkatnya Produktivitas Sektor Pariwisata	1	Penguatan aksesibilitas, atraksi dan amenitas, serta kualitas dari SDM Pariwisata	1	Peningkatan kualitas Infrastruktur Pendukung Pariwisata
						2	Pengembangan Aksesibilitas Menuju Daya Tarik Wisata dan Destinasi Pariwisata
						3	Peningkatan kualitas event dan atraksi wisata yang berskala nasional dan internasional
						4	Penguatan Pelaku Sadar Wisata
				2	Penataan dan pengembangan Daerah Tujuan Wisata	1	Pemasaran pariwisata melalui pemanfaatan media cetak dan elektronik serta website dan melaksanakan event kepariwisataan
						2	Pengembangan destinasi wisata

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
(1)		(2)		(3)		(4)	
						3	Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata
						4	Meningkatkan tata kelola kepariwisataan
						5	Pengembangan Desa Wisata
				3	Meningkatkan daya saing pariwisata.	1	Pengembangan kawasan wisata terpadu dengan UMKM
						2	Pengembangan konsep pariwisata berkearifan lokal berbasis masyarakat melalui peningkatan sumberdaya manusia pengelola pariwisata
						3	Pengembangan jejaring kepariwisataan (Pariaman Beltline)
						4	Menetapkan satu destinasi unggulan
				4	Meningkatkan daya saing produk ekonomi kreatif	1	Meningkatkan kualitas produk ekonomi kreatif berbasis budaya, teknologi, kreativitas, dan inovasi masyarakat
						2	Meningkatkan promosi produk ekraf melalui pemanfaatan teknologi dan sistem informasi
				5	Meningkatkan kerjasama dan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	1	Memperkuat kemitraan kemitraan Hexahelix Ekraf (akademisi, bisnis, pemerintah, komunitas, media dan permodalan) dalam pengembangan ekonomi kreatif
						2	Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif

Misi 2 : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berkualitas dan Berbudaya									
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN			
(1)		(2)		(3)		(4)			
2	Meningkatkan Kualitas SDM Masyarakat	2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1	Meningkatkan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	1	Peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan		
						2	Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran		
						3	Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan dan antar wilayah		
						4	Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun		
						5	Adaptasi Pendidikan Pasca Pandemi dan kebijakan merdeka belajar		
						2	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	1	Memprioritaskan pemenuhan SPM bidang pendidikan
								2	Memberikan biaya siswa kepada masyarakat miskin berupa Kartu Pariaman Pintar
								3	Peningkatan Daya Saing Pendidikan
						2	Penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas dan merata		
		3	Meningkatkan mutu sarana dan prasarana pendidikan						
		4	Pembinaan keluarga dalam mewujudkan pendidikan karakter Anak Usia Dini						
		3	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	Peningkatan kualitas dan ketersediaan, sarana prasarana pelayanan kesehatan yang merata	1	Meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan masyarakat		
						2	Mengupayakan jaminan kesehatan masyarakat melalui jaminan kesehatan 100 % dan kerjasama para pihak		
						3	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar		

TUJUAN (1)		SASARAN (2)		STRATEGI (3)		ARAH KEBIJAKAN (4)	
				2	Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penanganan kesehatan keluarga, gizi masyarakat, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan secara bertahap dan berkesinambungan	1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan badan, kesehatan lingkungan, gizi, sanitasi yang baik, hygiene, dan pola asuh anak yang baik
						2	Meningkatkan peran dan upaya kesehatan berbasis masyarakat termasuk posyandu dan pelayanan terintegrasi lainnya dalam pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia
							Pemberdayaan dan peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
							Meningkatkan edukasi kesehatan reproduksi dan pengendalian penduduk bagi masyarakat
							Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengendalian dan pencegahan untuk pemutusan rantai penularan Covid-19
		3	Menurunnya prevalensi stunting	1	Konvergensi penanganan stunting	1	Meningkatkan konvergensi terhadap penurunan stunting di Setiap kecamatan
						2	Meningkatkan kualitas Gizi ibu hamil dan menyusui
						3	kesehatan berbasis masyarakat termasuk posyandu dan pelayanan terintegrasi lainnya dalam pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita anak
				2	Peningkatan Komitmen Pemerintah Daerah	1	Penyusunan Kebijakan tentang percepatan pencegahan stunting ditingkat Kota
						2	Pelaksanaan Rembuk stunting pada tahapan perencanaan Program/Kegiatan
						3	Mobilisasi sumber daya dan mendorong partisipasi secara aktif dalam percepatan pencegahan stunting di kalangan masyarakat serta dunia usaha, universitas/akademisi, organisasi profesi, media, dan organisasi/kelompok masyarakat lainnya

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
(1)		(2)		(3)		(4)	
		4	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	1	Meningkatkan kualitas belanja masyarakat baik pada sektor pangan dan non pangan melalui stabilisasi perekonomian Kota Pariaman dan penguatan sektor strategis Kota Pariaman	1	Peningkatan daya saing ekonomi serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif berbasis potensi lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
						2	Mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru
				2	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Masyarakat	1	Peningkatan pendapatan masyarakat melalui peningkatan usaha (produksi) masyarakat
						2	Memberikan fasilitasi terhadap pemberdayaan dan pengembangan UMKM
						3	Pembentukan Pusat layanan usaha terhadap pengembangan usaha masyarakat
Misi 3 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Prima Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Smart City							
1	Meningkatnya Birokrasi Yang Baik dan Bersih	1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	1	Membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih dan akuntabel	1	Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja dan perluasan pemahaman Reformasi Birokrasi kepada Aparatur
						2	Penguatan Pengawasan
						3	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan secara konsisten dan berkelanjutan
						4	Deregulasi Kebijakan
						5	Penguatan Akuntabilitas dan Efisiensi Anggaran
		2	Meningkatnya tata kelola pemerintah yang kapabel		Meningkatkan kapabilitas baik secara kelembagaan maupun secara Individu ASN	1	Penguatan implemenasi manajemen berbasis merit sistem
						2	Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur
						3	Perubahan Mindset dan Budaya Kinerja di Lingkungan Organisasi
						4	Penyederhanaan Organisasi

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
(1)		(2)		(3)		(4)	
		3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	Meningkatkan akses masyarakat dalam layanan publik melalui penciptaan inovasi layanan di segala bidang	2	Meningkatkan pengembangan inovasi di semua OPD dalam memberikan layanan publik yang berkualitas
						2	Peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik
				2	Meningkatkan sistem pelayanan publik	1	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang handal dan prima
						2	Meningkatkan Pengembangan Kualitas Tata Kelola Pemerintah, Reformasi Birokrasi Publik
Misi 4 : Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana							
1	Terwujudnya Kota Pariaman Layak Huni	1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	1	Meningkatkan penyediaan dan kualitas infrastruktur perkotaan yang merata dan ramah lingkungan	1	Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang merata ke seluruh wilayah
		2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	1	Meningkatkan pengelolaan lingkungan	1	Memperluas jangkauan, kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan air bersih dan sanitasi masyarakat
						2	Pengendalian pencemaran dan peningkatan kualitas lingkungan
						3	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
				2	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	1	Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
						2	Peningkatan penanganan sampah
						3	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan mengembangkan "Bank Sampah"
		3	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni	1	Penyediaan, penataan dan peningkatan sarana dan prasarana permukiman secara berkelanjutan	1	Fasilitasi Penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah
						2	Peningkatan kualitas jalan dan drainase lingkungan
						3	Melakukan Penanganan kawasan kumuh perkotaan secara terpadu

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
(1)		(2)		(3)		(4)	
		3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	Meningkatkan akses masyarakat dalam layanan publik melalui penciptaan inovasi layanan di segala bidang	2	Meningkatkan pengembangan inovasi di semua OPD dalam memberikan layanan publik yang berkualitas
						2	Peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik
				2	Meningkatkan sistem pelayanan publik	1	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang handal dan prima
						2	Meningkatkan Pengembangan Kualitas Tata Kelola Pemerintah, Reformasi Birokrasi Publik
Misi 4 : Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana							
1	Terwujudnya Kota Pariaman Layak Huni	1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	1	Meningkatkan penyediaan dan kualitas infrastruktur perkotaan yang merata dan ramah lingkungan	1	Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang merata ke seluruh wilayah
		2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	1	Meningkatkan pengelolaan lingkungan	1	Memperluas jangkauan, kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan air bersih dan sanitasi masyarakat
						2	Pengendalian pencemaran dan peningkatan kualitas lingkungan
						3	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
				2	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	1	Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
						2	Peningkatan penanganan sampah
						3	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan mengembangkan "Bank Sampah"
		3	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni	1	Penyediaan, penataan dan peningkatan sarana dan prasarana permukiman secara berkelanjutan	1	Fasilitasi Penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah
						2	Peningkatan kualitas jalan dan drainase lingkungan
						3	Melakukan Penanganan kawasan kumuh perkotaan secara terpadu

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
(1)		(2)		(3)		(4)	
				2	Meningkatkan kualitas lingkungan Lingkungan Hidup sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta berbasis masyarakat.	1	Pengendalian pencemaran dan peningkatan kualitas lingkungan
						2	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
		4	Meningkatnya MitigasiBencana	1	Meningkatkan system ketahanan daerah	1	Peningkatan Kapasitas masyarakat dan infrastruktur dalam menghadapi bencana
						2	Meningkatkan kesiapsiagaan daerahdalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana
						3	Perlibatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana
						4	Pengembangan Sistem Informasi kebencanaan
				2	Meningkatkan pengelolaan kebencanaan	1	Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana
						2	Penyiapan infrastruktur kota berbasis mitigasi bencana
						3	Meningkatkan ketahanan dan kekuatan bangunan melalui penyediaan desain standar bangunan
						4	Penyediaan data dan informasi kebencanaan yang komprehensif
						5	Menyediakan jalur evakuasi sebagai akses evakuasi ketika terjadi bencanagempa yang berpotensi tsunami
		5	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat	1	Peningkatan upaya pengamanan dan penertiban	1	Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat
						2	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penegakan perda
				2	Meningkatkan pelayanan dan pengawasan terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat	1	Meningkatkan penegakan perda tentang ketertiban umum
						2	Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat

Misi 5 : Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif Yang Berbasis Lokal							
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
(1)		(2)		(3)		(4)	
1	Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi Masyarakat	1	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	1	Meningkatkan Produktivitas Sektor Perdagangan	1	Mendorong peningkatan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian melalui perluasan pangsa pasar dan iklim perdagangan yang kondusif;
						2	Mendorong peningkatan kontribusi sektor industri melalui peningkatan produktivitas dan daya saing produk industri berbasis sumberdaya local;
						3	Mendorong peningkatan skala usaha Usaha Mikro melalui penguatan modal.
						4	Meningkatkan daya saing produk ekonomi kreatif
		2	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	1	Meningkatkan Produktivitas Sektor Pertanian	1	Mendorong peningkatan kontribusi sektor pertanian melalui peningkatan produksi hasil pertanian strategis;
						2	Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan sektor Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, peternakan dan perikanan
		3	Meningkatnya Investasi	1	Meningkatkan kualitas iklim usaha dan investasi yang kondusif	1	Mendorong kemandirian keuangan daerah melalui peningkatan kemudahan dan kenyamanan berinvestasi
						2	Memberikan kemudahan bagi calon investor yang akan berinvestasi
				2	Peningkatan layanan investasi dan penanaman modal	1	Pemberian Kemudahan dan Fasilitas Investasi serta Pengembangan Layanan Investasi Berbasis Teknologi Informasi
						2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
		3	Pengembangan Layanan Investasi Yang memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses perizinan bagi investor dan pengusaha				
		4	Pembentukan produk hukum daerah / regulasi daerah untuk kemudahan perizinan dan kemudahan berinvestasi				

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
(1)		(2)		(3)		(4)	
		4	Menurunnya Angka Kemiskinan	1	Mempercepat Penanggulangan kemiskinan secara terpadu	1	Penyiapan keberlanjutan sinergitas program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan peran serta masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha
						2	Peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin agar mandiri secara ekonomi
						3	Peningkatan Cakupan Layanan Penanganan PMKS
						4	Peningkatan layanan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat Kota Paiaman sosial
		5	Menurunnya Angka Pengangguran	1	Perluasan kesempatan kerja dan Peluang Usaha	1	Meningkatkan peluang dan kesempatan kerja
						2	Meningkatkan Cakupan Serapan Tenaga Kerja Pada Sektor-Sektor Lain secara merata
						3	Meningkatkan Kapasitas dan Keterampilan Angkatan Kerja yang berbasis digital dan teknologi untuk memenuhi Kebutuhan Pasar
						4	Peningkatan jaringan tenaga kerja
						5	Menumbuhkembangkan wirausaha baru
		6	Meningkatnya Kemandirian Desa	1	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	1	Meningkatkan kelembagaan kemasyarakatan
						2	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
						3	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat berbasis Desa/Kelurahan
				2	Penguatan Ketahanan Ekonomi, Ketahanan Sosial dan Ketahanan Ekologi Desa	1	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Yang Difokuskan Kepada Pembentukan Dan Pengembangan Produk Unggulan Desa Dan/Atau Produk Unggulan Kawasan Perdesaan
						2	Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Ketahanan Sosial, Ketahanan Ekologi Desa

Adapun Program Unggulan dari Pemeintah Daerah adalah:

1.	Lanjutkan Program Kesehatan Gratis
2.	Lanjutkan Program Pendidikan Gratis
3.	Kartu Pariaman Pintar
4.	Lanjutkan Bis Sekolah Gratis
5.	Magrib Mengaji dan Subuh Mubarakah
6	Program <i>satu keluarga satu sarjana</i>
7	Lanjutkan Pembangunan Mesjid Terapung Pariaman
8	Lanjutkan Pembangunan GOR
9	Pembangunan Youth Centre
10	Pembangunan Pusat Pendidikan Alquran (Read Alquran Centre)
11	Pengembangan Pendidikan agama non formal MDA (tingkat SD), MDW (TingkatSLTP), MDU (Tingkat SLTA)
12	Program Pariaman Sejahtera
13	Pengembangan kawasan Wisata Terpadu dengan UMKM
14	Pengembangan jalan sisi timur pariaman.
15	Kesejahteraan Guru honor PAUD, TK, SD, SMP
16	Pengembangan <i>water front city</i>
17	Kesempatan Kerja Keluarga Miskin
18	Revitalisasi PKK
19	Revitalisasi Pasar Yang Ada Di Kota Pariaman

Berdasarkan tujuan di atas, sasaran –sasaran strategis yang akan dicapai Pemerintah Kota Pariaman selama periode RPJMD disertai indikator kinerja, dimana indikator kinerja ini sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2018-2023. Berdasarkan Perubahan RPJMD 2018-2023 adalah sebagai berikut :

MISI I :

Mewujudkan Wisata Kota Pesisir Yang Maju, Religius, Tertib dan Berbudaya terbaik Sumatra

TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR
(1)		(2)	(3)
1	Meningkatkan Sektor Pariwisata Dalam Perekonomian	Meningkatnya Produktivitas Sektor Pariwisata	% Pertumbuhan Spending Of Money

Misi 2 :

Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas

TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR	
(1)		(2)	(3)	
1	Meningkatkan Kualitas SDM Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1	Angka Harapan Lama Sekolah
			2	Angka Rata-rata Lama Sekolah
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	Angka Usia Harapan Hidup (UHH)
		Menurunnya Prevalensi Stunting	2	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita
		Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	1	Pendapatan Per Kapita (PDRB)

Misi 3 :

Mewujudkan Pemerintahan Yang Prima Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Smart City

TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR	
(1)		(2)	(3)	
1	Meningkatkan Birokrasi yang baik dan bersih	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	1	Nilai SAKIP
			2	Opini BPK terhadap LKPD
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang Kapatabel	1	Indeks SPBE
			2	Indeks Profesional ASN
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	Indeks Pelayanan Publik

Misi 4:

Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana

TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR	
(1)		(2)	(3)	
1	Terwujudnya Kota Pariaman Layak Huni	Meningkatnya kualitas Insfrastruktur		Indeks Insfrastruktur Daerah
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan		Indeks Kualitas Lingkungan
		Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	1	Persentase Pengurangan Luasan Permukiman Kumuh
			2	Persentase Perumahan Permukiman Layak Huni
		Meningkatnya Mitigasi Bencana		Indeks Resiko Bencana
Meningkatnya Ketentraman , Ketertiban dan Keamanan Masyarakat		Indeks Keamanan dan Ketertiban		

Misi 5:
Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif
Yang Berbasis Lokal

TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR	
(1)		(2)	(3)	
Meningkatnya pemerataan pertumbuhan Masyarakat dan ekonomi		Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	1	% Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
		Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	1	% Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB
		Meningkatnya Investasi	1	% Pertumbuhan Investasi
		Menurunnya Angka Kemiskinan	1	Angka Kemiskinan (%)
		Menurunnya Angka Pengangguran	1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
		Meningkatnya Kemandirian Desa	1	Indeks Desa Membangun

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan sebagai ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Adapun Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pariaman adalah sebagai berikut:

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SOPD PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Produktivitas Sektor Pariwisata	Persentase Pertumbuhan spending of money	Dinas Pariwisata
2.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Angka Rata-rata Lama Sekolah	
3.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Dinas Kesehatan
4.	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	
5.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Pendapatan / PDRB Per Kapita	Dinas Perindagkop Usaha Menengah, Dinas Pertanian , Pangan dan Perikanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
6.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	Nilai AKIP	Bappeda Inspektorat Setda
		Opini BPK terhadap LKPD	BPKPD Inspektorat
7.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang Kapabel	Indeks SPBE	Dinas Kominfo
		Indeks Profesional ASN	BKPSDM
8.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Setda (Bagian Organisasi)
9.	Meningkatnya kualitas Infrastruktur	Indeks Infrastruktur Daerah	Dinas PU, Penataan Ruang dan Pertanahan

10	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan	Dinas Perkim, Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup
11.	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	Persentase Pengurangan Luasan Permukiman Kumuh	
		Persentase Perumahan Permukiman Layak Huni	
12.	Meningkatnya Mitigasi Bencana	Indeks Resiko Bencana	BPBD
13.	Meningkatnya Ketentraman , Ketertiban dan Keamanan Masyarakat	Indeks Keamanan dan Ketertiban	Dinas Pol.PP
14.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	% Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Dinas Perindagkop Usaha Menengah
15.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	% Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	Dinas Pertanian , Pangan dan Perikanan
16.	Meningkatnya Investasi	% Pertumbuhan Investasi	DPMPTSP
17.	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan (%)	BAPPEDA, Dinas Sosial
18.	Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	DPMPTSP
19	Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	DPMDDES

2.3.Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan amanat dari Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber dana yang dikelolanya.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja adalah:

1. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;

2. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
3. sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja penerima amanah;
4. sebagai tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Berdasarkan hasil Evaluasi SAKIP Kota Pariaman dari Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara Republik Indonesia, masih banyaknya kelemahan dari RPJMD dan Renstra OPD, diantaranya:

- masih adanya Indikator yang belum dapat diukur, sehingga kesulitan dalam melakukan pengukuran capaian kerjanya;
- adanya program dan kegiatan yang belum sinkron dalam pencapaian sasaran dan target kinerja yang ditetapkan.

untuk itu Pemerintah Kota Pariaman telah berupaya melakukan perbaikan-perbaikan terhadap RPJMD dan Renstra OPD.

Disamping itu dengan masih adanya Wabah Covid-19, maka untuk penanganan Covid-19 Pemerintah Kota Pariaman melakukan Refocusing dan realokasi anggaran dengan melakukan pembatalan kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak relevan, yang berpengaruh terhadap capaian dari target yang ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, perlu dilakukan Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2021, sebagai berikut :

NO	SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET		KETERANGAN
	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	
	PERUBAHAN		PERUBAHAN		PERUBAHAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
MISI I : Mewujudkan Wisata Kota Pesisir Yang Maju, Religius, Tertib, dan Berbudaya Terbaik di Sumatera							
1	Terwujudnya Daya Saing Wisata	Meningkatnya Produktivitas Sektor Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Spending of Money	Persentase Pertumbuhan Spending of Money	3%	3%	Tetap
	-	-	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata	-	5%	-	Indikator ini dijadikan Indikator OPD
MISI II : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berkualitas dan Berbudaya							
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah	Angka Harapan Lama Sekolah	14,60 tahun	14,55 tahun	Perubahan Target
			Angka Rata-rata Lama Sekolah	Angka Rata-rata Lama Sekolah	10,90 tahun	10,84 tahun	
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Angka Usia Harapan Hidup	70,50 tahun	70,53 tahun	Perubahan Target
			Indeks Keluarga Sehat	-	0,175	-	IKS dijadikan Indikator OPD
3	-	Menurunnya Prevelensi Stunting	-	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	-	10,02%	Sasaran Strategis dan Indikator Baru
4	Meningkatnya Pendapatan Perkapita	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Indeks Daya Beli Masyarakat	Pendapatan/ PDRB Perkapita	13,0 juta	13,15 juta	Perubahan Target
5	Menurunnya Angka Kemiskinan dan Pengangguran	-	Angka Kemiskinan	-	4,2	-	Sasaran Strategis dan Indikator ini dipindahkan ke Misi V
			Angka Pengangguran	-	5,00	-	
6	Meningkatnya Kemandirian Desa	-	Indeks Desa Membangun	-	0,7400	-	
MISI II : Mewujudkan Pemerintahan yang Prima untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik berbasis Smart City							
1	Kapasitas Tata kelola Pemerintahan Meningkat	Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai Sakip	B	B	Perubahan Sasaran Strategis
			Indeks Kepuasan Masyarakat	-	84,50	-	Tidak lagi menjadi Indikator Daerah

NO	SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET		KETERANGAN
	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	
	PERUBAHAN		PERUBAHAN		PERUBAHAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Opini BPK terhadap LKPD	Opini BPK	WTP	WTP	Tetap
2		Meningkatnya TataKelola Pemerintahan yang Kapabel	Indeks SPBE	Indeks SPBE	3	3,1	Perubahan Target
			-	Indeks Profesional ASN	-	55	Indikator Kinerja Baru
			Indeks Kepuasan Masyarakat	-	84,50	-	Tidak lagi menjadi Indikator Daerah
3	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	-	Indeks Pelayanan Publik	-	84,50	Sasaran Strategis dan Indikator Baru
Misi IV : Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana							
1	Insfrastruktur Wilayah Meningkat	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Indeks Insfrastruktur Daerah	Indeks Insfrastruktur Daerah	70,5	64.50	Perubahan Target
2	Meningkatkan Kualitas Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan	61,32	59,10	Perubahan Target
3	-	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	-	Persentase Pengurangan Luasan Permukiman Kumuh	-	21,81%	Sasaran Strategis dan Indikator Baru
			-	Persentase Perumahan Permukiman Layak Huni	-	80,24%	Sasaran Strategis dan Indikator Baru
4	Meningkatnya Mitigasi Bencana	Meningkatnya Mitigasi Bencana	Indeks Resiko Bencana	Indeks Resiko Bencana	171 (Tinggi)	171 (Tinggi)	Target Tetap
5	Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial	Meningkatnya Ketentraman, Ketertibandan Keamanan Masyarakat	Indeks Keamanan dan Ketertiban	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	66,7	66,7	Target Tetap

NO	SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET		KETERANGAN
	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	
	PERUBAHAN		PERUBAHAN		PERUBAHAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
MISI V : Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif yang Berbasis Lokal							
1	Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun	-	Indeks Gini	-	0,280	-	Tidak Menjadi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Daerah
2	Meningkatnya Nilai Investasi	Meningkatnya Investasi	Laju Pertumbuhan Investasi	% Pertumbuhan Investasi	4%	1,7	Peprubahan Target
3	Meningkatnya Peran Industri dan Perdagangan Serta Jasa Dalam Stabilitas Perekonomian	-	Persentase Laju Pertumbuhan Sektor Industri	-	0,2	-	Tidak Menjadi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Daerah
		-	Persentase Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan dan Jasa	-	2%	-	
4	-	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	-	% Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	-	22,5	Perubahan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Daerah
5	-	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	-	% Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	-	18,45	Perubahan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Daerah
6	-	Menurunnya Angka Kemiskinan	-	Angka Kemiskinan	-	3,90	Perubahan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Daerah
7	-	Menurunnya Angka Pengangguran	-	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	-	5,43	Perubahan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Daerah
8	-	Meningkatnya Kemandirian Desa	-	Indeks Desa Membangun	-	0,7400	Perubahan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Daerah

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN		BERTAMBAH/ BERKURANG	KET.
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Pengembangan Kebudayaan	303.000.000,00	143.000.000,00	-160.000.000,00	
2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	496.000.000,00	392.395.000,00	-103.605.000,00	
3	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4	Program Pengelolaan Permeseuman	25.000.000,00	24.680.000,00	-320.000,00	
5	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.800.369.300,00	2.061.732.484,00	261.363.184,00	
6	Program Pemasaran Pariwisata	1.030.613.240,00	442.089.910,00	-588.523.330,00	
7	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	60.000.000,00	59.500.000,00	-500.000,00	
8	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	285.900.000,00	842.074.000,00	556.174.000,00	
9	Program Pengelolaan Pendidikan	25.586.351.522,00	24.685.757.621,00	-900.593.901,00	
10	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	617.000.000,00	682.800.000,00	65.800.000,00	
11	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	249.900.000,00	376.285.000,00	126.385.000,00	
12	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	106.525.000,00	106.525.000,00	0,00	
13	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	21.531.995.741,00	29.262.253.655,00	7.730.257.914,00	
14	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	204.798.012,00	459.504.170,00	254.706.158,00	
15	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	679.230.000,00	540.035.500,00	-139.194.500,00	
16	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	503.319.500,00	451.099.000,00	-52.220.500,00	
17	Program Perlindungan Perempuan	136.877.421,00	110.877.421,00	-26.000.000,00	
18	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	112.275.138,00	79.974.319,00	-32.300.819,00	

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN		BERTAMBAH/ BERKURANG	KET.
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19	Program Pemenuhan Hak Anak	61.830.000,00	0,00	-61.830.000,00	
20	Program Perlindungan Khusus Anak	76.357.000,00	54.415.500,00	-21.941.500,00	
21	Program Pengendalian Penduduk	1.953.153.700,00	24.960.800,00	-1.928.192.900,00	
22	Program Pembinaan Keluarga Berencana	944.699.500,00	2.659.588.500,00	1.714.889.000,00	
23	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	215.999.819,00	0,00	-215.999.819,00	
24	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	188.348.000,00	155.876.000,00	-32.472.000,00	
25	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.058.962.200,00	573.851.200,00	-485.111.000,00	
26	Program Penanganan Kerawanan Pangan	111.955.000,00	10.350.000,00	-101.605.000,00	
27	Program Pengelolaan Ikan Tangkap	2.412.316.500,00	1.604.072.500,00	-808.244.000,00	
28	Program Pengelolaan Perikanan Budi Daya	912.136.200,00	245.278.200,00	-666.858.000,00	
29	Program Optimalisasi Pengelolaan Pemasaran produksi Perikanan	205.379.500,00	2.168.240,00	-203.211.260,00	
30	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.298.237.698,00	424.003.338,00	-874.234.360,00	
31	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2.432.370.000,00	1.915.117.771,00	-517.252.229,00	
32	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	208.890.000,00	57.660.000,00	-151.230.000,00	
33	Program Penyuluhan Pertanian	270.085.000,00	116.539.000,00	-153.546.000,00	
34	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	394.543.525,00	118.623.350,00	-275.920.175,00	
35	Program Perizinan Usaha Pertanian	100.800.000,00	0,00	-100.800.000,00	HILANG
36	Program Pelatihan Berdasarkan Unit Kopetensi	80.448.000,00	3.600.000,00	-76.848.000,00	
37	Program Penempatan Tenaga Kerja	126.307.000,00	2.280.000,00	-124.027.000,00	
38	Program Hubungan Industrial	8.375.000,00	0,00	-8.375.000,00	

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN		BERTAMBAH/ BERKURANG	KET.
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
39	Program Pengembangn Iklim Penanaman Modal	45.253.600,00	0,00	-45.253.600,00	
40	Program Promosi Penanaman Modal	34.635.000,00	2.460.000,00	-32.175.000,00	
41	Program Pelayanan Penanaman Modal	76.984.000,00	17.993.900,00	-58.990.100,00	
42	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	336.202.000,00	336.202.000,00	0,00	
43	Program Pemberdayaan Sosial	522.080.000,00	494.093.000,00	-27.987.000,00	
44	Program Rehabilitasi Sosial	182.555.580,00	115.341.580,00	-67.214.000,00	
45	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	208.537.000,00	190.777.000,00	-17.760.000,00	
46	Program Penanganan Bencana	216.135.600,00	200.185.600,00	-15.950.000,00	
47	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	28.139.850,00	28.139.850,00	0,00	
48	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	0,00	44.474.000,00	44.474.000,00	BARU
49	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	0,00	26.880.000,00	26.880.000,00	BARU
50	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	95.901.000,00	42.242.000,00	-53.659.000,00	
51	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	459.181.000,00	459.181.000,00	0,00	
52	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	39.403.000,00	7.500.000,00	-31.903.000,00	
53	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	169.151.845,00	91.181.000,00	-77.970.845,00	
54	Program Pengembangan UMKM	220.180.845,00	37.261.445,00	-182.919.400,00	
55	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2.541.757.250,00	1.245.731.800,00	-1.296.025.450,00	

56	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	56.378.400,00	42.609.400,00	-13.769.000,00	
57	Program Pengembangan Ekspor	34.679.957,00	11.000.707,00	-23.679.250,00	
58	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	905.593.536,00	767.990.036,00	-137.603.500,00	
59	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1.093.515.000,00	1.273.065.000,00	179.550.000,00	
60	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	150.163.700,00	0,00	-150.163.700,00	
61	Program Penataan Desa	57.264.000,00	19.980.000,00	-37.284.000,00	
62	Program Administrasi Pemerintah Desa	1.583.100.500,00	557.776.500,00	-1.025.324.000,00	
63	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	3.920.286.056,00	3.263.092.364,00	-657.193.692,00	
64	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	288.790.408.761,00	332.464.581.324,89	43.674.172.563,89	
65	Program Pembinaan Perpustakaan	205.114.236,00	137.977.660,00	-67.136.576,00	
66	Program Pengelolaan Arsip	48.124.324,00	12.773.200,00	-35.351.124,00	
67	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	98.546.350,00	18.340.000,00	-80.206.350,00	
68	Program Perekonomian dan Pembangunan	470.418.902,00	288.162.100,00	-182.256.802,00	
69	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	6.225.828.113,00	5.697.948.961,00	-527.879.152,00	
70	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.559.286.548,00	878.075.048,00	-681.211.500,00	
71	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan	1.504.920.569,00	764.379.250,00	-740.541.319,00	
72	Program Informasi dan Komunikasi Publik	2.888.439.500,00	2.665.602.100,00	-222.837.400,00	
73	Program Aplikasi Informatika	2.754.637.500,00	2.497.522.200,00	-257.115.300,00	

74	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	131.000.000,00	35.996.000,00	-95.004.000,00	
75	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	66.550.000,00	65.530.000,00	-1.020.000,00	
76	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	105.040.796.378,00	102.392.305.246,00	-2.648.491.132,00	
77	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.070.496.012,00	1.394.721.012,00	324.225.000,00	
78	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.031.078.652,00	2.238.769.574,00	207.690.922,00	
79	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembancunan Daerah	1.366.154.335,00	1.371.682.585,00	5.528.250,00	
80	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.673.335.118,00	1.716.375.925,00	-956.959.193,00	
81	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	723.393.250,00	67.356.000,00	-656.037.250,00	
82	Program Kepegawaian Daerah	3.751.037.400,00	3.804.607.400,00	53.570.000,00	
83	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	11.950.680.574,00	12.638.915.094,00	688.234.520,00	
84	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	440.771.484,00	252.926.563,00	-187.844.921,00	
85	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2.182.978.549,00	2.338.449.429,00	155.470.880,00	
86	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	995.408.179,00	808.446.367,00	-186.961.812,00	
87	Program Penyelenggaraan Pemerintahan	49.435.750,00	24.173.500,00	-25.262.250,00	
88	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	212.307.435,00	85.740.725,00	-126.566.710,00	
89	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	16.222.597.758,00	11.065.236.059,00	-5.157.361.699,00	
90	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	2.690.549.324,00	2.493.960.056,00	-196.589.268,00	

91	Program Penataan Bangunan Gedung	10.885.236.204,00	7.826.340.596,00	-3.058.895.608,00	
92	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	299.859.000,00	706.454.595,00	406.595.595,00	
93	Program Penyelenggaraan Jalan	36.429.284.964,00	21.480.291.929,00	-14.948.993.035,00	
94	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	432.421.060,00	68.596.912,00	-363.824.148,00	
95	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	486.530.000,00	397.952.000,00	-88.578.000,00	
96	Program Pengelolaan Izin Lokasi	14.999.843,00	6.299.843,00	-8.700.000,00	
97	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	61.594.760,00	61.594.760,00	0,00	
98	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	14.999.945,00	7.114.945,00	-7.885.000,00	
99	Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	39.300.000,00	39.300.000,00	0,00	
100	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	256.848.000,00	195.988.500,00	-60.859.500,00	
101	Program Penatagunaan Tanah	69.900.000,00	3.100.000,00	-66.800.000,00	
102	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	4.234.840.587,00	3.363.062.787,00	-871.777.800,00	
103	Program Pengelolaan Pelayaran	459.751.860,00	406.629.000,00	-53.122.860,00	
104	Program Pengelolaan Perkeretaapian	350.000.000,00	0,00	-350.000.000,00	
105	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sitem Air Limbah	6.877.908.320,00	3.615.191.320,00	-3.262.717.000,00	
106	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sitem Drainase	1.469.266.620,00	254.421.520,00	-1.214.845.100,00	
107	Program Pengembangan Permukiman	2.923.604.354,00	1.029.779.108,00	-1.893.825.246,00	
108	Program Pengembangan Perumahan	157.524.160,00	105.824.160,00	-51.700.000,00	
109	Program Kaw asan Pemukiman	1.208.132.089,00	1.217.802.089,00	9.670.000,00	
110	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	1.231.320.779,00	625.668.825,00	-605.651.954,00	
111	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.522.600.561,00	1.229.632.300,00	-292.968.261,00	

112	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	1.381.962.079,00	1.260.691.992,00	-121.270.087,00	
113	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	45.855.000,00	58.905.000,00	13.050.000,00	
114	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	47.558.000,00	36.461.330,00	-11.096.670,00	
115	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	236.368.531,00	88.678.531,00	-147.690.000,00	
116	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	8.040.000,00	7.840.000,00	-200.000,00	
117	Program Pengelolaan Persampahan	5.619.828.334,00	2.738.815.786,00	#####	
118	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	6.108.656.532,00	6.450.885.052,00	342.228.520,00	
119	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	0,00	620.053.000,00	620.053.000,00	BARU
120	Program Penanggulangan Bencana	2.593.090.485,00	1.895.334.085,00	-697.756.400,00	
121	Program Peningkatan Ketenraman dan Ketertiban Umum	4.553.094.460,00	4.994.302.832,00	441.208.372,00	
122	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.502.744.670,00	1.820.293.976,00	317.549.306,00	
123	Program Pendaftaran Penduduk	988.981.436,00	276.902.476,00	-712.078.960,00	
124	Program Pencatatan Sipil	173.684.836,00	18.000.836,00	-155.684.000,00	
125	Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan	395.538.268,00	207.548.244,00	-187.990.024,00	
126	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	19.435.844,00	18.475.844,00	-960.000,00	
127	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	133.386.207,00	79.148.207,00	-54.238.000,00	
128	Program Peningkatan Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	126.263.000,00	79.368.000,00	-46.895.000,00	
129	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	166.512.720,00	90.102.720,00	-76.410.000,00	
130	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	547.005.500,00	454.845.500,00	-92.160.000,00	
Jumlah		630.085.651.244,00	6.301.223.377.639,89	36.726.395,89	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Pemerintah Kota Pariaman selaku pengemban amanah masyarakat Kota Pariaman, melaksanakan kewajiban mempertanggung jawabkan kinerja yang tepat, jelas dan terukur sebagai media untuk mengetahui keberhasilan/kegagalan kinerja Pemerintah Kota Pariaman sesuai dengan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2019.

Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pariaman yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan disajikan dalam perbandingan antara target tiap indikator kinerja dengan realisasi kinerja tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

3.2. Metode Pengukuran Pencapaian Target Kinerja

Pengukuran capaian kinerja sasaran, dilakukan dengan menggunakan metode membandingkan antara rencana kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi ditambah dengan perbandingan kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi

Pemerintah Kota Pariaman serta menjelaskan atas keberhasilan dan kegagalannya.

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam formulir Pengukuran Kinerja (Form. PK)

Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indek, rata-rata, angka dan jumlah. Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik. Penghitungan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian (Formulir Pengukuran Kinerja), perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Persentase Pencapaian} \times 100\%}{\text{Rencana}}$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, atau semakin rendah realisasi semakin tinggi capaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}) \times 100\%}{\text{Rencana}}$$

Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dan pencapaian sasaran strategi sebab-sebab tercapai dan tidaknya kinerja yang diharapkan untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran serta indikator sasaran

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis ditentukan oleh pencapaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk analisis atau penjelasan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis, ditetapkan kategori penilaian capaian indikator kinerja sebagaimana tercantum pada table dibawah ini :

No	Klasifikasi Penilaian	Prediket
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Gagal

A. Capaian kinerja Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Misi I : Mewujudkan Wisata Kota Pesisir Yang Maju, Religius, Tertib, dan Berbudaya					
Sasaran 1					
Meningkatnya Produktivitas Sektor Pariwisata					
INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN
Persentase Pertumbuhan spending of money	3%		1,17%		39%
Misi II: Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berkualitas dan Berbudaya					
Sasaran 1					
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat					
INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN
Angka Harapan Lama Sekolah	14,55	tahun	14,55	tahun	100,0%
Angka Rata-rata Lama Sekolah	10,84	tahun	10,67	tahun	98%
Sasaran 2					
Meningkatnya Derajat Kesehatan masyarakat					
INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN
Angka Usia Harapan Hidup	70,53	tahun	70,38	tahun	99,79%
Sasaran 3					
Menurunnya Prevalensi Stunting					
INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN
Prevalensi Stunting	10,02		10,30		97%
Sasaran 4					
Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat					
INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN
Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan	13,15	juta	12,818	juta	97%

Misi III : Mewujudkan Pemerintahan yang Prima untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik berbasis Smart City			
Sasaran 1			
Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel			
INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Nilai Akuntabilitas Kinerja	61,5	60,05	98%
Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	100%
Sasaran 2			
Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel			
Indeks SPBE	3,1	2,42	78%
Indeks Profesional ASN	55	45,78	83%
Sasaran 3			
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			
INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Indeks Pelayanan Publik	3,51	3,91	111%
Misi IV: Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana			
Sasaran 1			
Meningkatnya Kualitas Insfrastruktur			
INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Indeks Insfrastruktur Daerah	64,50	65,71	102%
Sasaran 2			
Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Prmukiman Layak Huni			
INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Pengurangan Luas Permukiman Kumuh	21,81	43,00	197%
Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni	80,24	77,21	96%
Sasaran 3			
Meningkatnya Kualitas Lingkungan			
INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	59,10	54,93	92,9%
Sasaran 4			
Meningkatnya Mitigasi Bencana			
INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Indeks Resiko Bencana	171	(Tinggi)	171,2 Tinggi
			100%
Sasaran 5			
Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat			
INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Indeks Ketentraman dan Ketertiban	66,7	63,49	95%

Misi V : Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif yang berbasis Lokal			
Sasaran 1			
Meningkatnya Investasi			
% Pertumbuhan Investasi	1,7%	18,08%	1064%
Sasaran 2			
Meningkatnya Kontribusi Sektor perdagangan Terhadap PDRB			
% Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	22,5%	14,90%	66%
Sasaran 3			
Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB			
% Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	18,45%	17,93%	97%
Sasaran 4			
Menurunnya Angka Kemiskinan			
INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Angka Kemiskinan	3,90	4,38	112%
Sasaran 5			
Menurunnya Angka Pengangguran			
INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,43	6,09	112%
Sasaran 6			
Meningkatnya Kemandirian Desa			
INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Indeks desa Membangun	0,7400	0,7485	101,15%

B. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2021

MISI I. Mewujudkan Wisata Kota Pesisir Yang Maju, Religius, Tertib, dan Berbudaya terbaik di Sumatera

Sasaran 1 Meningkatnya Produktivitas Sektor Pariwisata

No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian Tahun			
						2021	2020	2019	2018
1	Persentase Pertumbuhan spending of money	3%		1,17%		39%	-611%	749%	-
	<i>Rata-rata capaian</i>					39%	-305,5%	-	-

Beberapa sasaran strategis daerah sebagaimana dituangkan pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan RPJMD Kota Pariaman 2018-2023, mengalami perubahan yang disebabkan penyesuaian terhadap kerangka logis (*logical framework*) penyusunan perencanaan berbasis isu strategis daerah yang dibangun melalui skema pohon kinerja, sehingga terdapat penambahan sasaran strategis baru atau perubahan sasaran strategis maupun indikator sasaran yang relevan dalam mengukur pencapaian sasaran strategis. Sasaran 1 mengalami perubahan dari sasaran semula yaitu "Terwujudnya daya saing wisata" yang terdiri dari 2 (dua) Indikator diubah menjadi "Meningkatnya Produktivitas Sektor Pariwisata", dengan 1 (satu) indikator yaitu Persentase Pertumbuhan Spending of Money dengan target sebesar 3% pada tahun 2021, hanya dapat terealisasi sebesar 1,17% sehingga memperoleh capaian sebesar 39%, dan jika dibandingkan dengan tahun 2020, persentase pertumbuhan Spending of Money mengalami kenaikan yang cukup signifikan dimana di tahun 2020 dengan capaian minus 611% dari target 3,5%.

Terkait realisasi Spending of Money (Rata-rata pengeluaran wisatawan) pada tahun 2021 dapat dicapai sebesar Rp. 101.000,-/hari/wisatawan dari target sebesar Rp. 110.000,-/hari/wisatawan dan jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya (tahun 2020) terjadi penurunan sebesar minus 0,69 % atau Rp. 711,- dari realisasi rata-rata belanja wisatawan sebesar Rp. 101.711/hari/wisatawan. Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 125.000/hari/wisatawan, juga terjadi penurunan sebesar Rp. 24.000,- atau minus 19,2 %

Untuk meningkatkan rata-rata pengeluaran/belanja wisatawan, Pemerintah Kota Pariaman melakukan berbagai upaya dalam rangka peningkatan jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kota Pariaman. Beberapa strategi yang dilakukan pada tahun 2021, antara lain :

- a. Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- b. Optimalisasi Pemasaran Pariwisata;
- c. Calendar of Events 2021

Meskipun pada tahun 2021 secara umum di wilayah Sumatera Barat dalam kondisi dan situasi Pandemi Covid-19 dengan angka kasus yang relatif tinggi dan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam upaya pengendalian peningkatan kasus Covid 19, namun masyarakat/pengunjung yang berasal dari luar Kota Pariaman relatif banyak yang melakukan kunjungan wisata ke Kota Pariaman. Hal ini berdampak kepada peningkatan yang cukup signifikan terhadap Tingkat Kunjungan Wisatawan yaitu mencapai jumlah **255.551 orang**, dan jika dibandingkan dengan Tingkat Kunjungan Wisatawan tahun 2020 dengan jumlah **112.368 orang**, maka terjadi peningkatan sebesar 127 %.

Kenaikan persentase Tingkat Kunjungan Wisatawan tahun 2021 dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut :

1. Adanya Peningkatan Kualitas pada Destinasi Pariwisata Kota Pariaman, melalui perbaikan sarana prasarana dan fasilitas pendukung di destinasi wisata, seperti pada Destinasi Wisata Pantai Gandoriah, Pantai Kata dan Pulau Angso.
2. Adanya pengembangan Destinasi Pariwisata Baru, seperti Talao Pauh Water Front City, dan pengembangan Daya Tarik Wisata Desa sebagai Desa Wisata. Pengembangan Desa Wisata ini diawali dengan adanya momentum even wisata yaitu Lomba Video Kreatif Desa dengan tujuan menyajikan informasi sekaligus promosi potensi unggulan wisata di masing-masing desa, hingga pembangunan berbagai fasilitas pendukung Desa Wisata yang didanai melalui berbagai sumber pendanaan, APBN (Kementerian Desa), APBD maupun CSR. Salah satu prestasi yang berhasil diperoleh oleh Desa Wisata yaitu Desa Wisata

Apar ditunjuk sebagai salah satu dari 50 desa wisata di Indonesia terpilih dalam lomba Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021 dan berhasil meraih juara 3 (tiga) kategori desa digital. Sebagai informasi, ADWI 2021 adalah lomba yang digagas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

3. Pemerintah Kota Pariaman juga menggelar Pariaman Festival yang mengusung sebanyak 45 iven sepanjang tahun 2021. Pariaman Festival adalah agenda iven tahunan dengan berbagai bentuk iven, mulai dari iven seni, budaya, sport tourism, expo dan iven peduli lingkungan. Pariaman Festival diawali dengan *launching* pada awal tahun 2021 yang diselenggarakan di Kota Pekanbaru, Riau.



Calendar of Event "Pariaman Festival Tahun 2021"

Tabel 3.1
JUMLAH WISATAWAN YANG BERKUNJUNG KE KOTA PARIAMAN
DARI TAHUN 2017 -2021

No	WISATAWAN	TAHUN					LAJU PERT./ TAHUN
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Domestik	3.099.310	3.320.825	3.924.570	112.278	255.251	21.424
2	Mancanegara	690	1.735	258	90	-	5,55
	Total	3.100.000	3.322.560	3.924.828	112.368	255.251	21.430

Sumber : Hasil Olahan (2022)

Berdasarkan tabel 3.1 di atas terlihat perbandingan angka jumlah kunjungan wisatawan yang signifikan antara tahun 2019 dengan tahun 2020 dan tahun 2021. Berdasarkan data realisasi kunjungan wisatawan (sumber data : Dinas Pariwisata), diketahui bahwa mulai tahun 2017 sampai tahun 2019 tingkat kunjungan yang relatif tinggi hingga mencapai 3.924.570 kunjungan pada tahun 2019. Sementara itu pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2020 terjadi penurunan yang signifikan, yakni sebesar minus 97,14 % atau sebanyak **minus 3.812.292** kunjungan.

Kodisi ini terjadi disebabkan beberapa hal, antara lain :

1. Kondisi Pandemi Covid 19 yang berimplikasi kepada pembatasan kegiatan/aktivitas termasuk aktivitas di kawasan wisata menjadi faktor utama penyebab turunnya jumlah kunjungan wisatawan.
2. Disamping itu, penghitungan jumlah kunjungan wisatawan yang dilakukan pada tahun 2017 hingga tahun 2019 belum dilakukan secara akurat dengan menggunakan metode pengukuran yang baku, dimana penghitungan dilakukan berbasis estimasi dan asumsi pada hampir seluruh kawasan wisata yang ada (tanpa menggunakan karcis berbayar), serta dengan mengakumulasikan dengan data estimasi jumlah kunjungan wisatawan pada berbagai iven di lokasi wisata yang diselenggarakan sepanjang tahun 2017 - 2019. Sehingga, penghitungan jumlah kunjungan pada objek wisata tersebut dinilai relatif belum rasional karena belum didukung dengan data yang valid dan terukur. Sedangkan metode pengukuran jumlah wisatawan pada tahun 2020 dilakukan melalui riset bersama Akademisi dari Universitas Bung Hatta Padang pada bulan Agustus – Desember 2020, yang menghasilkan data hasil pengukuran Tingkat Kunjungan Wisatawan,

Length of Stay dan Spending of Money sebagaimana telah dituangkan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2020. Riset tersebut dilakukan bersamaan dengan situasi dan kondisi aktivitas pariwisata dalam masa Pandemi Covid 19, sehingga diperoleh angka kunjungan yaitu sebesar 112.278 kunjungan.

3. Sementara itu pada tahun 2021, meskipun masih dalam masa Pandemi Covid 19, namun terdapat perubahan kebijakan yang cukup signifikan di sektor pariwisata yaitu lahirnya Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Retribusi Tempat Wisata dan Tempat Khusus Parkir secara Elektronik, dimana regulasi ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan standarisasi dalam melaksanakan Retribusi Tempat Wisata dan Tempat Khusus Parkir secara Elektronik, sehingga dapat mengoptimalkan pelayanan bagi pengunjung di kawasan wisata dengan menggunakan aplikasi e-retribusi dan tempat khusus parkir. Implementasi Peraturan Walikota ini dilakukan dengan mengacu serta memberlakukan beberapa hal yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Namun demikian, untuk implementasinya dilakukan secara bertahap pada beberapa lokasi kawasan prioritas dengan menetapkan kawasan wisata berbayar pada beberapa kawasan wisata, antara lain Kawasan Wisata Pantai Gandoriah, Pantai Kata, Pulau Angso Duo. Dengan adanya kebijakan tersebut diperoleh beberapa dampak positif, yaitu selain menjadi salah satu sumber pendapatan daerah, sekaligus juga menjadi basis data kunjungan wisatawan, yang diukur berdasarkan jumlah karcis/tiket kunjungan yang terjual kepada wisatawan.

Berdasarkan hal tersebutlah maka pada tahun 2021, data jumlah kunjungan yang diperoleh telah berbasis data riil dengan menggunakan data kunjungan berdasarkan karcis/tiket masuk kawasan wisata berbayar (retribusi).

Dan berdasarkan tabel di atas juga terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah kunjungan yang signifikan pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan jumlah kunjungan pada tahun 2020, yaitu meningkat sebanyak

142.973 kunjungan atau sebesar 127,3 %. Namun demikian, dari jumlah kunjungan tersebut didominasi kunjungan yang merupakan wisatawan domestik.

Adapun perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari sasaran Terwujudnya Daya Saing Wisata dengan target akhir RPJMD 2018-2023 dapat dilihat dari Tabel berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator dari
sasaran Terwujudnya Daya Saing Wisata dengan
target akhir RPJMD 2018-2023.

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD TAHUN					REALISASI		
	SATUAN	AKHIR RPJMD	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Persentase Pertumbuhan spending of money	%	5,5	3,5	4,5	3,5	26,2	(21,38)	1.17

Sumber : Hasil Olahan (2022)

Berdasarkan tabel 3.2 di atas terlihat bahwa jika dibandingkan realisasi capaian pada tahun 2021 yaitu sebesar 1,17 % dengan target akhir periode RPJMD 2018-2023 sebesar 5,5 %, artinya masih terdapat *gap* sebesar 3,48 % yang harus dapat dipenuhi pada 2 (dua) tahun terakhir periode RPJMD 2018-2023, yaitu tahun 2022 hingga tahun 2023. Hal ini menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Pariaman untuk meningkatkan strategi dan kebijakan serta pelaksanaan program yang dapat mendukung pencapaian target indikator % pertumbuhan Spending of Money pada akhir periode RPJMD.

Adapun *beberapa permasalahan utama* yang sedang dihadapi Kota Pariaman dalam pengembangan pariwisata antara lain :

1. belum ditetapkannya regulasi terkait Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kota (RIPPARKOT) Pariaman;
2. belum tersedianya perencanaan penataan dan pengembangan potensi wisata Kota Pariaman terpadu berbasis *Grand Design* kepariwisataan yang komprehensif ;
3. belum optimalnya kualitas maupun kuantitas fasilitas atau sarana dan prasarana di setiap lokasi destinasi wisata;
4. belum optimalnya profesionalitas manajemen/pengelolaan objek wisata/kawasan wisata;

5. belum optimalnya kinerja SDM pengelola pariwisata, serta terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola pariwisata dalam menjalankan peran dan fungsinya;
6. belum optimalnya koordinasi dan kerjasama kemitraan antara pengelola pariwisata dengan seluruh jajaran dan pihak-pihak yang berkepentingan (Stakeholder);
7. belum terpenuhinya standarisasi sarana dan prasarana transportasi wisata wisata bahari, seperti dermaga pulau, perahu (*boat*), alat selam dan peralatan wahana wisata air lainnya;
8. belum optimalnya mekanisme pengawasan yang ketat dan implementasi SAPTA PESONA untuk menciptakan kenyamanan bagi wisatawan;
9. terbatasnya anggaran Pemerintah Kota Pariaman maupun investasi masyarakat/swasta dalam pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana wisata;
10. belum optimalnya strategi Promosi Pariwisata baik lokal, nasional maupun internasional;
11. belum optimalnya peningkatan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan potensi daerah untuk menguatkan struktur perekonomian masyarakat Kota Pariaman;
12. belum optimalnya integrasi seni budaya lokal sebagai aspek terintegrasi dalam pengembangan pariwisata melalui revitalisasi dan pelestarian nilai sejarah, seni dan budaya;
13. belum terwujudnya jaminan keamanan dan kenyamanan serta kepedulian terhadap wisatawan domestic dan mancanegara.

Untuk itu Pemerintah Kota Pariaman bersama Perangkat Daerah terkait berusaha menyelesaikan berbagai masalah sebagaimana diatas melalui beberapa strategi, antara lain :

1. Finalisasi dan Penetapan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kota (RIPPARKOT) Pariaman dalam suatu regulasi daerah. Adapun progres hingga saat ini yaitu, sejak disusun pada tahun 2019 RIPPARKOT hingga akhir tahun 2021 belum dapat ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah, disebabkan kendala terkait tahapan penetapan regulasi induk yaitu Peraturan Daerah tentang Revisi RTRW yang juga dalam proses penetapan.

2. Meskipun belum optimal, pada tahun 2021 telah dilaksanakan pembangunan, rehab, pemeliharaan dan pengembangan fasilitas atau sarana dan prasarana di beberapa lokasi destinasi wisata, baik melalui sumber pendanaan dari APBD melalui Dinas Pariwisata Kebudayaan, maupun melalui kolaborasi pendanaan dengan Perangkat Daerah lainnya, seperti penyediaan infrastruktur destinasi wisata melalui Dinas Pekerjaan Umum, penataan fasilitas pedagang di kawasan wisata melalui Dinas Perindagkop, maupun sinergi dalam pengembangan Desa Wisata melalui penggunaan Dana Desa. Selain itu, Pemerintah Kota Pariaman juga berupaya untuk mendapatkan fasilitasi pendanaan dari Pemerintah Pusat melalui APBN, seperti Pengembangan Kawasan Wisata Talao Pauh yang didanai melalui Kementerian PUPR, serta Pengembangan Kawasan Wisata Desa melalui Dana Desa.
3. Melakukan pelatihan pemandu wisata dan pelatihan kepada pelaku usaha jasa pariwisata untuk lebih meningkatkan kapasitas dan kemampuan manajerial/pengelolaan objek wisata secara optimal dan professional, melalui sumber pendanaan DAK Non Fisik Tahun 2021.
4. Optimalisasi kinerja SDM Aparatur pengelola pariwisata melalui pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara berjenjang
5. Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi pendukung kegiatan wisata bahari, seperti pemeliharaan dermaga pulau, kerjasama dengan pelaku usaha transportasi wisata (perahu/ boat), penyediaan peralatan wahana wisata air.
6. Melakukan kolaborasi perencanaan, pembangunan dan pengembangan destinasi wisata dengan masyarakat/pihak swasta/investor. Salah satu bentuk kolaborasi yang dilakukan Dinas Pariwisata dengan Pengelola Desa Wisata Apar yaitu dalam perencanaan dan pengembangan destinasi wisata di Desa Apar.
7. Meningkatkan upaya Promosi Pariwisata melalui berbagai bentuk media dan saluran promosi, dan optimalisasi promosi melalui digitalisasi pemasaran, salah satunya dengan mengembangkan akun media dengan konten-konten promosi pariwisata secara intensif. Selain itu juga untuk mempromosikan berbagai agenda iven tahunan, dilakukan launching

Calendar of Event “Pariaman Festival” di luar Kota Pariaman, tepatnya di Kota Pekanbaru, Riau

8. Mengembangkan sektor ekonomi kreatif berbasis potensi lokal, melalui kolaborasi dan kemitraan dengan stakeholder.
9. Melakukan revitalisasi nilai sejarah, seni dan budaya melalui pembinaan sanggar-sanggar seni budaya di Kota Pariaman, diantaranya melalui iven mingguan Pariaman Culture Everyweek (PCE) yang bertujuan memberikan wadah bagi pelaku-pelaku seni yang berasal dari sanggar seni di masyarakat, sekolah maupun komunitas seni untuk dapat menampilkan kreatifitas seni budaya lokal yang berlokasi di Pentas Seni Pantai Kata. Selain itu juga dilakukan melalui pelatihan Seni Ulu Ambek, serta melakukan iven budaya yang disinergikan dengan potensi wisata alam, yaitu Silek Tradisi di Kawasan Wisata Pantai Kata dengan brandingnya “Silek On The Sea” sebagai suatu bentuk pelestarian budaya lokal sekaligus promosi wisata pantai. Sedangkan dalam hal pelestarian nilai sejarah, juga telah dilakukan upaya identifikasi situs sejarah dan cagar budaya untuk selanjutnya ditetapkan oleh lembaga berwenang.

Alokasi Anggaran yang digunakan untuk mendukung capaian Sasaran ini berjumlah Rp. 5.148.891.124,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.911.724.355,00 (75,97%) dengan beberapa program antara lain :

- 1) Pengembangan Kebudayaan
- 2) Pengembangan Kesenian Tradisional
- 3) Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
- 4) Pengeloaan Permuseuman
- 5) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
- 6) Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- 7) Program Pemasaran Pariwisata
- 8) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
- 9) Pengembangan Destinasi Pariwisata
- 10) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Misi II: Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berkualitas dan Berbudaya

**Sasaran 1
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat**

No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian Tahun			
						2021	2020	2019	2018
1	Angka Harapan Lama Sekolah	14,55	tahun	14,55	tahun	100%	99,6%	99,9%	
2	Angka Rata-rata Lama Sekolah	10,84	tahun	10,67	tahun	98,43%	97,2%	98,0%	99,0%
<i>Rata-rata capaian</i>						99,22%	98,38%	99,0%	

Sumber : Hasil Olahan (2022)

Realisasi capaian dari Sasaran 1 Misi II yaitu Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah, dengan rata-rata capaian 99,22%. Jika dibandingkan dengan realisasi capaian pada tahun 2020 terdapat sedikit kenaikan yaitu sebesar 0,84% dari rata-rata capaian 98,38%, dengan realisasi di masing-masing indikator juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, yaitu dari meningkat sebesar 0,4 % untuk realisasi capaian indikator Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun 2020 sebesar 99,6 %, dan sebesar 1,41 % untuk realisasi capaian indikator Angka Rata-rata Lama Sekolah pada tahun 2020 sebesar 97,2 %.

Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa depan. Angka Harapan Lama Sekolah, diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 (tujuh) tahun ke atas yang digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) adalah indikator makro yang perhitungannya dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), dimana Angka Harapan Lama Sekolah Kota Pariaman untuk Tahun 2021 adalah 14,55

tahun, yang artinya adalah bahwa lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun ke atas) dimasa mendatang adalah selama 14,55 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai tamat/lulus Diploma 3, yang artinya juga adalah AHLS yang ditargetkan pada tahun 2021 sebagaimana juga ditetapkan sebagai target pada RPJMD 2018-2023, dapat tercapai sebesar 100%. Sementara itu, jika dibandingkan dengan capaian Angka Harapan Lama Sekolah Nasional pada tahun 2021 yaitu sebesar 13,08 tahun dan capaian Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 yaitu sebesar 14,09 tahun, maka realisasi capaian Angka Harapan Lama Sekolah Kota Pariaman tahun 2021 dapat direalisasikan lebih tinggi daripada AHLS Provinsi maupun Nasional.

Sedangkan Rata-rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Pariaman pada tahun 2021 berada pada angka 10,67 Tahun, artinya rata-rata lama seorang anak menghabiskan waktu untuk sekolah adalah selama 10,67 tahun atau pada jenjang kelas 1 SMA/SMK. Angka ini menunjukkan capaian sebesar 98,43 % dari target pada RPJMD 2018-2023 yaitu sebesar 10,84 tahun. Namun demikian capaian angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Pariaman lebih tinggi jika dibandingkan dengan Angka Rata-rata Lama Sekolah Nasional sebesar 8,48 maupun Angka Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Sumatera Barat sebesar 9,07 tahun, meskipun angka tersebut masih jauh berada di bawah angka target maksimum yang ditetapkan oleh UNDP yaitu sebesar 15 tahun.

Belum tercapainya target maksimum Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Pariaman disebabkan masih tingginya angka putus sekolah dan banyaknya penduduk di atas umur 25 tahun yang hanya mengenyam pendidikan di sampai jenjang pendidikan SMP. Namun demikian, Rata-rata Lama Sekolah berpotensi akan meningkat seiring dengan sejumlah program pendidikan yang diterapkan di Kota Pariaman. "Dalam waktu dekat dimungkinkan terjadi peningkatan angka rata-rata lama sekolah menjadi 12 tahun", yang disebabkan karena implementasi program Satu Keluarga Satu Sarjana (SAGA SAJA) di Kota Pariaman.

Keberhasilan dalam pencapaian Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah tahun 2021, dan juga realisasi yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun, disebabkan adanya beberapa strategi, kebijakan dan program yang dilakukan sebagai berikut :

1. Program wajib belajar 12 tahun, dimana Pemerintah Kota Pariaman memiliki kebijakan terkait “Pendidikan Gratis”, yaitu dengan memberikan subsidi biaya Pendidikan selama 12 tahun mulai dari SD sampai SMA/SMK Negeri.

Berhubung SMA/SMK tidak lagi menjadi kewenangan Kabupaten/Kota, maka untuk memberikan jaminan anak-anak peserta didik pada jenjang pendidikan SMA/SMK juga mendapatkan dampak dari kebijakan ini, Pemerintah Kota Pariaman mengambil kebijakan melalui Pemberian Bantuan Keuangan Khusus kepada Provinsi Sumatera Barat yang dimaksudkan sebagai alokasi pendanaan melalui APBD Provinsi Sumatera Barat bagi siswa/siswi SMA/SMK Negeri yang berada di Kota Pariaman, sehingga dapat mengikuti proses pembelajaran tanpa mengeluarkan biaya.

Dengan adanya kebijakan yang telah berjalan sejak tahun 2019, maka dapat memberikan peluang besar untuk tercapainya peningkatan motivasi anak usia sekolah jenjang SMA/SMK untuk tetap melanjutkan dan menyelesaikan proses pembelajaran hingga 12 tahun dan akan berimplikasi kepada peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah di Kota Pariaman.

Pemberian Bantuan Keuangan ini diatur dengan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

2. Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SAGA SAJA), yaitu berupa program yang bersifat pemberian bantuan beasiswa kuliah gratis kepada mahasiswa kurang mampu yang akan melanjutkan studi/kuliah hingga tamat pada jenjang Perguruan Tinggi yang ditunjuk/ yang sudah bekerja sama, yang dananya berasal dari berbagai sumber, diantaranya APBD, Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman dan sumber lain yang tidak mengikat, seperti CSR.

Dengan adanya SAGA SAJA, maka peluang anak yang telah tamat SMA/SMK yang berasal dari keluarga kurang mampu untuk dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi relatif besar, karena anak yang memenuhi kriteria dan persyaratan, akan dapat mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa dengan jaminan akan dibiayai apabila berhasil lulus dan diterima di Perguruan Tinggi yang ditentukan.

3. Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan berupa Program pendidikan kesetaraan dengan membangun sanggar Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang memberi kesempatan bagi penduduk di atas 25 tahun untuk mengambil paket A, B dan C. PKBM merupakan tempat Pendidikan bagi anak-anak putus sekolah.

Melalui strategi ini juga memberikan peluang bagi anak putus sekolah untuk dapat kembali melanjutkan sekolah sesuai jenjangnya, yang artinya dapat berkontribusi dalam meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah di Kota Pariaman.

Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi dan Kabupaten Kota di Sumatera Barat, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.3
Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi dan Kabupaten Kota di Sumatera Barat

NO	PROV/KAB/KOTA	HARAPAN LAMA SEKOLAH (TAHUN)			RATA-RATA LAMA SEKOLAH (TAHUN)		
		2021	2020	2019	2021	2020	2019
1	Kota Padang	16,53	16,52	16,51	11,59	11,58	11,34
2	Kota Padang Panjang	15,07	15,06	15,05	11,63	11,62	11,45
3	Bukittinggi	14,98	14,97	14,96	11,34	11,33	11,32
4	Kota Pariaman	14,55	14,54	15,53	10,67	10,59	10,37
5	Kab. Tanah Datar	14,34	14,33	14,32	8,62	8,61	8,45
6	Kota Solok	14,33	14,32	14,31	11,04	11,03	11,02
7	Kota Payakumbuh	14,27	14,26	14,25	11,81	11,73	11,72
8	Kabupaten Agam	13,88	13,87	13,86	8,97	8,96	8,85
9	Kab. Padang Pariaman	13,68	13,67	13,62	7,88	7,87	7,86
10	Kab. Pasaman Barat	12,81	13,61	13,40	8,27	8,19	8,06
11	Kab. Pesisir Selatan	13,68	13,32	13,31	8,27	8,26	8,25
12	Kab. Lima Puluh Kota	13,30	13,29	13,28	8,07	7,99	7,98
13	Kota Sawahlunto	13,18	13,17	13,16	10,32	10,17	9,97
14	Kab. Solok	13,05	13,04	13,03	7,87	7,86	7,85
15	Kab. Kep. Mentawai	12,89	12,82	12,76	7,20	7,09	7,08
16	Kab. Pasaman	12,80	12,80	12,79	8,10	8,09	7,86
17	Kab. Solok Selatan	12,72	12,71	12,70	8,32	8,82	8,16
18	Kab. Dharmasraya	12,44	12,43	12,42	8,55	8,47	8,46
19	Kab. Sijunjung	12,38	12,37	12,36	8,12	8,11	8,10
20	Prov. SUMBAR	14,09	14,02	14,01	9,07	8,99	8,92

Sumber : Badan Pusat Statistik 2021

Dari tabel di atas terlihat bahwa Angka Harapan Lama Sekolah Kota Pariaman jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, Kota Pariaman berada pada urutan ke 4, yakni berada di bawah Kota Padang, Kota Padang Panjang dan Kota Bukittinggi. Sedangkan untuk Angka Rata-rata Lama Sekolah, Kota Pariaman berada pada urutan ke 6 setelah Kota Payakumbuh, Kota Padang Panjang, Kota Padang, Kota Bukittinggi dan Kota Solok.

Adapun perbandingan realisasi Capaian Indikator dari Sasaran **Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang berkualitas dan Berbudaya** dengan target akhir periode RPJMD 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari sasaran Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang berkualitas dan Berbudaya dengan target akhir RPJMD 2018-2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD TAHUN					REALISASI & CAPAIAN TAHUN		
	SATUAN	AKHIR RPJMD	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,58	14,54	14,60	14,55	14,53 (99,59%)	14,54 (99,9%)	14,55 (100%)
Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,34	10,60	10,90	10,84	10,37 (98%)	10,59 (97,16%)	10,67 (98%)

Sumber : Hasil Olahan (2022)

Dari tabel di atas terlihat perbandingan realisasi capaian Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun 2021 dengan target akhir RPJMD 2018-2023 sebesar 14,58, terdapat *gap* sebesar 0,03 tahun, dan berdasarkan trend peningkatan capaian selama 3 (tiga) tahun terakhir, maka dapat diprediksikan target akan dapat dicapai pada akhir periode RPJMD.

Sedangkan capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah tahun 2021 sebesar 10,67 tahun jika dibandingkan dengan target pada akhir periode RPJMD sebesar 11,34 tahun, maka masih terdapat *gap* sebesar 0,67 tahun. Dengan demikian dibutuhkan strategi dan kebijakan yang dapat mendukung pencapaian sesuai target yang ditetapkan. Program yang mendukung sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan ini diantaranya:

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan
- 2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- 3) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

- 4) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
- 5) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 6) Pembinaan Perpustakaan
- 7) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Sasaran 2
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian Tahun		
						2021	2020	2019
1	Angka Usia Harapan Hidup	70,53	tahun	70,38	tahun	99,79%	99,97%	100,1%
Rata-rata Capaian						99,79%	99,97%	100,1%

Sasaran Meningkatkan Derajat Kehidupan Masyarakat mengalami perubahan dari dua indikator yaitu” indikator Angka Usia Harapan Hidup dan Indeks Keluarga Sehat “ menjadi satu yaitu “Angka Usia Harapan Hidup”.

Usia harapan hidup ditentukan oleh besarnya angka jumlah kematian bayi, jika kematian bayi jumlahnya besar, usia harapan hidup akan rendah.

Angka harapan Hidup di Kota Pariaman pada tahun 2021 sebesar 70,38 tahun lebih rendah dari target yang telah ditetapkan yakni sebesar 70,53 tahun, terdapat selisih sebesar 0,15 tahun. Dibandingkan dengan Usia harapan Hidup Kota Pariaman angka UHH tahun 2019 sebesar 70,15 tahun dan angka UHH tahun 2020 sebesar 70,28 tahun telah terjadi peningkatan yang cukup signifikan.

Angka harapan hidup dapat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, ketersediaan pangan, pendidikan, kebijakan pemerintah maupun perekonomian masyarakat dan sebagainya.

Peningkatan harapan hidup disebabkan karena hidup yang lebih baik, pencegahan serta perawatan ibu, meningkatnya pendidikan dan pendapatan perkapita.

Perkembangan Angka Harapan Hidup di Kota Pariaman ini dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.1

Trend Angka Harapan Hidup di Kota Pariaman Tahun 2018-2021



Sumber : BPS Kota Pariaman Tahun 2021

Angka harapan hidup adalah data yang menggambarkan usia kematian pada suatu populasi. Data ini merupakan ringkasan pola usia kematian yang terjadi pada seluruh kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga lansia.

Angka harapan hidup pada dasarnya merupakan gambaran kondisi suatu wilayah secara garis besar. Semakin tingginya angka harapan hidup di Indonesia menandakan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Jika angka kematian bayi tinggi, maka harapan hidup di wilayah tersebut akan rendah, begitu pula sebaliknya.

Meski demikian, angka harapan hidup ini berbeda pada tiap Negara. Angka harapan hidup ini mencakup berbagai parameter yang menjelaskan derajat kesehatan suatu daerah. Beberapa parameternya secara kuantitatif adalah angka kematian bayi, angka kematian anak dibawah 5 tahun, Sedangkan parameter kualitatif seperti jenis kelamin, genetik, akses ke pelayanan kesehatan, kebersihan lingkungan, diet, nutrisi, gaya hidup dan tingkat kriminalitas.

Adapun Realisasi Capaian Indikator dari sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan target akhir RPJMD 2018-2023 tercantum pada tabel:

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari sasaran
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
dengan target akhir RPJMD 2018-2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD TAHUN					REALISASI		
	SATUAN	AKHIR RPJMD	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	71,18	70,07	70,30	70,53	70,15 (100,11%)	70,28 (99,97%)	70,38 (99,79%)

Dari tabel 3.5 di atas terlihat perbandingan realisasi capaian Angka Usia Harapan Hidup pada tahun 2021 dengan target akhir RPJMD 2018-2023 sebesar 17,18 terdapat *gap* sebesar 0,8 tahun, dan berdasarkan trend peningkatan capaian selama 3 (tiga) tahun terakhir, maka dapat diprediksikan target akan dapat dicapai pada akhir periode RPJMD. Dengan demikian dibutuhkan strategi dan kebijakan yang dapat mendukung pencapaian sesuai target yang ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan Kabupaten dan Kota, serta Provinsi Sumatera Barat, Usia Harapan Hidup Kota Pariaman berada pada urutan 9, lebih tinggi dari Provinsi Sumatera Barat .

Adapun Usia Harapan Hidup Kabupaten Kota di Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota
Se Sumatera Barat

Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup Saat Lahir [Metode Baru] (Tahun)		
	2019	2020	2021
Kab. Agam	72,17	72,37	72,53
Kab. Dharmasraya	71,10	71,33	71,53
Kab. Kepulauan Mentawai	64,68	64,73	64,73
Kab. Lima Puluh Kota	69,70	69,79	69,84
Kab. Padang Pariaman	68,58	68,79	68,97
Kab. Pasaman	67,18	67,40	67,59
Kab. Pasaman Barat	67,67	67,82	67,94
Kab. Pesisir Selatan	70,73	70,86	70,96
Kab. Sijunjung	66,02	66,21	66,36
Kab. Solok	68,34	68,58	68,79
Kab. Solok Selatan	67,58	67,81	68,01
Kab. Tanah Datar	69,73	69,94	70,12
Kota Bukittinggi	74,22	74,38	74,50
Kota Padang	73,57	73,65	73,69
Kota Padang Panjang	72,77	72,82	72,82
Kota Pariaman	70,15	70,28	70,38
Kota Payakumbuh	73,61	73,74	73,84
Kota Sawahlunto	69,87	70,00	70,10
Kota Solok	73,45	73,61	73,73
Provinsi Sumatera Barat	69,31	69,47	69,59

Sumber Data BPS 2021

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, Umur Harapan Hidup yang tertinggi adalah Kota Bukittinggi 74,54, dan yang terendah Kabupaten Mentawai 64,73, sedangkan Provinsi Sumatera Barat pada 2021 telah mencapai 69,59 tahun atau naik 0,17 persen dibanding tahun lalu.

Berdasarkan data WHO, negara yang memiliki angka harapan hidup paling tinggi adalah Hongkong sebesar 85,29 tahun. Sedangkan untuk kawasan Asia Tenggara, negara yang memiliki angka harapan hidup tertinggi adalah Singapura yaitu 84,07 tahun.

Di Indonesia 10 Propinsi dengan Angka Harapan Hidup tertinggi, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta 76,89 Tahun, Jawa Tengah 76,42, Jawa Barat 75,19 Tahun, DKI 74,91 Tahun, Bali 74,17 Tahun, Riau 73,62 Tahun, Jawa

Timur 73,35 Tahun, Jambi 73,19 Tahun, Bangka Belitung 72,70 Tahun dan dan Lampung 72, 69 Tahun.

Hal yang mempengaruhi naiknya Angka Usia harapan Hidup antara lain :

1. Kemudahan akses pelayanan kesehatan,
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan,
3. Status ekonomi,
4. Penerapan pola hidup sehat.

Untuk memperpanjang Angka Harapan Hidup, masyarakat dihimbau untuk:

- 1) rajin berolah raga, karena dengan berolah raga membuat seseorang menjadi lebih sehat dan lebih bahagia;
- 2) menjauhkan diri dari stress, karena stress dapat menyebabkan seseorang mudah terserang beragam penyakit;
- 3) Istirahat yang cukup dan berkualitas;
- 4) Meminimalisir melakukan kegiatan beresiko, seperti merokok atau meminum alkohol;
- 5) Mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang.

Peningkatan AHH bukan hanya sekedar memperpanjang umur, melainkan juga soal hidup sehat produktif dan berkualitas. Masyarakat perlu melakukan peningkatan ketahanan keluarga berdasarkan siklus hidup dengan memperhatikan kesinambungan antar-generasi. Itu artinya, jika kualitas hidup generasi baik, maka pada generasi selanjutnya juga akan baik, bahkan lebih baik.

Sasaran 3 Menurunnya Prevalensi Stunting

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Tahun			
				2021	2020	2019	2018
1	Prevalensi Stunting	10,02	10,30	97%	-	-	-
Rata-rata Capaian				97%			

Sasaran Menurunnya Prevalensi Stunting merupakan sasaran dan indikator baru dari Misi II.

Indikator Prevalensi Stunting dengan target target 10,02% relaisasi 10,3% dengan capaian 103%.

Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Hal ini dikarenakan anak stunted, bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya (bertubuh pendek/kerdil) saja, melainkan juga terganggu perkembangan otaknya, yang mana tentu akan sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah, produktivitas dan kreativitas di usia-usia produktif.

Grafik 3.2
Trend balita stunting di Kota Pariaman Tahun 2018-2021



Capaian Prevalensi Stunting di Tahun 2021 yang ditargetkan 10.02 adalah 10,3 tidak mencapai target yang ditetapkan, hal ini menunjukkan penurunan Prevalensi Stunting yang ditargetkan belum tercapai. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2020 dari tabel di atas dapat dilihat bahwa balita stunting di Kota Pariaman tahun 2021 sebanyak 10,3% sedikit menurun dibanding tahun 2020 yaitu 10,8. Ini menandakan bahwa upaya yang dilaksanakan dalam rangka menurunkan stunting di Kota Pariaman sudah memberikan hasil diantaranya :

- 1 Memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai standar pada ibu hamil selama kehamilannya
- 2 Memberikan pelayanan kesehatan bagi bayi baru lahir yang sesuai standar
- 3 Memberikan edukasi dan konseling kepada ibu hamil tentang menjaga kesehatan selama kehamilan
- 4 Meningkatkan kerja sama lintas program dan lintas sektor terkait dalam rangka menurunkan stunting

Untuk negara di Asia Tenggara, Timor Leste menempati posisi tertinggi jumlah balita stunting yaitu 48,8 %. Sedangkan Singapura menempati posisi terendah yaitu 2,8 %. Indonesia berada di urutan ke empat dunia dan urutan kedua di Asia Tenggara terkait kasus balita stunting. WHO memberikan

toleransi maksimal stunting yaitu kurang dari 20 %. Secara nasional, persentase balita stunting menunjukkan perbaikan dengan turunnya trend sebesar 3,3 persen dari 27,7 persen tahun 2019 menjadi 24,4 persen tahun 2021. Masih berada pada posisi melebihi toleransi yang ditetapkan WHO. Provinsi Bali menjadi satu-satunya provinsi berkategori baik dengan angka stunted rendah (≤ 20 persen) yakni 10,9 persen dan wasted rendah (≤ 5 persen) yakni 3 persen. Di Sumatera Barat jumlah balita stunting pada tahun 2020 adalah 23,3 %. Kabupaten dengan jumlah stunting tertinggi adalah Kabupaten Solok sebesar 40,1 %.

Menurut Kemenkes faktor-faktor penyebab stunting pada anak adalah sebagai berikut :

1. Kurang asupan gizi selama hamil

WHO atau badan kesehatan dunia menyatakan bahwa sekitar 20% kejadian stunting sudah terjadi saat bayi masih berada di dalam kandungan. Hal ini disebabkan oleh asupan ibu selama hamil yang kurang bergizi dan berkualitas sehingga nutrisi yang diterima janin cenderung sedikit. Akhirnya, pertumbuhan di dalam kandungan mulai terhambat dan terus berlanjut setelah kelahiran. Oleh karena itu, penting untuk mencukupi berbagai nutrisi penting selama hamil.

2. Kebutuhan gizi anak tidak tercukupi

Selain itu, kondisi ini juga bisa terjadi akibat makanan balita saat masih di bawah usia 2 tahun yang tidak tercukupi, seperti posisi menyusui yang kurang tepat, tidak diberikan ASI eksklusif, hingga MPASI (makanan pendamping ASI) yang kurang berkualitas. Banyak teori yang menyatakan bahwa kurangnya asupan makanan juga bisa menjadi salah satu faktor utama penyebab stunting. Khususnya asupan makanan yang mengandung protein serta mineral zinc (seng) dan zat besi ketika anak masih berusia balita. Kejadian ini umumnya sudah mulai berkembang saat anak berusia 3 bulan. Proses perkembangan tersebut lambat laun mulai melambat ketika anak berusia 3 tahun. Setelah itu, grafik penilaian tinggi badan berdasarkan umur (TB/U), terus bergerak mengikuti kurva standar tapi dengan posisi berada di bawah

3. Kurangnya pengetahuan ibu mengenai gizi sebelum hamil, saat hamil dan setelah melahirkan

4. Kurangnya akses air bersih dan sanitasi
5. Pola asuh yang tidak tepat oleh ibu dan keluarga
6. Kualitas pelayanan kesehatan
7. Ketahanan pangan

Stunting merupakan kondisi gangguan pertumbuhan yang tidak bisa dikembalikan seperti semula. Artinya, ketika seorang anak sudah stunting sejak masih balita, pertumbuhannya akan terus lambat hingga ia dewasa.

Saat puber, ia tidak dapat mencapai pertumbuhan maksimal akibat sudah terkena stunting di waktu kecil. Meski telah memberikannya makanan kaya gizi, tetap saja pertumbuhannya tidak dapat maksimal seperti anak normal lainnya.

Namun, tetap penting untuk memberikan berbagai makanan yang bergizi tinggi agar mencegah kondisi balita semakin buruk dan gangguan pertumbuhan yang ia alami semakin parah. Oleh karena itu, sebenarnya hal ini dapat dicegah dengan cara memberikan nutrisi yang maksimal saat awal-awal kehidupannya. Tepatnya selama 1.000 hari pertama kehidupan anak

Upaya yang dilakukan untuk mencegah stunting yaitu :

1. Pemantauan kesehatan secara optimal pada masa kehamilan yaitu pada 1.000 hari pertama kehidupan bayi.
2. Pemeriksaan kehamilan atau ante natal care (ANC) secara rutin dan berkala.
3. Memberikan makanan tinggi kalori, protein, serta mikronutrien untuk bayi (TKPM).
4. Memberikan pola asuh yang tepat
Pemberian ASI Eksklusif sampai usia 6 bulan, serta pemberian ASI bersama dengan MP-ASI sampai anak berusia 2 tahun. World Health Organization (WHO) dan United Nations Children's Fund (UNICEF) menganjurkan agar bayi usia 6-23 bulan untuk mendapatkan makanan pendamping ASI (MP-ASI) yang optimal.
5. Ketersediaan pangan di masing-masing keluarga.
Hal ini bisa dilakukan misalnya dengan meningkatkan kualitas makanan harian yang dikonsumsi.
6. Rutin memantau pertumbuhan perkembangan balita.
7. Memberikan makanan tambahan (PMT) untuk balita.

8. Melakukan stimulasi dini perkembangan anak.
 9. Memberikan pelayanan dan perawatan kesehatan yang optimal untuk anak.
- Adapun perbandingan realisasi Capaian Indikator dari Sasaran **Menurunnya Prevalensi Stunting** dengan target akhir periode RPJMD 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Realisasi Capaian Indikator dari sasaran Menurunnya Prevalensi Stunting dengan target akhir RPJMD 2018-2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD TAHUN					REALISASI		
	SATUAN	AKHIR RPJMD	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Prevalensi Stunting	%	8,9	-		10,02			10,03

Dari tabel 3.7 di atas terlihat perbandingan realisasi capaian Prevalensi Stunting pada tahun 2021 adalah 10,03 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2018-2023 sebesar 8,9 terdapat *gap* sebesar 1,13 %, sasaran ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, karena sasaran dan indikator ini baru, namun mudah-mudahan target ini akan dapat dicapai pada akhir periode RPJMD. Dengan demikian dibutuhkan strategi dan kebijakan yang dapat mendukung pencapaian sesuai target yang ditetapkan.

Alokasi Anggaran untuk mencapai *Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat* dan *Sasaran Prevalensi Stunting* adalah sebesar **Rp. 86.731.750.052,95** dengan realisasi **Rp 80.677.156.619. (93%)**

Program yang mendukung sasaran 2 dan Sasaran 3, diantaranya:

- 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- 3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
- 4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
- 5) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 6) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- 7) Program Perlindungan Perempuan
- 8) Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- 9) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- 10) Program Perlindungan Khusus Anak
- 11) Program Pengendalian Penduduk

12) Pembinaan Keluarga Berencana

13) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Sasaran 4 Meningkatnya Pendapatan Masyarakat

No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian Tahun				
						2021				
1	Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan	13,15	juta	12,818	juta	97%	-	-	-	-
	Rata-rata Capaian					97%	-	-	-	-

Sasaran 4 ini mengalami perubahan dari sasaran semula, yaitu “Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat dengan indikator Indeks Daya Beli Masyarakat” diubah menjadi “Meningkatnya Pendapatan Masyarakat dengan indikator Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan”.

Sasaran Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dengan indikator Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan yang ditargetkan sebesar 13,15 Juta hanya terealisasi sebesar 12,818 juta dengan capaian 97%.

Tidak tercapainya target yang ditetapkan, disebabkan:

1. karena masih dalam pengaruh pandemi Covid19 karena banyaknya pemutusan hubungan kerja sehingga meningkatnya angka pengangguran.
2. dari sektor pertanian terjadinya serangan hama yang mengakibatkan gagal panen .

Adapun perbandingan realisasi Capaian Indikator dari Sasaran **Meningkatnya Pendapatan Masyarakat** dengan target akhir periode RPJMD 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.8
Realisasi Capaian Indikator dari Sasaran Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dengan target akhir RPJMD 2018-2023**

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD TAHUN					REALISASI		
	SATUAN	AKHIR RPJMD	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan	Juta (Rp.)	14,00	-	-	13,15	-	-	12,818 (97%)

Dari tabel 3.8 di atas terlihat perbandingan realisasi capaian Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan pada tahun 2021 adalah

Rp. 12,818 juta jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2018-2023 sebesar Rp. 14,00 juta terdapat *gap* sebesar Rp. 1.182 juta.

Sasaran ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, karena sasaran Meningkatnya Pendapatan Masyarakat dengan Indikator Pengeluaran Perkapita merupakan sasaran dan indikator baru, namun Pemerintah Kota Pariaman optimis target ini akan dapat dicapai pada akhir periode RPJMD. dengan strategi dan kebijakan yang dapat mendukung pencapaian sesuai target yang ditetapkan.

Program yang mendukung sasaran ini diantaranya:

- 1) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- 2) Penanganan Kerawanan Pangan
- 3) Pengelolaan Ikan Tangkap
- 4) Pengelolaan Perikanan Budi Daya
- 5) Optimalisasi Pengelolaan Pemasaran Hasil Perikanan
- 6) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota
- 7) Peyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- 8) Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- 9) Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- 10) Penyuluhan Pertanian
- 11) Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Misi III : Mewujudkan Pemerintahan yang Prima untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik berbasis Smart City

**Sasaran 1
Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel**

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TAHUN			
				2021	2020	2019	2018
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	61,15	60,06	98%	80%	94%	89%
2	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	100%	100%	100%	100%
Rata-rata capaian				99%	90%	97%	

Sasaran Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, dengan 2 indikator Kinerja, yaitu: Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Opini BPK terhadap LKPD dengan rata-rata capaian 99%

- Nilai Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik .

Berdasarkan hasil Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2021 dengan kategori nilai B (60,06).

Hasil Penilaian ini, menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih rendah jika dibandingkan dengan capaian Kinerja, hal ini disebabkan kualitas pembangunan budaya kerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil belum berjalan dengan baik.

Dengan Nilai 60,06 (B), dimana SAKIP Kota Pariaman cukup baik, namun masih perlu banyak perbaikan-perbaikan diantaranya:

- membuat Pohon Kinerja Pemerintah Kota
- membuat cascading.
- Tujuan, Sasaran yang ditetapkan pada dokumen RPJMD dan Renstra OPD dan Dokumen belum sepenuhnya menjawab isu strategis yang dihadapi serta belum dilengkapi indikator kinerja yang SMART, yang mengakibatkan program dan kegiatan yang ditetapkan tidak memiliki dampak dan manfaat langsung bagi masyarakat.
- Penjabaran Kinerja yang disusun belum seluruhnya memenuhi prinsip logis yang menggambarkan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi.
- Penjabaran Kinerja masih berorientasi urusan, sehingga tidak terlihat hubungan lintas fungsi antar OPD yang dibutuhkan untuk mendukung tercapainya kinerja.
- Kepemilikan Kinerja masih belum terlihat pada OPD, sehingga implementasi SAKIP masih pada tahap administrasi, belum terlihat adanya keterlibatan pimpinan OPD dalam pengambilan keputusan strategis yang berhubungan dengan penetapan kinerja dan strategi yang diperlukan.

- Hasil Evaluasi Internal SAKIP yang dilakukan Inspektorat belum memacu perbaikan akuntabilitas kinerja yang signifikan.
- Kualitas pengungkapan informasi kinerja dalam laporan kinerja masih terbatas, sehingga belum menghasilkan umpan balik berupa perbaikan atas perencanaan kinerja secara signifikan.
- Rendahnya kualitas implementasi SAKIP mengakibatkan upaya reformasi birokrasi yang dilakukan belum mendukung pencapaian kinerja

Upaya yang telah dilakukan meningkatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pariaman:

- Telah dilakukan reviu terhadap Dokumen Perencanaan dan melakukan perbaikan terhadap dokumen kinerja secara menyeluruh;
- *Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah*

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan ke BPK RI paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, untuk Laporan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman . Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman Sejak tahun 2016 Sampai dengan tahun 2021 telah berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI terhadap LKPD.

Hal ini sangat penting mengingat WTP adalah penilaian tertinggi atas kualitas pengelolaan keuangan negara yang menjamin bahwa informasi keuangan telah wajar disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Adapun perbandingan realisasi Capaian Indikator dari Sasaran Meningkatnya **Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel** dengan target akhir periode RPJMD 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9

Perbandingan Realisasi Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel dengan target akhir RPJMD 2018-2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD TAHUN					REALISASI		
	SATUAN	AKHIR RPJMD	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	70,05	60,00	71,00	61,50	56,15 (94%)	56,50 (80%)	60,06 (98%)
Opini BPK terhadap LKPD	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Dari Tabel 3.9 di atas terlihat perbandingan realisasi capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja pada tahun 2021 adalah 60,06 adanya gap sebesar 10 poin dari target akhir RPJMD yaitu sebesar 70.50.

**Sasaran 2
Meningkatnya Birokrasi Yang Kapabel**

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TAHUN			
				2021	2020	2019	2018
1	Indeks SPBE	3,1	2,42	78%	103%	106%	
2	Indeks Profesional ASN	55	45,78	83%			
Rata-rata capaian				81%	103%	106%	

Sasaran Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel terdapat 2 indikator yaitu Indeks SPBE dan Indeks Profesional ASN dengan rata-rata capaian hanya 81%.

Indeks SPBE jika dibandingkan dengan Tahun 2020 adanya penurunan yang cukup tajam yaitu sebesar 25%. Sedangkan untuk Profesional ASN tidak bisa dibandingkan karena merupakan indikator baru, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10

Perbandingan Realisasi Meningkatnya Birokrasi Yang Kapabel dengan target akhir RPJMD 2018-2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD TAHUN					REALISASI		
	SATUAN	AKHIR RPJMD	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Indeks SPBE	Indeks	3,25	2,7	2,8	3,1	2,87 (106%)	2,87 (103%)	2,42 (78%)
Indeks Profesional ASN	Indeks	62	-	-	55	-	-	45,78 (83%)

1. Indeks SPBE

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Pelaksanaan Evaluasi SPBE dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali untuk dapat memastikan pertumbuhan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE pelaksanaan Evaluasi SPBE telah dilaksanakan dengan menggunakan instrumen 47 indikator, sedangkan tahun 2019 hanya 37 indikator. Penyesuaian atas instrumen dilakukan untuk memastikan peningkatan kualitas SPBE dapat tercapai sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Dengan diterapkannya instrumen baru ini tentunya terdapat penyesuaian dalam penilaian yang berdampak pada penurunan nilai indeks SPBE di hampir seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terutama pada indikator-indikator baru yang dinilai pada tahun ini. Namun hal ini ditargetkan untuk memenuhi cakupan yang lebih komprehensif, dimana hasil penilaian tahun ini merepresentasikan indeks penerapan SPBE dengan kualitas yang lebih optimal.

Hasil pelaksanaan Evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2021 ini akan menjadi baseline kondisi penerapan dengan kesesuaian kriteria dan kondisi yang harus dipenuhi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Untuk itu diharapkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SPBE setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat digunakan dalam menentukan strategi tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi nasional.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan

mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Predikat indikator kinerja dengan outcome sejauhmana pelaksanaan SPBE di Pemerintah Kota Pariaman untuk memenuhi nilai yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level). Pelaksanaan framework yang telah ditetapkan Permen PAN RB No. 5 Tahun 2018 terkait pedoman evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan telah dilaksanakan di Kota Pariaman. Hal ini terbukti dengan nilai indeks SPBE yang diterima oleh Pemerintah Kota Pariaman pada tahun 2021 yaitu 2,42 dengan predikat Cukup.

Indeks SPBE Kota Pariaman pada tahun 2021 mengalami penurunan yakni sebesar 0,45.

Penurunan nilai Indeks SPBE Kota Pariaman ini disebabkan :

1. Penyelenggara SPBE belum optimal,
2. pelaksanaan Audit TIK belum terlaksana,
3. Penerapan Manajemen SPBE tidak jelas, dan
4. Perencanaan Strategis SPBE belum ada.
5. Tim Koordinasi SPBE belum berjalan sesuai perencanaan.
6. anggaran SPBE yang belum memadai.

Upaya yang akan dilakukan Pemerintah Kota Pariaman:

- a. membuat arsitektur dan peta rencana SPBE
- b. menyusun perencanaan strategis SPBE untuk mendukung penerapan semua aspek SPBE lainnya, sehingga pada pelaksanaan evaluasi SPBE selanjutnya sudah dapat memenuhi indikator dan kriteria penilaian sesuai target.

2. Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 8 Tahun 2019 dengan rumus pengukuran indeks profesionalitas ASN sebagai berikut :

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$

$$IP_2 = W_{2k} * R_{2k}$$

$$IP_3 = W_{3l} * R_{3l}$$

$$IP_4 = W_{4m} * R_{4m}$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i

IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

$W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j

$W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k

$W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l

$W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m

Bobot per dimensi,yaitu:

- Dimensi kualifikasi diperhitungkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan pengukuran
- Dimensi kompetensi diperhitungkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan pengukuran
- Dimensi kinerja diperhitungkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan pengukuran
- Dimensi disiplin diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari keseluruhan pengukuran

Realisasi diatas dihitung secara otomatis pada sistem pengukuran indeks profesionalitas (PIP) ASN <https://dj.ip.asn.bkn.go.id>, data pengukuran diolah dari aplikasi SAPK-BKN yang dikelola langsung oleh admin daerah (BKPSDM Kota Pariaman). Hasil penghitungan dilaporkan secara berkala oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) sesuai Regional masing-masing. Kota Pariaman dikelola oleh BKN Regional XII Pekanbaru. Dari 41 Kabupaten/Kota yang berada dilingkungan BKN Regional XII Nilai Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Kota Pariaman berada pada peringkat 34 dengan nilai 45,78 (sangat rendah), yang tertinggi adalah adalah Kota Padang panjang dengan nilai 74,03 (sedang), sedangkan diurutan kedua Kabupaten Pasaman dengan nilai 68,6 (rendah), sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.11

**Listing Nilai Indeks Profesionalitas ASN Instansi Tahun 2021
Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru
keadaan tgl : 5 Januari 2022**

No.	INSTANSI	JUMLAH PNS	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	NILAI	KATEGORI
1	Pemerintah Kota Padang Panjang	1.824	12,95	31,11	25,05	5	74,03	Sedang
2	Pemerintah Kab. Pasaman	3.960	13,06	25,98	24,58	5	68,6	Rendah
3	Pemerintah Kota Payakumbuh	2.813	13,14	15,9	25,16	5	59,17	Sangat Rendah
4	Pemerintah Kota Batam	5.601	13,28	12,37	24,54	5	55,17	Sangat Rendah
5	Pemerintah Kab. Kampar	7.685	13,04	14,22	22,76	5	55,02	Sangat Rendah
6	Pemerintah Kab. Dharmasraya	3.314	13,21	13,98	22,82	5	55,01	Sangat Rendah
7	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	4.874	14,34	9,01	25,05	5	53,4	Sangat Rendah
8	Pemerintah Kab. Pelalawan	4.489	13,46	9,62	25,01	5	53,09	Sangat Rendah
9	Pemerintah Kota Padang	7.666	13,23	10,27	24,31	5	52,79	Sangat Rendah
10	Pemerintah Kota Tanjungpinang	3.101	12,38	11,29	24,12	5	52,77	Sangat Rendah
11	Pemerintah Kota Bukittinggi	2.432	12,89	10,5	24,24	5	52,63	Sangat Rendah
12	Pemerintah Kab. Pasaman Barat	4.284	13,26	9,65	24,72	5	52,61	Sangat Rendah
13	Pemerintah Provinsi Riau	14.385	14,12	8,71	24,56	5	52,4	Sangat Rendah
14	Pemerintah Kab. Umapuluh Kota	5.523	12,62	13,38	21,27	5	52,27	Sangat Rendah
15	Pemerintah Kab. Indragiri Hilir	6.414	12,6	10,03	24,62	5	52,24	Sangat Rendah
16	Pemerintah Kota Sawahlunto	1.927	12,98	8,76	25	5	51,69	Sangat Rendah
17	Pemerintah Kab. Siak	5.433	12,86	9,41	24,41	5	51,68	Sangat Rendah
18	Pemerintah Kab. Tanah Datar	4.947	12,63	9,26	24,24	5	51,12	Sangat Rendah
19	Pemerintah Kab. Sijunjung	3.429	12,91	11,04	22,16	5	51,1	Sangat Rendah
20	Pemerintah Kab. Rokan Hilir	5.581	12,3	9,21	23,91	5	50,42	Sangat Rendah
21	Pemerintah Kab. Agam	5.748	13,12	11,21	21	5	50,32	Sangat Rendah
22	Pemerintah Kab. Indragiri Hulu	5.124	12,12	8,78	24,41	5	50,18	Sangat Rendah
23	Pemerintah Kab. Bengkalis	6.531	12,29	8,07	24,75	5	50,11	Sangat Rendah
24	Pemerintah Kab. Karimun	3.583	12,14	8,12	24,45	5	49,7	Sangat Rendah
25	Pemerintah Kota Solok	1.977	14,2	8,24	22,18	5	49,62	Sangat Rendah
26	Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti	2.648	11,93	9,71	22,75	5	49,39	Sangat Rendah
27	Pemerintah Kab. Bintan	3.127	12,21	8,92	23,23	5	49,35	Sangat Rendah
28	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	17.459	14,18	11,25	18,89	5	49,31	Sangat Rendah
29	Pemerintah Kab. Natuna	2.673	11,69	7,46	24,94	5	49,09	Sangat Rendah
30	Pemerintah Kota Dumai	3.747	13,18	8,16	22,75	5	49,07	Sangat Rendah
31	Pemerintah Kab. Pesisir Selatan	6.124	13,12	10,82	19,86	5	48,78	Sangat Rendah
32	Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas	1.743	12,38	5,48	25,03	5	47,8	Sangat Rendah
33	Pemerintah Kota Pekanbaru	6.896	13,33	7,84	21,02	5	47,18	Sangat Rendah
34	Pemerintah Kota Pariaman	2.118	13,58	7,68	19,53	5	45,78	Sangat Rendah
35	Pemerintah Kab. Solok	4.765	13,14	10,59	17	5	45,72	Sangat Rendah
36	Pemerintah Kab. Padang Pariaman	5.528	13,35	9,75	17,46	5	45,55	Sangat Rendah
37	Pemerintah Kab. Lingga	2.571	12,61	7,98	19,68	5	45,27	Sangat Rendah
38	Pemerintah Kab. Solok Selatan	3.298	13,27	7,23	19,71	5	45,2	Sangat Rendah
39	Pemerintah Kab. Rokan Hulu	5.204	12,43	9,25	17,65	5	44,33	Sangat Rendah
40	Pemerintah Kab. Kuantan Singingi	4.765	12,46	9,51	15,12	5	42,09	Sangat Rendah
41	Pemerintah Kab. Kep. Mentawai	2.399	12,12	5,36	10,79	5	33,14	Sangat Rendah
NILAI RATA-RATA		197.710	12,93	10,61	22,31	4,99	50,83	Sangat Rendah

NB. Data Resmi IP ASN 2021 adalah data yang diterbitkan oleh Kedeporian PMK BKN

Sangat rendahnya Indeks profesional ASN disebabkan, diantaranya:

1. Penempatan ASN tidak sesuai kualifikasi dan kompetensi;
2. Kurangnya pendidikan pelatihan yang diikuti oleh ASN, karena anggaran yang belum mendukung;
3. Kinerja belum optimal;
4. Disiplin kurang ditegakkan .

Upaya yang dilakukan untuk menaikkan Indeks Profesional ASN:

1. Penempatan ASN disesuaikan dengan kualifikasi dan kompetensi
2. Meningkatkan kompetensi ASN melalui bimtek, seminar maupun diklat
3. Meningkatkan kinerja .
4. penegakkan disiplin secara menyeluruh ke ASN

Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TAHUN			
				2021	2020	2019	2018
1	Indeks Pelayanan Publik	3,51	3,91	111%			
	Rata-rata capaian			111%			

➤ **Indeks Pelayanan Publik**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, tugas pemerintah adalah untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Hakekat Pelayanan Publik adalah pemberian pelayanan prima dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang merupakan perwujudan kewajiban Aparatur Pemerintah sebagai abdi masyarakat. Keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai dengan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2017 harus memenuhi 6 Aspek:

1. Aspek Kebijakan Pelayanan
2. Aspek Profesional SDM
3. Aspek Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik
4. Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik
5. Aspek Konsultasi Pengaduan
6. Aspek Inovasi

Dari hasil penilaian Penilaian Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara Republik Indonesia Tahun 2021 terhadap DPMPTSP dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil nilai Indeks Pelayanan Publik Kota Pariaman 3,91 (Baik).

Indikator Indeks Pelayanan Publik ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena merupakan indikator baru.

Hal yang menyebabkan nilai Indeks Pelayanan Publik baru mencapai 3,91 antara lain:

- 1 sarana dan prasarana pelayanan publik masih belum memenuhi standar

- 2 SDM belum memenuhi standar kompetensi
- 3 Sistem Informasi Pelayanan Publik belum optimal
- 4 Inovasi pelayanan publik belum optimal

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan nilai Indeks Pelayanan Publik antara lain:

- 1 meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan
- 2 meningkatkan kompetensi SDM
- 3 mengoptimalkan Sistem Informasi Pelayanan Publik
- 4 mengoptimalkan Inovasi pelayanan publik

Capaian Indikator dari sasaran Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintahan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari sasaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan
target akhir RPJMD 2018-2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD TAHUN					REALISASI		
	SATUAN	AKHIR RPJMD	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Indeks Pelayanan Publik	kategori	4,01	-	-	3,51	0	0	3,91 (111%)

Program yang mendukung sasaran ini diantaranya:

- 1) Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- 2) Peningkatan dan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan
- 3) Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 4) Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
- 5) Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan
- 6) E-Government
- 7) Program Persandian Untuk Pengamanan Informasi
- 8) Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Sektor
- 9) Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik
- 10) Perencanaan Pengembangan kota-kota menengah besar
- 11) Perencanaan Pembangunan Daerah
- 12) Perencanaan Pembangunan

- 13) Perencanaan Pembangunan Sosial
- 14) Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah
- 15) Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
- 16) Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
- 17) Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

MISI IV : Mewujudkan Kota Pesisir, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana

Untuk mewujudkan Misi IV, salah satunya adalah melalui peningkatan kualitas infrastruktur yang diukur dengan Indeks Infrastruktur Daerah, sebagai indikasi terwujudnya kota yang memenuhi kualitas infrastruktur yang memadai.

**Sasaran 1
Meningkatnya Kualitas Insfrastruktur**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Tahun		
				2021	2020	2019
1	Indeks Insfrastruktur Daerah	64,50	65,71	102%	117%	102%
	Rata-Rata Capaian			102%	117%	102%

Sumber : Hasil Olahan (2022)

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dari target Indeks Infrastruktur Daerah yang ditetapkan sebesar 64,50 pada tahun 2021 dapat terealisasi sebesar 65,71 dengan capaian sebesar 102%.

Jika dibandingkan antara target Tahun 2020 yaitu sebesar 65,45 dengan realisasi sebesar 76,50 atau dengan capaian sebesar 117%, terjadi penurunan capaian sebesar 15%. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan variabel/komponen dalam pengukuran kinerja indikator Indeks Infrastruktur Daerah pada tahun 2021 dibandingkan pengukuran pada tahun sebelumnya (tahun 2020), yang didasarkan kepada hasil telaah logis yang dilakukan melalui proses penyusunan pohon kinerja terkait isu infrastruktur.

Pada tahun 2021 metode pengukuran Indeks Infrastruktur Daerah dipengaruhi oleh 3 (tiga) variabel/komponen yaitu persentase jalan kondisi mantap, persentase drainase kondisi baik dan persentase irigasi kondisi baik, sedangkan metode pengukuran Indeks Infrastruktur pada tahun sebelumnya dipengaruhi oleh persentase jalan kondisi mantap, persentase, persentase

akses air minum layak, persentase kawasan tidak kumuh perkotaan, persentase sanitasi layak dan persentase sawah beririgasi, sebagaimana perbandingan formulasi berikut :

Indeks Infrastruktur Daerah (Tahun 2020)	=	20 % (Persentase jalan dalam kondisi mantap) + 20 % (Persentase Akses Air Minum Layak) + 20 % (Persentase Kawasan Tidak Kumuh Perkotaan + 20 % (Persentase Akses Sanitasi Layak) + 20 % (Persentase sawah yang beririgasi)
---	---	---

Indeks Infrastruktur Daerah (Tahun 2021)	=	$\frac{\text{Persentase jalan dalam kondisi mantap} + \text{Persentase drainase kondisi baik} + \text{Persentase Irigasi kondisi baik}}{3} \times 100$
---	---	--

Perubahan formulasi pengukuran kinerja sebagaimana di atas didasarkan kepada logical framework penyusunan pohon kinerja sasaran baru pada Misi IV RPJMD 2018-2023 yaitu sasaran Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni, dimana 3 (tiga) variabel pembentuk Indeks Infrastruktur Daerah yang digunakan pada tahun 2020, yaitu Persentase Akses Air Minum Layak + Persentase Kawasan Tidak Kumuh Perkotaan + Persentase Akses Sanitasi Layak, secara logika lebih relevan berpengaruh dalam mengukur indikator dalam mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni, yaitu Persentase Pengurangan Luas Permukiman Kumuh dan Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni. Sehingga variabel yang digunakan untuk mengukur Indeks Infrastruktur Daerah adalah variabel yang relevan dan berkorelasi langsung sebagai pembentuk Indeks Infrastruktur Daerah. Akibatnya perubahan formulasi pengukuran ini berimplikasi kepada realisasi capaian Indeks Infrastruktur Daerah, meskipun demikian capaian kinerja dapat terealisasi melebihi target yang ditetapkan. Capaian kinerja masing-masing variabel dapat dilihat sebagai berikut :

1) Persentase panjang jalan Kota dalam kondisi mantap

Tabel 3.13
Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Mantap

NO	KONDISI JALAN	TOTAL (Km)	PANJANG (Km)				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Kondisi baik	194,731			194,731		
2	Kondisi sedang	32,213			32,213		
3	Kondisi rusak ringan	12,913					
4	Kondisi rusak berat	28,430					
Total panjang jalan kota		268,287		223,72	226,94		

Sumber : Hasil Olahan Data Dinas PUPR dan Pertanahan Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa dari total panjang jalan yang merupakan ruas Jalan Kota pada tahun 2021 yaitu 268,287 km, terdapat 194,731 km atau 72,58 % jalan Kota dengan kondisi baik dan 32,213 km atau 12,01 % jalan dengan kondisi sedang. Sedangkan 41,34 km atau 15,41 % sisanya adalah jalan Kota dengan kondisi rusak ringan dan rusak berat.

Kondisi jalan mantap adalah akumulasi panjang jalan Kota dalam kondisi baik dan sedang, sehingga realisasi jalan kondisi mantap pada tahun 2021 yaitu sebesar 226,94 km atau sebesar 84,59 %, meningkat sebesar 3,22 km dibanding capaian tahun 2020 yaitu sebesar 223,72 km.

Untuk mendapatkan Persentase Panjang Jalan Kota dalam kondisi mantap dihitung dengan menggunakan formula yaitu :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase panjang jalan kota dalam kondisi mantap} &= \left(\frac{\text{Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi mantap : Panjang Jalan Seluruh Kota}}{\text{Panjang Jalan Seluruh Kota}} \right) \times 100 \% \\
 &= \left(\frac{226,94 \text{ km}}{268,287 \text{ km}} \right) \times 100\% \\
 &= 84,59 \%
 \end{aligned}$$

Sumber Data Dinas PUPR dan Pertanahan olahan 2021

2) Persentase panjang drainase kota dalam kondisi baik

Tabel 3.14
Panjang Drainase Kota Dalam Kondisi Baik

NO	NAMA DRAINASE	TOTAL (KM)	PANJANG (KM)				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Drainase primer	19,122	7,34	7,64	7,84		
2	Drainase sekunder	44,458	16,81	17,31	17,81		
Total		63,58	24,15	24,94	25,65		

Sumber : Hasil Olahan Data Dinas PUPR dan Pertanahan Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas terlihat realisasi panjang drainase dalam kondisi baik pada tahun 2021 yang dikategorikan kepada 2 kategori drainase, yaitu drainase primer dengan panjang 7,84 km meningkat sebesar 0,20 km dibanding tahun 2020 dengan realisasi sebesar 7,64 km, sehingga total capaian drainase dengan kondisi baik yaitu sebesar 25,65 km meningkat sebesar 0,71 km dibanding capaian pada tahun 2020 sebesar 24,94 km, dan jika dibandingkan dengan target sebesar 63,58 km pada tahun 2021 maka baru dapat diperoleh capaian sebesar 40,34 %. Penghitungan pencapaian Persentase Panjang Drainase Kota dalam Kondisi Baik dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase panjang drainase kota dalam kondisi baik} &= \frac{\text{Panjang drainase kota dalam kondisi baik}}{\text{Panjang seluruh drainase kota}} \times 100 \% \\
 &= \frac{(25,65 \text{ km} : 63,58 \text{ km}) \times 100\%}{40,34\%}
 \end{aligned}$$

Sumber Data Dinas PUPR dan Pertanahan olahan 2021

3) Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik.

Tabel 3.15
Panjang Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik

NO	NAMA IRIGASI	TOTAL (KM)	PANJANG (KM)		TOTAL (KM)	PANJANG (KM)		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	Irigasi Primer				1,605	1,303		
2	Irigasi Sekunder				56,578	41,051		
3	Irigasi Tersier				52,788	37,786		
		66,22	41,31	41,31	110,971	80,14		

Sumber : Hasil Olahan Data Dinas PUPR dan Pertanahan Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa dari total panjang jaringan irigasi sepanjang 110,971 km terdapat 80,14 km irigasi dengan kondisi baik atau capaian sebesar 72,22 % pada tahun 2021, meningkat sebesar 38,83 km atau 94 % dari realisasi panjang jaringan irigasi kondisi baik pada tahun 2020 sebesar 41,31 km. Penghitungan pencapaian Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik dihitung dengan formula :

$$\begin{aligned} \text{Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik} &= \frac{(\text{Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik: Panjang jaringan irigasi Seluruh Kota}) \times 100\%}{100} \\ &= (80,14 \text{ KM} : 110,971 \times 100\%) \\ &= 72,21\% \end{aligned}$$

Sumber Data Dinas PUPR dan Pertanahan olahan 2021

Berdasarkan penghitungan masing-masing variabel diatas, maka pengukuran capaian indikator Indeks Infrastruktur Daerah ini dapat dihitung dengan menggunakan formula yaitu :

$$\begin{aligned} \text{Indeks Infrastruktur Daerah} &= \frac{\{(\text{Persentase Panjang Jalan Kota dalam kondisi mantap} + \text{Persentase Panjang drainase kota dalam kondisi baik} + \text{Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik}) : 3\} \times 100\%}{100} \\ &= \{(84,59+40,34+72,21) : 3\} \times 100\% \\ &= 65,71\% \end{aligned}$$

Sumber Data Dinas PUPR dan Pertanahan olahan 2021

Capaian Indikator dari sasaran Meningkatnya Kualitas Insfrastruktur jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.16
Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari
sasaran Meningkatnya Kualitas Insfrastruktur dengan target akhir
RPJMD 2018-2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD TAHUN					REALISASI		
	SATUAN	AKHIR RPJMD	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Indeks Insfrastruktur Daerah	Nilai	70	60,20	65,45	65,45	61,48	76,50	65,71

Sumber : Hasil Olahan (2022)

Dari tabel perbandingan realiasi terhadap target per tahun di atas, terlihat bahwa jika dibandingkan realisasi capaian tahun 2021 dengan realisasi

capaian tahun 2020 terjadi penurunan sekitar 10,79 poin atau sebesar 14,10%. Selain itu jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, masih terdapat gap sebesar 4,29 poin antara realisasi capaian pada tahun 2021 sebesar 65,71 dengan target Indeks Infrastruktur Daerah pada akhir periode RPJMD yaitu sebesar 70. Dengan demikian perlu upaya dan strategi pencapaian pada 2 (dua) tahun sisa periode RPJMD 2018-2023 untuk mencapai target yang telah ditetapkan, terutama untuk realisasi capaian pada variabel pembentuk yang masih rendah, yaitu variabel persentase drainase dengan kondisi baik dengan capaian baru sebesar 40,34 %. Dalam upaya peningkatan capaian ini, khususnya peningkatan persentase drainase dengan kondisi baik, dimana untuk kategori drainase primer yang tidak menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pariaman atau drainase primer yang berada pada jalur lintas wilayah kabupaten/kota, maka membutuhkan dukungan pendanaan yang memadai baik melalui APBD Provinsi maupun fasilitasi pendanaan dari Pemerintah Pusat melalui APBN.

Beberapa program yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur daerah diantaranya adalah :

- 1) Pengelolaan Sumber Daya Air
- 2) Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase dan Gorong-gorong
- 3) Penyelenggaraan Jalan
- 4) Pengembangan Jasa Konstruksi
- 5) Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 6) Pengelolaan Izin Lokasi
- 7) Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
- 8) Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
- 9) Redistribusi Tanah , serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee
- 10) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Adapun alokasi anggaran untuk mencapai sasaran ini adalah sebesar Rp. 50.455.691.839,- ddengan realisasi sebesar Rp. 44.160.787.412,19,- atau 87,52% dengan realisasi fisik sebesar 87,26 %.

Sasaran 2

Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Tahun			
				2021	2020	2019	2018
1	Persentase Pengurangan Luas Permukiman Kumuh	21,81	42,81	196%	-	-	
2	Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni	80,24	77,21	96%	-	-	
	Rata-Rata Capaian			96%	0%	0%	

Sumber : Hasil Olahan (2022)

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa untuk indikator persentase pengurangan luas permukiman kumuh terealisasi pada tahun 2021 sebesar 42,81 % atau 196 % dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 21,81 %. Sedangkan untuk indikator persentase perumahan dan permukiman layak huni terealisasi sebesar 77,21 atau 96 % dari target sebesar 80,24 %. Sedangkan untuk perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya tidak terlihat karena sasaran maupun indikator ini mulai ditetapkan dan diukur untuk tahun 2021.

Untuk memperoleh informasi terkait realisasi pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni, diukur melalui 2 (dua) indikator, yaitu Persentase Pengurangan Luas Permukiman Kumuh dan Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni. Sasaran dan indikator ini adalah sasaran dan indikator baru dalam mendukung Misi IV RPJMD 2018-2023. Penambahan sasaran dan indikator ini didasarkan kepada proses telaah *logical framework* sebagaimana dituangkan pada pohon kinerja yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas perumahan dan permukiman layak huni, sebagai berikut :

a. Persentase Pengurangan Luasan Permukiman Kumuh

Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dengan menggunakan indikator/kriteria kumuh yang telah ditentukan oleh Kementerian PUPR, telah ditetapkan kawasan permukiman kumuh di Kota Pariaman dalam suatu Keputusan Walikota Pariaman pada tahun 2014 dan diperbaharui kembali pada tahun 2020. Dari SK Walikota Pariaman

Nomor : 444/050/2014 tahun 2014 terdapat luasan kawasan kumuh yaitu seluas 109,41 Ha.

Mulai tahun 2017 - 2019 telah dilakukan penanganan pada kawasan permukiman kumuh yaitu seluas 76,99 Ha atau 70,37 % dari total luas kawasan kumuh yang tersebar di 12 Desa/Kelurahan pada 4 (empat) Kecamatan se-Kota Pariaman, dan menyisakan kawasan permukiman kumuh seluas 32,42 Ha, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.17
Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh 2019

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Nama kawasan	Luas/ Ha	Keterangan Pengurangan Kumuh				
					2017	2018	2019	2020	2021
1	Pariaman Tengah	Kampung Perak	Kampung Perak	7,23					
2		Pondok Duo							
3		Ujung Batung	Ujung Batung	24		9,6			
4		Rel Kereta Api				2,8			
5		Lohong	Kampung Kaliang	8,67		0,66			
6		Karan Aur	Karan Aur	7,62		8,06			
7		Pasir	Pasir	3,19	1,21				
8	Pariaman Selatan	BalaiKuraitaji	Pasar Kuraitaji	5,42		2,71			
9	Pariaman Selatan	Taluk	Pasir Sikadondong	32,99		11			
10	Pariaman Utara	Marunggi				25,44			
11		Pasir Sunur		0,15	3,17				
12		Naras Hilir	Naras	20,37			4,92		
13		Naras 1					4,74		
14	Balai Naras				2,3	0,23			
		JUMLAH		109,41	1,36	65,74	9,89		
		SISA KUMUH 2020		32,42		76,99			

Sumber : Korkot KOTAKU Pariaman (2022)

Untuk melakukan pengukuran indikator Persentase Pengurangan Luasan Permukiman Kumuh dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

% Pengurangan Luasan Permukiman Kumuh =	$\frac{\text{Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani (Kumulatif)}}{\text{Total Luasan Kawasan Permukiman Kumuh}} \times 100\%$
---	--

Sehingga Persentase Pengurangan Luasan Permukiman Kumuh yang ditangani sampai dengan tahun 2019 adalah sebesar 70,37 % :

% Pengurangan Luasan Permukiman Kumuh s.d Tahun 2019 =	$\frac{76,99}{109,41} \times 100\% = 70,37\%$
--	---

Pada tahun 2020, kembali dilakukan pendataan ulang karena terindikasi adanya potensi lokasi kawasan kumuh baru, sehingga menambah luasan kawasan kumuh yang ditangani berdasarkan Keputusan Walikota Pariaman Nomor 277/050/2020 tahun 2020 adalah 184,36 Ha.

Dengan demikian total Luas kawasan kumuh yang akan ditangani adalah akumulasi luas kawasan kumuh hingga tahun 2019 (sesuai SK tahun 2014) yaitu 109,41 Ha ditambah luas kawasan kumuh baru (sesuai SK tahun 2020) yaitu seluas 184,36 Ha, dikurangi dengan sisa luas penanganan hingga tahun 2019 seluas 32,42 Ha), sehingga diperoleh total luas kawasan kumuh pada tahun 2020 yaitu 261,35 Ha.

Kawasan kumuh yang ditetapkan pada tahun 2020 berada pada 16 lokasi baru yang tersebar di 16 Desa/Kelurahan ditambah 6 lokasi lama sesuai SK Lokasi Kawasan Kumuh yang ditetapkan tahun 2014, sebagaimana tabel lokasi kawasan kumuh tahun 2020 berikut :

Tabel. 3.18
Lokasi Kawasan Kumuh Tahun 2020

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Nama kawasan	Luas/Ha	PENGURANGAN KUMUH	
					2020	2021
1	Pariaman Utara	Balai Naras	Kawasan Naras	6.60 Ha	6,6	
2	Pariaman Utara	Tungka Selatan	Kawasan Tungka	10,84		
		Sikapak Barat				
3	Pariaman Utara	Manggung	Kawasan Manggung	13,4		
4	Pariaman Utara dan Pariaman Tengah	Ampalu	Kawasan Pauh barat-Ampalu	11,83		
		Apar				
		Pauh Barat			13,22	
5	Pariaman Tengah	Cimparuah	Kawasan cimparuah	19,62		
6	Pariaman Tengah	Jati hilir	Kawasan Jati	6,51		
7	Pariaman Tengah	Kampung Pondok	Kawasan Pondok	3,63		
8	Pariaman Tengah	Jawi-Jawi 1	Kawasan Jawi-Jawi	14.15		1,92
		Jawi-Jawi 2				
9	Pariaman Tengah	Karan Aur	Kawasan Pasie lohong dan sekitar	26,36		26,36
		Kp Perak				
		Lohong				
		Pasir				
		Pondok 2				
10	Pariaman Selatan	Palak Aneh	Kawasan Palak Aneh	12,81		
11	Pariaman Selatan	Pauh Kuraitaji	Kawasan Kuraitaji	7,08		
12	Pariaman Selatan	Punggung lading	Kaw Punggung lading	19,73		
13	Pariaman Timur	Kampung Baru Padusunan	Kawasan padusunan	12,02		
14	Pariaman Selatan	Sungai Sirah	Kawasan Sungai Sirah	6,56		
JUMLAH				184,36	6,6	28,28
PENGURANGAN KUMUH				34,88	19%	
SISA KUMUH 2022-2024				149,48	81%	

Sumber : Korkot KOTAKU Pariaman (2022)

Sedangkan total penanganan yang dilakukan pada tahun 2020 adalah seluas 6,6 Ha, dengan lokasi penanganan pada kawasan kumuh Naras berada di Desa Balai Naras. Sehingga akumulasi penanganan hingga tahun 2020 yaitu sebesar 76,99 Ha + 6,6 Ha yaitu sebesar 83,59 Ha. Dengan demikian Persentase Pengurangan Luasan Permukiman Kumuh yang ditangani sampai tahun 2020 adalah sebesar 31,98 % :

% Pengurangan Luasan Permukiman Kumuh s.d Tahun 2020 =	$\frac{(76,99 + 6,6)}{261,35} \times 100\% = 31,98\%$
--	---

Begitu juga dengan penanganan pada tahun 2021, dilakukan penanganan kawasan kumuh seluas 28,28 Ha, sehingga total luas penanganan kawasan kumuh hingga tahun 2021 adalah akumulasi penanganan 76,99 Ha + 6,6 Ha + 28,28 Ha, dengan total seluas 111,87 Ha. Dengan demikian persentase pengurangan luas permukiman kumuh hingga tahun 2021 adalah sebesar 42,80 %.

% Pengurangan Luasan Permukiman Kumuh s.d Tahun 2021 =	$\frac{(76,99 + 6,6 + 28,28)}{261,35} \times 100\% = 42,80 \%$
--	--

Beberapa faktor pendukung pencapaian kinerja pengurangan luasan kawasan permukiman kumuh, antara lain adanya program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) melalui Kementerian PUPR yang memberikan fasilitasi pendanaan maupun pendampingan dalam pelaksanaan program. Selain itu adanya kolaborasi penanganan melalui program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait, meliputi program sanitasi, air bersih, pengelolaan sampah, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, proteksi dan penanganan bahaya kebakaran, dan kegiatan terkait lainnya. Begitu juga adanya kolaborasi pendanaan penanganan kawasan kumuh yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, program Bantuan Bedah Rumah bagi Masyarakat Miskin yang difasilitasi Dinas Sosial dengan sumber pendanaan melalui BASIGI (Badoncek dan Sedekah Pagi), Bantuan dari BAZNAS, Donatur Komunitas serta dari Corporate Social Responsibility (CSR).

Selain itu adanya kebijakan Pemerintah Kota Pariaman terkait penggunaan dana desa untuk penanganan kawasan permukiman kumuh, dalam bentuk kegiatan penyediaan/perbaikan fasilitas publik, meliputi pengelolaan sampah, perbaikan jalan lingkungan maupun drainase lingkungan permukiman.

b. Persentase Perumahan Permukiman Layak Huni

Sedangkan terkait indikator Persentase Perumahan Layak Huni dilakukan pengukuran berdasarkan basis data jumlah rumah tahun 2018 yaitu sebanyak 17.748 unit rumah dikurang jumlah rumah tidak layak huni

sebanyak 3.403 unit (KOTAKU, 2020), sehingga diperoleh jumlah rumah layak huni yaitu sebanyak 14.345 unit. Dari jumlah rumah yang layak huni tersebut dilakukan pengukuran kembali tidak hanya didasarkan kepada variabel kondisi rumah yang layak huni, tetapi juga mempertimbangkan akses dan kondisi ketersediaan air minum yang layak serta sanitasi yang layak dan aman.

Tabel 3.19
Capaian Variabel Pembentuk Indikator Perumahan Permukiman Layak Huni

Tahun	% Akses Sanitasi Layak Aman	% Akses Air Minum Layak	% Perumahan Layak Huni
2021	52,59	91,10	87,95
2020	48,87	89,43	87,67
2019	48,33	88,75	87,11

Sumber : Dinas Perkim LH (2022)

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian persentase akses air minum layak sudah relatif tinggi yaitu sebesar 91,10 %, dimana terjadi peningkatan hanya sebesar 1,67 % dibanding tahun 2020 dengan realisasi sebesar 89,43 % serta hanya meningkat sebesar 2,35 % dibanding tahun 2019. Kondisi ini merupakan pencapaian akumulasi beberapa tahun sebelumnya, yang dicapai melalui kinerja layanan air minum pada UPTD Air Bersih Dinas Perkim LH, ditambah fasilitas penyediaan sarana air minum yang dikelola oleh lembaga/masyarakat. Peningkatan capaian pada tahun 2021 diperoleh dari adanya penambahan sambungan rumah (SR) baru baik pada Kawasan Komplek Perumahan yang baru dibangun, maupun bagi rumah/unit perorangan. Kemudian untuk capaian perumahan layak huni juga sudah relatif baik yaitu sebesar 87,95 %, meningkat hanya sebesar 0,28 % dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2020, dan meningkat sebesar 0,84 % dibandingkan realisasi pada tahun 2019. Pencapaian selama ini didominasi program bantuan rumah layak huni yang pendanaannya bersumber dari APBN mulai tahun 2019 hingga tahun 2021, baik melalui Program BSPS yang didanai Provinsi Sumatera Barat, DAK Perumahan (APBN), dan khusus pada tahun 2021 telah direalisasikan sebanyak 49

unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya menjadi rumah layak huni melalui DAK Perumahan Tahun 2021.

Selanjutnya untuk capaian akses sanitasi layak relatif masih rendah yaitu baru sebesar 52,59 % meningkat sebesar 3,72 % dibandingkan realisasi pada tahun 2020 yaitu sebesar 48,87 %, dan meningkat sebesar 4,26 % dibandingkan realisasi pada tahun 2019 yaitu sebesar 48,33 %. Artinya perlu dioptimalkan lagi capaian akses sanitasi layak dan aman melalui sinergitas program dan kegiatan, serta kolaborasi dengan berbagai sumber pendanaan. Program yang dilaksanakan dan mendukung pencapaian pada tahun 2021 yaitu Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan Kegiatan Pengelolaan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat melalui pendanaan DAU dan DAK Tahun 2021, Program Air Limbah Setempat (ALS) berupa Pembangunan Tanki Septik Individual dan MCK sebanyak 500 unit serta pembangunan Tangki Septik Komunal sebanyak 10 unit.

Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Tahun			
				2021	2020	2019	2018
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	59,10	54,93	93%	110%	73%	
	Rata-Rata Capaian			93%	110%	73%	

Dari tabel sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan target 59,10 realisasi 54,93 dengan capaian 93%, jika dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2019 adanya fluktuatif angka capaian Indeks Kualitas Lingkungan.

Indeks Kualitas Lingkungan dihitung dari Indeks Pemantauan Kualitas Lingkungan, Indeks Pemantauan Kualitas Udara, dan Indeks Pemantauan Kualitas Tutupan Lahan.

Dengan angka 54,63 Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Pariaman masih kurang. Jika dibandingkan dengan Tahun 2020 Indeks Kualitas Lingkungan Kota Pariaman adalah 60,29 (kurang), sedangkan tahun 2019 dengan target 64,42 realisasi capaian 47,24.

Adapun formula untuk menghitung indeks kualitas lingkungan :

Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan adalah:

$$IKLH = 30\% IKU + 30\% IKA + 40\% IKTL$$

$$IKLH = (30\% \times 94,76) + (30\% \times 41,67) + (40\% \times 28,51) = 60,29 \text{ poin}$$

Predikat Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH) Tahun 2020 " Kurang Baik " (60,2) tapi telah melebihi target yang ditetapkan 55.

Target Indeks Kualitas Lingkungan Kota Pariaman pada RPJMD tahun 2021 sebesar 63,3 ***namun target ini tidak dapat tercapai, disebabkan karena:***

- Terbatasnya anggaran yang dialokasikan sehingga pembelian reagen, alat laboratorium dan kalibrasi alat yang diperlukan untuk melakukan analisa parameter tidak mencukupi.
- Jumlah titik pengambilan sampel sangat terbatas karena keterbatasan anggaran, sehingga pemantauan kualitas air tidak dapat dilakukan secara maksimal
- Terbatasnya SDM untuk menganalisa sampel air permukaan Tidak tersedianya sarana transportasi untuk mencapai lokasi titik pengambilan sampel air permukaan.
- Nilai IKA Kota Pariaman tahun 2019 tidak bisa dicapai sesuai target IKA tahun 2019 yaitu 43. Karena untuk mendapatkan nilai IKA Kota Pariaman, pemantauan dalam setahun dilakukan maksimal 5 kali pemantauan dengan 7 parameter wajib, seperti DO, BOD, COD, pospat, total coli, e-coli dan TSS
- frekuensi pengujian sampel ideal dilakukan 5 kali dalam 1 tahun, tetapi yang dapat dilakukan pada tahun 2018 hanya 2 kali 1 tahun.
- Efisiensi sumber daya manusia untuk pencapaian indikator kinerja Indeks lingkungan Kualitas Lingkungan Hidup ini melibatkan Bidang P2KLH sebanyak 5 orang PNS dan UPT. Laboratorium Lingkungan (sebanyak 8 orang PNS dan tenaga honor sebanyak 12 orang).

Solusinya yang dapat ditempuh untuk mencapai target yang telah ditetapkan adalah :

- Untuk kelengkapan sarana prasarana perlu dukungan dana DAK dan APBN diusulkan pada tahun berikutnya.
- Untuk efisiensi anggaran yang terjadi pada tahun 2021, diharapkan pada tahun berikutnya tidak terjadi lagi.
- Meskipun demikian untuk indeks kualitas air Kota Pariaman dengan angka 34,8 tersebut masih belum memenuhi baku mutu.
- Dalam mewujudkan indikator kinerja dimanfaatkan sumber dana dari APBD.

Realisasi Capaian Indeks Kualitas Lingkungan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2018-2023, dapat dilihat pada tabel:

Tabel 3.20
Perbandingan Realisasi Capaian Indeks Kualitas Lingkungan dengan target akhir RPJMD 2018-2023.

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD TAHUN				REALISASI		
	AKHIR RPJMD	2019	2020	2021	2019	2020	20221
Indeks Kualitas Lingkungan	64,06	64,42	55	59,10	47,24 (Waspada)	60,29 (Kurang)	54,93 (Waspada)

Program yang mendukung sasaran ini adalah

- 1) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- 2) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- 3) Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- 4) Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
- 5) Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- 6) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
- 7) Perencanaan Tata Ruang
- 8) Pemanfaatan Ruang
- 9) Pengembangan Lingkungan Sehat
- 10) Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- 11) Pengembangan Kota Hijau

Anggaran yang dialokasikan untuk 2 sasaran ini, yaitu sasaran Meningkatkan Kualitas Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni, dan Sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan adalah sebesar Rp. 28.083.337.805,27 dengan realisasi Rp. 25,032.140.527,- atau 89%.

Sasaran 4 Meningkatnya Mitigasi Bencana

No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian Tahun		
						2021	2020	2019
1	Indeks Resiko Bencana	171	Tinggi	171,20	Tinggi	100%	100%	100%
	Rata-rata capaian					100%	100%	100%

Indonesia yang terletak dikawasan Cincin Api Pasifik memang memiliki potensi alam yang tinggi, dimana Indonesi tidak henti-hentinya ditimpa musibah bencana, baik itu gempa, tanah longsor, banjir, tsunami maupun gunung meletus. Provinsi Sumatera Barat berada diantara dua lempeng besar (Lempeng Eurasia dan Lempeng Indo Australia) dan Patahan Semangko. Didekat pertemuan lempeng terdapat patahan Mentawai. Ketiganya merupakan daerah Seismik aktif. Menurut catatan ahli gempa, Wilayah Sumatera Barat memiliki siklus 200 tahun gempa besar yang pada awal abad 21 telah memasuki masa berulangnya siklus.

Kota Pariaman salah satu Kota di Sumatera Barat yang terletak didaerah pantai dan merupakan daerah zona merah bencana alam karena letak Geografis Kota Pariaman yang memanjang di sepanjang Pantai Barat Sumatera yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, seperti Gempa yang terjadi di tahun 30 September 2009 yang berkekuatan 7.6 skala richter yang mengakibatkan banyaknya jatuh korban dari bencana tersebut.

Penanganan bencana di dunia telah mengalami perubahan paradigma yaitu dari responsif menjadi preventif, dari sektoral menjadi multi sektor, dari tanggung jawab pemerintah semata menjadi tanggung jawab bersama, dari sentralisasi menjadi desentralisasi dan dari tanggap darurat menjadi pengurangan risiko bencana •

Pengurangan risiko bencana menjadi sangat penting karena :

- 1) bencana adalah masalah yang kompleks yaitu dari faktor lingkungan hingga pembangunan;

- 2) kesiapan secara konvensional perlu, namun belum lengkap dan menyeluruh;
- 3) pemaduan dan pengarustamaan pengurangan risiko bencana dalam pengambilan keputusan dan kegiatan sehari-hari memberikan kontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan.

Indeks Ketahanan Daerah merupakan instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap.

Komponen penyusun indeks resiko bencana terdiri atas tiga komponen yaitu indeks kapasitas, kerentanan dan ancaman. Oleh karenanya dengan Indeks Ketahanan Daerah yang mengukur kapasitas suatu daerah dapat dilakukan monitoring dan evaluasi naik dan turunnya indeks resiko bencana di daerah.

Dari Indeks Ketahanan Daerah, maka Kota Pariaman mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan langkah tindak lanjut yang dilakukan untuk menurunkan resiko.

Kota Pariaman mempunyai 10 potensi terhadap ancaman bencana seperti: gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan, longsor, angin puting beliung, abrasi pantai, penyakit epidemik, kebakaran lahan dan perumahan serta kegagalan teknologi.

Dari 10 potensi bencana yang ada tersebut, yang paling besar risikonya adalah gempa bumi dan tsunami, karena menimbulkan kerusakan yang cukup besar, untuk itu kita perlu memperbanyak tanaman di sepanjang pantai Pariaman, seperti pohon pinago, kelapa dan lainnya sehingga dapat meminimalisasi dampak tsunami apabila terjadi di Kota Pariaman.

Kota Pariaman berada di zona merah kawasan rawan bencana. “Untuk itu Pemerintah daerah dan masyarakat perlu menyiapkan diri dalam menghadapi bencana. Baik prabencana, saat terjadi bencana maupun pascabencana.”

Kota Pariaman telah membentuk 71 KSB (Kelompok Siaga Bencana) di 71 desa/kelurahan. Juga punya beberapa desa tangguh bencana, serta melatih dan membentuk KSBS (kelompok Siaga Bencana Sekolah).

“Tidak hanya dari pemerintah saja. Respons terhadap tanggap darurat bencana itu juga menumbuhkan kesadaran dari masyarakat, dimana mereka membentuk organisasi dan lembaga penanggulangan bencana berbasis

masyarakat, seperti Forum Masjid Peduli Bencana dan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB).

Massa yang tergabung dalam organisasi yang peduli terhadap tanggap bencana di Kota Pariaman, saat ini mencapai 1.400 orang. Kelompok-kelompok ini sudah diberi pelatihan kerelawanan siaga bencana.

Ada beberapa upaya yang harus dilakukan untuk menaggulangi resiko bencana, yaitu: pembuatan peta rawan dan peta resiko antara lain:

- 1) mengidentifikasi wilayah yang dianggap memiliki resiko tinggi terjadinya bencana alam, dan
- 2) mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi wilayah untuk selanjutnya melakukan persiapan rencana pengelolaan bencana wilayah.

Pada tahun 2021 InaRISK BNPB telah mengeluarkan nilai Indeks Resiko Bencana Kota Pariaman sebesar 171,20 (tinggi). InaRISK merupakan portal kajian risiko bencana yang menampilkan informasi ancaman bencana, kerentanan yang mencakup populasi, kerugian fisik, ekonomi, dan lingkungan, kapasitas, serta risiko bencana. Dengan InaRISK, kita dapat mengetahui risiko bencana di wilayah kita dan mengetahui langkah yang perlu dilakukan untuk mengurangi risiko bencana.

Indeks Ketahanan Daerah dapat diukur dengan 71 indikator yang tertuang dalam 6 kegiatan yaitu, penguatan kebijakan dan kelembagaan, pengkajian resiko dan perencanaan terpadu, pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik, kawasan tematik kawasan rawan bencana, peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana dan pengembangan sistem pemulihan bencana.

Kota Pariaman sejak tahun 2012 telah membangun infrastruktur mitigasi struktural maupun non struktural sampai saat ini. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha, tersedianya dokumen Kakjian Resiko Bencana (KRB) dan Penanganan Resiko Bencana (PRB), tersedianya rambu evakuasi, serta pelayanan tanggap darurat yang cukup optimal telah meningkatkan kepercayaan masyarakat kota pariaman terhadap pemerintah kota dalam penanggulangan bencana. namun dalam beberapa tahun terakhir sejak pandemi covid-19, kemampuan keuangan pemerintah mengakibatkan terjadinya penurunan aktivitas dalam penanggulangan bencana dokumen

KRB dan PRB yang expired, infrastruktur yg tidak terawat serta belanja operasional yg kurang memadai mengakibatkan terjadinya penurunan kapasitas masyarakat dan pemerintah dalam penanggulangan bencana. Oleh sebab itu cukup wajar jika indeks resiko bencana Kota Pariaman kembali pada angka 171, 20.

Capaian Indikator dari sasaran Meningkatnya Mitigasi Bencana jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2018-2023 dapat dilihat pada tabel:

Tabel 3.21
Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari
sasaran Meningkatnya Mitigasi Bencana dengan
target akhir RPJMD 2018-2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD TAHUN					REALISASI		
	SATUAN	AKHIR RPJMD	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Indeks Resiko Bencana	Kategori	171	171	171	171	171	171	171,2

Adapun alokasi Anggaran untuk mencapai sasaran ini adalah sebesar Rp. 2.994.433.435 dengan realisasi Rp. 2.917.099.595 (97,42%)

Program yang mendukung sasaran ini:

- 1) Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
- 2) Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
- 3) Pengendalian Banjir
- 4) Program Penanganan Bencana

Sasaran 5
Terwujudnya Rasa Tertib dan Aman Dalam Kehidupan Masyarakat

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Tahun		
				2021	2020	2019
1	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	66,7	63,49	95%	-	-
	Rata-rata capaian			95%	-	-

Sasaran Terwujudnya Rasa Tertib dan Aman dalam Kehidupan Masyarakat dengan terdapat satu Indikator, yaitu Indeks Ketentraman dan Ketertiban target 66,7 realisasi 60 dengan capaian 96%.

Capaian Sasaran Terwujudnya Rasa Tertib dan Aman dalam Kehidupan Masyarakat dengan indikator Ketentraman dan Ketertiban ini tidak dapat dibandingkan dengan Tahun 2020 dan 2019, Sasaran dan Indikator ini merupakan perubahan dari Sasaran Terwujudnya Ketertiban dan

Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial dengan Indikator Indeks Keamanan dan Ketertiban, variabel penghitungannya berbeda..

Indeks Ketentraman dan Ketertiban adalah sebuah indeks yang menggambarkan pencapaian dan tingkat ketentraman dan ketertiban. Indeks ini dapat dihitung dengan menganalisis beberapa kegiatan yang berpengaruh secara langsung terhadap Penegakan Ketentraman dan Ketertiban, dalam formula penghitungannya indikator ini diperoleh dari :

1.	Persentase penyelesaian pelanggaran K3	=	$\frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran K3 yang diselesaikan}}{\text{Target Kasus K3 yang terjadi}}$	X	30%
2.	Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	=	$\frac{\text{Jumlah gangguan ketertiban umum dan ketentraman yg ditangani}}{\text{Target gangguan ketertiban umum dan ketentraman yang terjadi}}$	X	30%
3.	Persentase peningkatan kapasitas Pol PP	=	$\frac{\text{Jumlah Pol PP yang terlatih}}{\text{Jumlah Pol PP}}$	X	20%
4.	Persentase desa/kelurahan yg melaksanakan perlindungan masyarakat	=	$\frac{\text{Jumlah desa/kelurahan yang telah melaksanakan perlindungan masyarakat}}{\text{Jumlah desa/kelurahan}}$	X	20%

a. Jumlah Kasus Pelanggaran K3 yang Diselesaikan

Pada tahun 2021 output tingkat pelanggaran Peraturan Daerah Nomor Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2006 tentang K3, Peraturan Daerah Nomor Kota Pariaman Nomor 12 Tahun 2012/Peraturan Walikota Pariaman Nomor 40 Tahun 2016 tentang Reklame, Peraturan Daerah Nomor Kota Pariaman Nomor 14 Tahun 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan eskalasinya relative.

Output jumlah Perda yang ditegakkan ini didapat dari kegiatan Operasional Penegakan Perda, kegiatan ini dilaksanakan berupa operasional lapangan dalam bentuk razia, penertiban dan eksekusi terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melanggar Perda di wilayah Kota Pariaman. Kegiatan razia dilakukan untuk penegakan Perda yang berhubungan razia pelajar yang berkeliaran diwaktu jam sekolah, razia warnet, razia IMB dan kegiatan lain yang menyangkut Perda K3. Kegiatan penertiban dilakukan untuk penegakan Perda K3 seperti penertiban PKL, IMB, Orgen Tunggal (didalam Perda Kota Pariaman Orgen

Tunggal yang main di malam hari hanya diperbolehkan sampai pukul 00.00 WIB, pakaian biduanitanya harus sopan dan sesuai dengan norma yang berlaku di daerah Kota Pariaman), dan kegiatan lain yang berhubungan dengan K3. Kegiatan pembinaan dilakukan terhadap pelanggar Perda yang terjaring dalam kegiatan operasional Satpol.PP. Kegiatan eksekusi dilakukan terhadap masalah yang telah diproses oleh PPNS.

Capaian Sub Indikator 1.

$$\text{Sub Indikator 1.} = \frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran K3 yang diselesaikan}}{\text{Target Kasus K3 yang terjadi}} \times 30\%$$

$$\text{Sub Indikator 1.} = 74 / 151 * 30 \% = 14,70 \%$$

b. Jumlah Kasus Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Output Jumlah Kasus Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, pengukuran indikator ini dapat dihitung dengan menganalisa beberapa kegiatan yang berpengaruh secara langsung terhadap gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, paling banyak pelanggaran meliputi Perda 10 Tahun 2013 tentang Penyakit masarakat, Perda 10 Tahun 2018 Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat, serta Perda Prov Sumatera Barat No 6 Tahun 2020 tentang Prokes Covid 19.

Output jumlah Perda yang ditegakkan ini didapat dari kegiatan Operasional Penegakan Perda, kegiatan ini dilaksanakan berupa operasional lapangan dalam bentuk razia, penertiban dan eksekusi terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melanggar Perda dan mengganggu ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kota Pariaman. Kegiatan razia dilakukan untuk penegakan Perda yang berhubungan dengan Penyakit Masyarakat (Pekat) dan maksiat. Kegiatan pembinaan dilakukan terhadap pelanggar Perda yang terjaring dalam kegiatan operasional Satpol.PP. Kegiatan eksekusi dilakukan terhadap masalah yang telah diproses oleh PPNS. Di lapangan Tim penyidik melakukan penegakan prokes Covid 19 (pakai aplikasi (Sipelada) sistem pelaopran pelanggaran perda.

Capaian Sub Indikator 2.

$$\text{Sub Indikator 2} = \frac{\text{Jumlah gangguan ketertiban umum dan ketentraman yg ditangani}}{\text{Target gangguan ketertiban umum dan ketentraman yang terjadi}} \times 30\%$$

$$\text{Sub Indikator 2.} = 1256 / 3228 * 30 \% = 11.67 \%$$

c. Persentase Peningkatan Kapasitas Pol PP

Eksistensi satuan polisi pamong praja (satpol pp) merupakan salah satu kekuatan terdepan yang diandalkan sebagai perangkat daerah dalam penegakkan peraturan daerah sesuai dgn peraturan perundang-undangan yang berlaku, satuan polisi pamong praja dituntut harus memahami dasar hukum dan pijakan tupoksinya dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pariaman telah memberikan Bimbingan Teknik Peningkatan Kapasitas bagi para anggota Satpol PP. Bimtek ini sudah berlangsung mulai dari tahun 2018 s/d 2021 di Secata Padang Panjang bagi ASN dan di Kota Pariaman bagi Banpol PP, sebanyak 28 orang ASN dari 55 orang sudah mengikuti pendidikan dasar pol pp, pengamanan VIP, pelatihan kebencanaan, Informan, dan penyidik, dan sebanyak 127 orang Non ASN yang tergabung dalam Banpol PP sudah mengikuti latihan dasar Pol.PP. dari didalam pelaksanaan bimteknya ada beberapa materi yang disampaikan. Diantaranya, tentang peran Linmas dan Satpol PP, mekanisme dan prosedur tindakan represif non yustisial, teknik komunikasi, negoisasi dan mediasi penanganan unjuk rasa, SOP penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, dengan bekal yang diberikan, para anggota Satpol PP bisa meningkatkan pengetahuannya, lebih trampil dan lebih professional,

Capaian Sub Indikator 3.

$$\text{Sub Indikator 3.} = \frac{\text{Jumlah Pol PP yang terlatih}}{\text{Jumlah Pol PP}} \times 20\%$$

$$\text{Sub Indikator 3.} = 155 / 182 * 20 \% = 17.03 \%$$

d. Persentase Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat

Pengertian Satuan Perlindungan Masyarakat dapat ditemukan pada Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban, Dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada pasal 1 butir 1 yaitu : Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satuan Linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

Satuan Perlindungan Masyarakat, pada desa dan kelurahan di Kota Pariaman memakai istilah Dubalang (bahasa daerah), satuan perlindungan masyarakat/dubalang sudah terbentuk di seluruh desa dan kelurahan yang terdiri dari 71 desa dan kelurahan.

Capaian Sub Indikator 4.

$$\text{Sub Indikator 4} = \frac{\text{Jumlah desa/kelurahan yang telah melaksanakan perlindungan masyarakat}}{\text{Jumlah desa/kelurahan}} \times 20\%$$

$$\text{Sub Indikator 4.} = 71 / 71 * 20 \% = 20.00 \%$$

Hasil Indeks Ketenteraman dan Ketertiban (IKK) :

Sub Indikator 1 + Sub Indikator 2 + Sub Indikator 3 + Sub Indikator 4.

$$\text{Hasil IKK : } 14,70 + 11,67 + 17,03 + 20,00 = 63,49.$$

Capaian Indikator dari sasaran Terwujudnya Rasa Tertib dan Aman dalam Kehidupan Masyarakat dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2018-2023 dapat dilihat pada tabel:

Tabel 3.22
Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari
sasaran Terwujudnya Rasa Tertib dan Aman dalam Kehidupan
Masyaakat dengan target akhir RPJMD 2018-2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD TAHUN					REALISASI		
	SATUAN	AKHIR RPJMD	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Indeks	70,4	-	-	66,7	-	-	63,49 (95%)

Dari Perbandingan realisasi ini dapat dilihat, bahwa target diakhir RPJMD Indeks Ketentraman dan Ketertiban adalah 70,4 sedangkan realisasi tahun 2021 baru 63,49 masih terdapat gap sebesar 6,91. Untuk mencapai target di akhir RPMD masih perlu kerja yang optimal dari Pemerintah Kota Pariaman.

Program yang mendukung sasaran ini adalah:

- 1) Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- 2) Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
- 3) Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- 4) Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
- 5) Pendidikan Politik Masyarakat
- 6) Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

MISI V: Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif yang berbasis Lokal

**Sasaran 1
Meningkatnya Investasi**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Tahun		
			2021	2020	2019
%pertumbuhan Investasi	1,7%	-22%	-1294%	8798%	467%
Rata-rata capaian			-1294%	8798%	467%

Dari tabel sasaran Meningkatnya investasi dengan Indikator Persentase Pertumbuhan Investasi target 1,7% realisasi -22% dengan capaian -10294%.

Adapun angka realisasi 22% didapat dari:

$$\frac{\text{Realisasi investasi tahun 2021} - \text{Realisasi investasi tahun 2020}}{\text{Realisasi investasi tahun 2021}} \times 100 \%$$

$$= \frac{\text{Rp. 34.032.497.591,-} - \text{Rp.41.544.050.000,-}}{\text{Rp. 34.032.497.591,-}} \times 100 \% = - 22 \%$$

Jika dibandingkan mulai dari tahun 2018 sampai 2021 Tahun 2020 realisasi dan pertumbuhan investasi cukup fluktuatif, dimana dari tahun 2018 ke 2019 pertumbuhan investasi sebesar 14%, 2019 ke 2020 pertumbuhan investasi naik 43,99% sedangkan 2020 turun sangat tajam - 22%.

Adapun Realisasi Investasi Kota Pariaman dari Tahun 2019-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.23
Realisasi Investasi Kota Pariaman dari Tahun 2019-2021

TAHUN	REALISASI INVESTASI	PERSENTASE
2018	Rp 20.000.000.000	
2019	23.269.261.000	14%
2020	41.544.050.000	43,99%
2021	34.032.497.591	-22%

Realisasi nilai investasi per 31 Desember 2021 diambil secara online melalui aplikasi OSS, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.24
Realisasi Nilai Investasi per 31 Desember 2021

No	Tanggal Laporan	No Laporan	Nama Perusahaan	Proyek	Nilai Tambahan Realisasi Modal Tetap
1	2021-04-06	LK895073	PT. DOKA BESTARINDO NUSANTARA	(1377) Kota Pariaman - (68110) Real Estate Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	1,420,000,000
	2021-07-07	LK1042925	PT. DOKA BESTARINDO NUSANTARA	(1377) Kota Pariaman - (68110) Real Estate Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	500,000,000
	2021-10-12	LK1192880	PT. DOKA BESTARINDO NUSANTARA	(1377) Kota Pariaman - (68200) Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	750,000,000
	2022-01-10	LK1304935	PT. DOKA BESTARINDO NUSANTARA	(1377) Kota Pariaman - (68200) Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	210,000,000
2	2021-04-08	LK908459	PT. LANEFA KARYA PERSADA	(1377) Kota Pariaman - (68110) Real Estate	888,000,000
	2021-04-08	LK908557	PT. LANEFA KARYA PERSADA	(1377) Kota Pariaman - (68110) Real Estate Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	568,000,000
	2021-04-08	LK909369	PT. LANEFA KARYA PERSADA	(1377) Kota Pariaman - (68110) Real Estate Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	1,160,000,000
	2021-07-06	LK1031878	PT. LANEFA KARYA PERSADA	(1377) Kota Pariaman - (68110) Real Estate Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	200,000,000
	2021-10-12	LK1192819	PT. LANEFA KARYA PERSADA	(1377) Kota Pariaman - (68200) Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	400,000,000
	2022-01-03	LK1261241	PT. LANEFA KARYA PERSADA	(1377) Kota Pariaman - (68110) Real Estate Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	70,000,000

3	2021-04-08	LK909618	Badan Hukum (selain PT) RS AISYIYAH PARIAMAN	(1377) Kota Pariaman - (86103) Aktivitas Rumah Sakit Swasta	2,500,000,000
	2021-10-06	LK1154713	Badan Hukum (selain PT) RS AISYIYAH PARIAMAN	(1377) Kota Pariaman - (86103) Aktivitas Rumah Sakit Swasta	150,000,000
	2022-01-07	LK1289294	Badan Hukum (selain PT) RS AISYIYAH PARIAMAN	(1377) Kota Pariaman - (86103) Aktivitas Rumah Sakit Swasta	850,000,000
4	2021-04-08	LK911868	PT. BERKAT TAMAR	(1377) Kota Pariaman - (86103) Aktivitas Rumah Sakit Swasta	0,00
	2021-10-29	LK1217933	PT. BERKAT TAMAR	(1377) Kota Pariaman - (86103) Aktivitas Rumah Sakit Swasta	23,120,000
	2022-01-07	LK1285820	PT. BERKAT TAMAR	(1377) Kota Pariaman - (86103) Aktivitas Rumah Sakit Swasta	291,432,400
5	2021-04-08	LK911901	PT. GRIYA KENZATA UTAMA	(1377) Kota Pariaman - (68200) Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	413,000,000
	2021-10-12	LK1192855	PT. GRIYA KENZATA UTAMA	(1377) Kota Pariaman - (68200) Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	869,000,000
	2021-04-08	LK911972	PT. GRIYA KENZATA UTAMA	(1377) Kota Pariaman - (68200) Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	40,000,000
	2022-01-14	LK1337103	PT. GRIYA KENZATA UTAMA	(1377) Kota Pariaman - (68200) Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	70,000,000
	2021-07-07	LK1037640	PT. GRIYA KENZATA UTAMA	(1377) Kota Pariaman - (68200) Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	260,000,000
6	2021-04-08	LK912772	PT. WENNI MULTI GRUP	(1377) Kota Pariaman - (68200) Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	1,651,000,000
	2021-07-08	LK1050312	PT. WENNI MULTI GRUP	(1377) Kota Pariaman - (68200) Real Estat Atas Fee Atau Kontrak	850,000,000
	2022-01-07	LK1286987	PT. WENNI MULTI GRUP	(1377) Kota Pariaman - (68200) Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	300,000,000
7	2021-07-09	LK1062148	PT. ABRO PRIMA MAKMUR	(1377) Kota Pariaman - (10772) Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan	0,00
	2021-05-26	LK975784	PT. ABRO PRIMA MAKMUR	(1377) Kota Pariaman - (10772) Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan	1,900,000,000
	2021-11-01	LK1221071	PT. ABRO PRIMA MAKMUR	(1377) Kota Pariaman - (10772) Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan	100,000,000
8	2021-10-12	LK1193048	PT. DAFFA MULTI GUNA	(1377) Kota Pariaman - (68110) Real Estate Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	240,000,000
	2021-10-12	LK1193910	PT. DAFFA MULTI GUNA	(1377) Kota Pariaman - (68200) Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	300,000,000

	2021-07-07	LK1038579	PT. DAFFA MULTI GUNA	(1377) Kota Pariaman - (68110) Real Estate Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	2,870,000,000
	2022-01-07	LK1290402	PT. DAFFA MULTI GUNA	(1377) Kota Pariaman - (68200) Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	180,000,000
9	2021-04-09	LK918131	PT. WIKO MANGGARA PUTRA	(1377) Kota Pariaman - (41011) Konstruksi Gedung Tempat Tinggal	0,00
10	2021-04-09	LK921059	PT. RAJASA LABA KARYA NUSANTARA	(1377) Kota Pariaman - (68110) Real Estate Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	0,00
	2021-04-09	LK921217	PT. RAJASA LABA KARYA NUSANTARA	(1377) Kota Pariaman - (68110) Real Estate Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	140,000,000
	2021-07-07	LK1038294	PT. RAJASA LABA KARYA NUSANTARA	(1377) Kota Pariaman - (68110) Real Estate Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	70,000,000
	2021-10-06	LK1153416	PT. RAJASA LABA KARYA NUSANTARA	(1377) Kota Pariaman - (68110) Real Estate Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	0,00
	2022-01-03	LK1261208	PT. RAJASA LABA KARYA NUSANTARA	(1377) Kota Pariaman - (68110) Real Estate Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	210,000,000
11	2021-10-12	LK1196475	PT. DAYA INDAH YASA	(1377) Kota Pariaman - (47111) Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Supermarket/Minimarket	0,00
	2022-01-09	LK1301807	PT. DAYA INDAH YASA	(1377) Kota Pariaman - (47111) Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Supermarket/Minimarket	0,00
12	2021-04-14	LK939010	CV. FANISA	(1377) Kota Pariaman - (86104) Aktivitas Poliklinik Swasta	0,00
13	2021-04-15	LK943105	PT. PRIMA MULIA ABADI	(1377) Kota Pariaman - (20129) Industri Pupuk Lainnya	5,960,000,000
14	2021-04-30	LK960307	(Perorangan) SAIFUL RAHMAN	(1377) Kota Pariaman - (10633) Industri Tepung Beras Dan Tepung Jagung	220,000,000
15	2021-07-06	LK1031055	PT. MULYA MULTIARTHA CORPORINDO	(1377) Kota Pariaman - (43309) Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya	1,194,600,000
16	2021-07-07	LK1037099	Badan Hukum (selain PT) PAUD NURUL INSANI CERIA	(1377) Kota Pariaman - (85139) Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya	325,000,000
17	2021-07-07	LK1042045	YAYASAN ISLAM IBNU ABBAS PARIAMAN	(1377) Kota Pariaman - (85139) Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya	20,000,000
18	2021-07-09	LK1062558	PT. PARIS SWALAYAN ABADI	(1377) Kota Pariaman - (47111) Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Supermarket/Minimarket	500,000,000

19	2021-09-06	LK1115890	CV. BERSAMA SIKUMBANG JAYA	(1377) Kota Pariaman - (01261) Perkebunan Buah Kelapa	189,233,500
20	2021-11-18	LK1232990	CV. MULYA KARYA ABADI	(1377) Kota Pariaman - (46100) Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	0,00
21	2021-12-15	LK1248708	PT. SATU LABORATIKA UTAMA	(1377) Kota Pariaman - (86903) Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	0,00
22	2022-01-06	LK1277916	PT. ANUGRAH TUHAN GROUP	(1377) Kota Pariaman - (68111) Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	1,710,000,000
23	2022-01-06	LK1281265	PT. BUKIT MENARA PERKASA	(1377) Kota Pariaman - (68110) Real Estate Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	0,00
24	2022-01-07	LK1287674	YAYASAN ANAK BINA INDONESIA	(1377) Kota Pariaman - (85122) Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Swasta	3,388,275,191
25	2022-01-07	LK1290221	CV. NAN TONGGA BEACH	(1377) Kota Pariaman - (55900) Penyediaan Akomodasi Lainnya	16,100,000
26	2021-07-07	LK1037563	PT. BERKAT TAMAR	(1377) Kota Pariaman - (86103) Aktivitas Rumah Sakit Swasta	65,736,500
27	2022-01-13	LK1335467	PT. ELMAKO DHARMA PERSADA	(1377) Kota Pariaman - (46900) Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	0,00
	2022-01-13	LK1335491	PT. ELMAKO DHARMA PERSADA	(1377) Kota Pariaman - (41019) Konstruksi Gedung Lainnya	0,00
Total					34,032,497,591

Kendala utama dalam pencapaian target nilai investasi adalah :

1. Masih banyaknya pelaku usaha yang belum patuh terhadap pelaporan perusahaannya melalui aplikasi LKPM online/OSS. Hal ini mungkin bisa kita minimalisir melalui peningkatan sosialisasi dan bimbingan teknis terhadap para pelaku usaha.
2. Peraturan kepala BKPM RI Nomor 7 tahun 2018 tentang pedoman dan tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal tanggal 19 Juli 2018, bahwa yang termasuk kedalam laporan investasi secara online (OSS) diatas Rp. 500.000.000,- . Sesuai Pasal 10 ayat 2 “ pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha untuk setiap bidang usaha dan/atau lokasi dengan nilai investasi lebih dari Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) wajib menyampaikan LKPM “
3. Dampak negatif dari pandemi Covid-19 yang masih sangat mempengaruhi perekonomian dilingkungan masyarakat. Sehingga ada beberapa perusahaan yang tidak mampu menjalankan aktivitas kerja perusahaan yang mengakibatkan perusahaan tsb mati suri.

4. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis LKPM dilaksanakan 1 (satu) kali dalam satu tahun dan dilaksanakan pada triwulan ketiga . Hal ini disebabkan karena menunggu pergeseran anggaran dan terbatasnya anggaran.
5. Untuk tahun 2022, kami mendapatkan kuncuran dana DAK non Fisik tahun 2022 khusus pemantauan, pengawasan dan sosialisasi LKPM. Hal ini diharapkan akan lebih meningkatkan pertumbuhan investasi di Kota Pariaman.

Untuk meningkatkan investasi upaya yang dilakukan:

- a. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terhadap para pelaku usaha agar melaporkan perusahaannya melalui aplikasi LKPM online/OSS.
- b. Pendekatan dan Promosi kepada Calon investor dan bahkan pada tahun sebelumnya telah di kunjungi beberapa Investor baik yang datang dari dalam maupun luar Negeri dan telah melakukan survey lapangan pada umumnya mereka tertarik untuk berinvestasi di Kota Pariaman
- c. Beberapa calon investor tersebut menginginkan untuk melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kota Pariaman, melalui Perusahaan Daerah.

Tabel 3.25
Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari
sasaran Meningkatnya Nilai Investasi dengan
target akhir RPJMD 2018-2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD TAHUN					REALISASI		
	SATUAN	AKHIR RPJMD	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Laju Pertumbuhan Investasi	%	2,0	0,03	0,5	3,5	0,69	43,99	18,08

Program yang mendukung sasaran ini diantaranya:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
2. Program Promosi Penanaman Modal
3. Program Pelayanan Penanaman Modal
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Tahun		
				2021	2019	2018
1	% Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	22,5%	14,90%	66%		
	Rata-rata capaian			66%		

Sasaran Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB dengan indikator % Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB dengan target 22,5% sedangkan realisasi hanya 14,90% dengan capaian 66%. Sasaran dan indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena merupakan sasaran dan indikator baru dalam mendukung Misi V RPJMD 2018-2023.

Defenisi operasional persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB adalah Perbandingan Jumlah Kontribusi dari Sektor Perdagangan dibagi dengan total PDRB di kali 100 %.

Kontribusi dari Sektor Perdagangan terhadap PDRB Pariaman yang dikeluarkan oleh BPS Kota Pariaman, sektor perdagangan merupakan salah satu sektor yang berkontribusi dalam peningkatan PDRB Kota Pariaman selain sektor pertanian dan sektor konstruksi.

Tahun 2021 sektor perdagangan menyumbang 14,90 % dari total PDRB Kota Pariaman. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2020) angka ini sedikit mengalami penurunan sebesar 0,21 %. Pada tahun 2020 sektor perdagangan menyumbang 15,11 % dari total PDRB Kota Pariaman.

Penurunan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB disebabkan oleh pandemi covid 19 yang hampir melanda seluruh kabupaten/kota di seluruh Indonesia tidak terkecuali Kota Pariaman sendiri. Pandemi covid 19 hampir membuat sebagian besar pelaku usaha pada sektor perdagangan dan sektor lain yang terkait dengan sektor perdagangan mengalami penurunan.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Pariaman untuk meningkatkan sektor perdagangan:

1. melakukan revitalisasi pasar;
2. pemberian bantuan sarana dan prasarana perdagangan kepada pelaku usaha;
3. pemberian bantuan modal;
4. memberikan pelatihan keterampilan usaha bagi UMKM dan IKM;
5. membantu pelaku usaha dalam mempromosikan dan memasarkan produk yang mereka hasilkan.

Dampak dari Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Pariaman kepada para pelaku usaha secara riil cukup memberikan pengaruh yang signifikan.

Secara riil sumbangan sektor perdagangan jika dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto Kota Pariaman Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Jutaan Rupiah), 2017-2021 meningkat dari tahun 2020 sebesar 573 241,65 juta rupiah menjadi 599 883,74 juta rupiah atau meningkat sebesar 1,04.

Tabel 3.26
Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari
sasaran Meningkatkan Kontribusi Sektor Perdagangan
Terhadap PDRB dengan target akhir RPJMD 2018-2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD TAHUN					REALISASI		
	SATUAN	AKHIR RPJMD	2019	2020	2021	2019	2020	2021
% Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	15,59	-	-	22,5	-	-	14,90

Program yang mendukung sasaran ini, antara lain:

1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
4. Program Pendidikan dan Latihan Koperasi
5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

7. Program Pengembangan UMKM
8. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
9. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
10. Program Pengembangan Ekspor
11. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
12. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
13. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Sasaran 3
Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Tahun		
				2020	2019	2018
1	% Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	18,45%	17,93%	97%		
Rata-rata capaian				97%		

Sasaran Meningkatkan Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB dengan indikator % Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB dengan target 18,5% sedangkan realisasi hanya 17,93% dengan capaian 97%. Sasaran dan indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena merupakan sasaran dan indikator baru dalam mendukung Misi V RPJMD 2018-2023.

Pencapaian kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sebesar 17,93% dari keseluruhan PDRB Kota Pariaman tahun 2021 menjadikan sektor pertanian penyumbang PDRB terbesar dari pada sektor lainnya. Sumber data yang sama menunjukkan bahwa sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar PDRB Kota Pariaman sudah bertahan selama tiga tahun terakhir.

Besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ini menunjukkan bahwa aktivitas perekonomian masyarakat di Kota Pariaman masih didominasi pertanian. Hal ini juga didukung dengan banyaknya kegiatan yang mendukung pertanian ini yaitu pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang masing-masing bidang ini juga memiliki kegiatan yang beragam. Selain itu kontribusi Pertanian ini juga menunjukkan bahwa kegiatan pertanian tidak terlalu berdampak terhadap adanya covid 19 hal ini

ditunjukkan selama tiga tahun terakhir produksi stabil dan tetap menjadi penyumbang PDRB terbesar.

Adapun perbandingan Data Produksi Pertanian Tahun 2020 -2021 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.27
Data Produksi Pertanian Tahun 2020-2021

NO	KOMODITI PERTANIAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1.	PERTANIAN				
	Produksi Padi (ton)	20.692	26.799	21.105	25.180
2.	PETERNAKAN				
	Produksi Daging (ton)	671.154	500.320	681.222	533.731
3.	PETERNAKAN				
	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	6.295	6.206	6.315	6.230
	Produksi Perikanan Budi Daya (ton)	320	322.42	323	322.02

Untuk pencapaian kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB tahun 2021 walaupun masih penyumbang pertama, namun masih belum mencapai target yang ditetapkan. Dimana pada tahun 2021 target kontribusi pertanian diharapkan sebesar 18,27% hanya terealisasinya hanya sebesar 17,93%.

Penyebab tidak tercapainya target adalah:

1. Produksi Pertanian Khususnya Padi

Dari data produksi dapat diketahui bahwa produksi padi turun sebesar 1 % dari tahun 2020. Hal ini dapat dijelaskan bahwa seperti halnya pada tahun sebelumnya (2020) dimana produksi padi juga mengalami penurunan, karena adanya serangan hama pada semester kedua.

Serangan hama ini masih berdampak pada tahun berikutnya yaitu dengan adanya masa pasca panen yang sedikit panjang untuk memutus siklus hama dan juga masih adanya keawatiran dari petani akan terjadi serangan hama lagi.

2. Produksi Perikanan

Produksi perikanan tidak mencapai target adalah pada usaha perikanan budidaya. Dimana dari target sebesar 323 ton hanya terealisasi sebesar 322,02 ton.

Begitu juga pada perikanan tangkap dari target yang ditetapkan sebesar 6.315 hanya tercapai 6.230 ton. Angka ini sangat kecil sekali sehingga pencapaian target tetap hampir seratus persen yaitu sebesar 98,70%.

Pencapaian target produksi perikanan 98%, namun pada tahun sebelumnya produksi perikanan tetap meningkat, dimana pada tahun 2020 capain produksi sebesar 6.526,42 ton sedangkan tahun 2021 6.551,63 ton.

Produksi perikanan tangkap sangat dipengaruhi oleh musim, dan juga sarana dan parasarana penangkapan serta sumberdaya ikan di perairan Kota Pariaman. Keterbatasan alat penangkapan dan populasi ikan yang sudah mulai menurun menyebabkan produksi perikanan tangkap cenderung tetap. Untuk kedepannya akan diusahakan pemenuhan alat tangkap yang baik dan usulan penanaman rumput buatan.

Solusi yang dilakukan untuk meningkatkan sasaran ini adalah:

- Gerakan Pengendalian Hama
- Pemberian Bantuan Pestisida
- Pergantian variatas bibit dari 42 ke bujang marantau
- penyuluhan kepada para petani dalam kegiatan pasca panen.
- mendampingi setiap kegiatan budidaya; serta
- peningkatan usaha restocking perairan air tawar.

Tabel 3.28

**Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari
sasaran Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian
Terhadap PDRB dengan target akhir RPJMD 2018-2023**

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD TAHUN					REALISASI		
	SATUAN	AKHIR RPJMD	2019	2020	2021	2019	2020	2021
% Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	18,67	-	-	22,5	-	-	14,90

Program yang mendukung sasaran ini, antara lain:

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
2. Program Penanganan Kerawanan Pangan
3. Program Pengelolaan Ikan Tangkap
4. Program Pengelolaan Perikanan Budi Daya
5. Program Optimalisasi Pengelolaan Pemasaran Hasil Perikanan

6. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota
7. Program Peyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
8. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
9. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
10. Program Penyuluhan Pertanian
11. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Sasaran 4 Menurunnya Angka Kemiskinan

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Tahun		
				2021	2020	2019
1	Persentase Angka Kemiskinan	3,90	4,38	112%	88%	99%
Rata-rata Capaian				112%	88%	99%

Dari tabel di atas rata-rata capaian kinerja untuk sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan didukung 1 indikator Persentase menurunnya Angka Kemiskinan target 3,90% terealisasinya 4,38 % dengan capaian 112%. Tingginya angka capaian Menurunnya Angka kemiskinan yaitu sebesar 112% menunjukkan terjadinya peningkatan kemiskinan di Kota Pariaman. Dibandingkan tahun 2020 Angka Kemiskinan Tahun 2021 berada di angka 4,38 adanya kenaikan sebesar 0,28 dari Angka Kemiskinan Tahun 2020 berada pada angka 4,10 capaian 88%, dan menurun dari tahun 2019 dengan angka 4,76 dengan capaian 99 % .

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan.

Garis Kemiskinan Makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur, susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak dan lain-lain).

Sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan. adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Perbandingan Angka Kemiskinan Kota Pariaman dengan Kabupaten Kota di Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.29
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Sumatera Barat Tahun 2019-2021

Berita	Senarai Rencana Terbit ▼	Publikasi	Berita Resmi Statistik	PPID ▼
Wilayah ↑	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (Persen)			
	2019	2020	2021	
Agam	6,75	6,75	6,85	
Bukittinggi	4,60	4,54	5,14	
Dharmasraya	6,29	6,23	6,67	
Kab.Solok	7,98	7,81	8,01	
Kepulauan Mentawai	14,43	14,35	14,84	
Kota Solok	3,24	2,77	3,12	
Lima Puluh Kota	6,97	6,86	7,29	
Padang	4,48	4,40	4,94	
Padang Panjang	5,60	5,24	5,92	
Padang Pariaman	7,10	6,95	7,22	
Pariaman	4,76	4,10	4,38	
Pasaman	7,21	7,16	7,48	
Pasaman Barat	7,14	7,04	7,51	
Payskumbuh	5,68	5,65	6,16	
Pesisir Selatan	7,88	7,61	7,92	
Sawahlunto	2,17	2,16	2,38	
Sijunjung	7,04	6,78	6,80	
Solok Selatan	7,33	7,15	7,52	
SUMATERA BARAT (Provinsi)	6,42	6,28	6,63	
Tanah Datar	4,66	4,40	4,54	

Sumber : Badan Pusat Statistik 2021

Pembatasan kegiatan sosial masyarakat seiring merebaknya pandemi Covid-19 berdampak terhadap pendapatan masyarakat Sumatera Barat (Sumbar). Imbasnya, angka kemiskinan di provinsi ini juga semakin meningkat.

Penduduk miskin di Sumbar bertambah 26,44 ribu jiwa menjadi 370,67 ribu jiwa pada Maret 2021 dibanding Maret 2020. Demikian pula dengan angka kemiskinannya yang meningkat menjadi 6,63% dibanding sebelumnya hanya 6,28%.

Kabupaten Kepulauan Mentawai tercatat sebagai kabupaten/kota dengan angka kemiskinan tertinggi di Sumatera Barat. Berdasarkan hasil Survei

Sosial Ekonomi (Susenas) 2021, jumlah penduduk miskin di kabupaten yang wilayah dikelilingi Samudera Hindia tersebut sebanyak 14,31 ribu jiwa (14,84%) dari total populasi. Secara persentase, angka kemiskinan di kabupaten tersebut meningkat dibanding Maret 2020 sebesar 14,35%.

Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin tertinggi berikutnya adalah Kabupaten Solok, yakni mencapai 8,01%. Diikuti Kabupaten Pesisir Selatan dengan angka kemiskinan sebesar 7,92%, kemudian Kabupaten Solok Selatan sebesar 7,52%, dan Kabupaten Pasaman Barat sebesar 7,51%.

Daerah lainnya yang memiliki angka kemiskinan tinggi di Sumbar, yaitu, Kabupaten Pasaman dengan persentase penduduk miskin sebesar 7,48%, Kabupaten Lima Puluh Kota 7,29%, lalu Kabupaten Padang Pariaman sebesar 7,22%, serta Kabupaten Agam dan Kabupaten Sijunjung masing-masing sebesar 6,85% dan 6,8%.

Adapun permasalahan-permasalahan dalam hal pengurangan kemiskinan ini adalah:

- 1) Data kemiskinan secara nasional yang diakui adalah data dari Susenas. Tapi banyak OPD yang secara kegiatan terlibat langsung dalam penanggulangan kemiskinan ini menggunakan data OPD itu sendiri. Padahal data yang digunakan oleh OPD itu banyak yang tidak memenuhi dari kriteria kemiskinan.
- 2) Belum maksimalnya penggunaan P-BDT (Basis Data Terpadu) yang dijadikan sebagai sasaran program penanggulangan kemiskinan masing-masing OPD yang ada. Kondisi inilah TKPK selaku pelaksana di Kota Pariaman berupaya untuk bisa menjelaskan kepada semua pihak, tentang cakupan dan hasil pengolahan Basis Data Terpadu tersebut. Sedangkan pada tahap perencanaan program selalumenanyakan tentang target sasaran yang akan dilaksanakan, sehingga diupayakan untuk menggunakan PBDT (Pemutakhiran Basis Data Terpadu) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
- 3) Belum terintegrasinya lembaga-lembaga pelaksanaan program penanggulan kemiskinan di tingkat Desa/Kelurahan (BKM, KUBE, UPK,

UEP, Desa Mandiri Pangan, Kotaku). Sehingga bantuan yang diberikan pada kelompok masyarakat miskin belum merata.

- 4) Masih adanya kepentingan-kepentingan yang masih berpihak pada kelompok tertentu, sehingga untargeted masyarakat miskin belum berjalan maksimal.
- 5) Belum maksimalnya keterlibatan lembaga masyarakat/ keagamaan, dalam upaya penggunaan P-BDT sebagai basis data tunggal untuk penanggulangan kemiskinan dalam pemberian bantuan permodalan bagi fakir dan miskin seperti BAZ.
- 6) Partisipasi masyarakat yang kurang dalam program penanggulangan kemiskinan, sehingga pemberdayaan masyarakat yang diharapkan berjalan tidak terlaksana, serta adanya anggapan bahwa untuk bantuan modal usaha atau dana bergulir/revolving sebagai bantuan lepas tanpa adanya pengembalian, sehingga banyak terjadi kemacetan dana yang telah disalurkan selama ini.
- 7) Karakteristik rumah tangga miskin yang tidak mau merubah budaya miskin selalu ingin dibantu.

Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan dengan target akhir RPJMD 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.30
Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari
sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan
dengan target akhir RPJMD 2018-2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD TAHUN					REALISASI		
	SATUAN	AKHIR RPJMD	2019	2020	2021	2019	2020	2021
% Angka Kemiskinan	%	3,50	4,80	4,65	3,90	4,76	4,10	4,38

Dari perbandingan realisasi dari sasaran Menurunnya angka kemiskinan dengan realisasi di tahun 2021 dengan angka 4,38 jika dibandingkan dengan akhir RPJMD terdapat selisih sekitar 0,88. Untuk itu Pemerintah Kota Pariaman terus berupaya dari untuk menurunkan angka kemiskinan .

Sasaran 5 **Menurunnya Angka Pengangguran**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Tahun			
				2020	2020	2019	2018
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,43	6,09	112%			
Rata-rata Capaian				112%			

Sasaran Menurunnya Angka Pengangguran dengan Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka mempunyai target 5,43 dengan realisasi 6,09 dengan capaian 112%

- Secara keseluruhan Tingkat Pengangguran di Indonesia pada tahun 2021 adalah 6,49 %, dan ditingkat Provinsi Sumatera Barat sebanyak 179.950 jiwa atau 6.52 %. Sedangkan ditingkat kota Pariaman pada tahun 2021 adalah 6,09%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tingkat pengangguran di Kota Pariaman adalah 5,73%, terjadi peningkatan pengangguran sebanyak 0,36% (Sumber Data BPS Kota Pariaman) .

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pariaman dengan Kabupaten Kota di Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.31
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Sumatera Barat
Tahun 2019-2021

Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota (Persen)		
	2019	2020	2021
Kab. Kepulauan Mentawai	2,92	3,98	2,79
Kab. Pesisir Selatan	6,02	7,00	5,97
Kab. Solok	4,72	4,65	4,67
Kab. Sijunjung	3,64	5,30	3,57
Kab. Tanah Datar	3,20	4,79	4,63
Kab. Padang Pariaman	6,08	8,13	8,41
Kab. Agam	4,78	4,61	5,06
Kab. Lima Puluh Kota	2,30	3,03	2,25
Kab. Pasaman	5,28	5,04	4,92
Kab. Solok Selatan	4,91	5,62	4,84
Kab. Dharmasraya	5,06	5,31	5,00
Kab. Pasaman Barat	4,74	4,69	5,02
Kota Padang	8,74	13,64	13,37
Kota Solok	7,06	8,35	5,15
Kota Sawahlunto	6,84	8,20	6,38
Kota Padang Panjang	4,38	7,22	4,90
Kota Bukittinggi	6,20	7,51	6,09
Kota Payakumbuh	4,13	6,68	6,47
Kota Pariaman	5,48	5,73	6,09
Provinsi Sumatera Barat	5,38	6,88	6,52

Sumber : Badan Pusat Statistik 2021

- Dalam rangka penanggulangan pengangguran dan kemiskinan, Bidang Tenaga Kerja pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman telah melakukan berbagai upaya yang berorientasi pada perluasan dan pengembangan kesempatan kerja. Namun demikian upaya tersebut belum memberikan hasil yang optimal. Salah satu kendalanya adalah keterbatasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman.
- Secara garis besar faktor yang mempengaruhi masalah ketenagakerjaan terutama tentang pengangguran di Kota Pariaman adalah factor pendidikan, kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Dimana ketiga-tiga factor tersebut saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Banyaknya pengangguran disebabkan laju pertumbuhan penduduk yang tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan lapangan pekerjaan, serta rendahnya kualitas tenaga kerja yang tersedia, teknologi yang semakin canggih sehingga semakin sedikit kesempatan

kerja yang ada. Hal ini diperburuk lagi dengan kondisi pandemic covid 19, sehingga pelaku usaha banyak yang mengurangi jumlah karyawan dan bahkan tidak mampu untuk melanjutnya usaha tersebut. Bahkan pencari kerja merasa enggan untuk mencari kerja keluar daerah Kota Pariaman karena keadaan ekonomi di daerah lain ada yang lebih buruk dari Kota Pariaman , karena dampak dari pandemic covid 19.

Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari sasaran Menurunnya Angka Pengangguran dengan target akhir RPJMD 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.32
Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari
sasaran Menurunnya Angka Pengangguran
dengan target akhir RPJMD 2018-2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD TAHUN					REALISASI		
	SATUAN	AKHIR RPJMD	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,80	-	-	5,43	-	-	6,09

Dari perbandingan realiasi dari sasaran Menurunnya angka Pengangguran dengan realisasi di tahun 2021 dengan angka 6,09 jika dibandingkan dengan akhir RPJMD terdapat selisih yang cukup tinggi yaitu sebesar 1,29. Untuk itu Pemerintah Kota Pariaman terus berupaya untuk menurunkan angka pengangguran di Kota Pariaman.

Program yang mendukung sasaran ini diantaranya:

- 1) Program Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi
- 2) Program Penempatan Tenaga Kerja
- 3) Program Hubungan Industrial

Sasaran 5 **Meningkatnya Kemandirian Desa**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Tahun		
				2021	2020	2019
1	Indeks desa Membangun	0,7400	0,7485	101,15%	105,47%	105,11%
Rata-rata Capaian				101,15%	105%	105%

Dari tabel sasaran Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat dengan indikator Indeks Desa Membangun dengan target 0,7400 realisasi 0,77485 dengan capaian 101,15% .

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan ukuran status kemajuan desa yang diklasifikasikan dalam 5 (lima) tingkatan yaitu Desa Mandiri, Desa maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal, dan Desa Sangat Tertinggal. Penentuan status kemajuan Desa ini, ditentukan oleh data komposit indikator Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi.

Klasifikasi Status Desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:

1. Desa Sangat Tertinggal : $IDM \leq 0,4907$
2. Desa Tertinggal : $0,4907 < IDM \leq 0,5989$
3. Desa Berkembang: $0,5989 < IDM \leq 0,7072$
4. Desa Maju : $0,7072 < IDM \leq 0,8155$
5. Desa Mandiri: $IDM > 0,8155$

Klasifikasi Desa tersebut untuk menunjukkan keragaman karakter setiap Desa dalam rentang skor $\leq 0,4907 - 0,8155$ Indeks Desa Membangun.

Dari tahun 2020 – 2021 terjadi peningkatan Status Desa Berkembang naik menjadi Desa Maju, yang awalnya tahun 2020 Desa berkembang berjumlah 19 Desa, menjadi 6 Desa pada tahun 2021, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.33
Status Desa di Kota Pariaman pada tahun 2020 dan 2021

NO	KECAMATAN	MANDIRI		MAJU		BERKEMBANG		TERTINGGAL		SANGAT TERTINGGAL		TOTAL	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PARIAMAN TENGAH	0	0	4	6	2	0	0	0	0	0	6	6
2	PARIAMAN UTARA	0	2	11	11	6	4	0	0	0	0	17	17
3	PARIAMAN SELATAN	0	0	16	16	0	0	0	0	0	0	16	16
4	PARIAMAN TIMUR	0	0	5	14	11	2	0	0	0	0	16	16
Jumlah		0	2	36	47	19	6	0	0	0	0	55	55
Presentase		0	3,60	65	85,50	35	10,90	0	0	0	0	100%	100%

Pada tahun 2020 belum ada desa yang berstatus Desa Mandiri . Namun pada tahun 2021 terjadi perubahan yang baik dengan naiknya status 2 Desa di Kecamatan Pariaman Utara menjadi Desa Mandiri yaitu *Desa Manggung* dan *Desa Naras 1*. Terjadinya peningkatan status Desa di karenakan terpenuhinya nilai Indikator Desa yang sudah memiliki kemampuan mengelola daya dalam ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan, yang di tetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pada tahun 2020 status Desa Maju berjumlah **36 Desa**, sedangkan tahun 2021 Desa Maju bertambah **11 Desa** sehingga menjadi **47 Desa Maju** yang tersebar di 4 Kecamatan, yaitu di Pariaman Tengah 6 Desa, Pariaman Utara 11 Desa, Pariaman Selatan 16 Desa dan Pariaman Timur 14 Desa.

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2021 Kota Pariaman menduduki Peringkat ke 3 dari 14 Kabupaten/Kota yang ada dengan Nilai IDM sebesar 0,7485, sebagaimana rekap data yang dilakukan oleh DPMD dan BAPPEDA Propinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.34
RANGKING IDM TAHUN 2021
TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT

No.	Kab/Kota	NILAI IDM TAHUN 2021	PERINGKAT KE-
1	Tanah Datar	0,7655	I
2	Pasaman Barat	0,7574	II
3	Kota Pariaman	0,7485	III
4	Agam	0,7256	IV
5	Solok Selatan	0,7246	V
6	50 Kota	0,7133	VI
7	Kota Sawahlunto	0,7024	VII
8	Padang Pariaman	0,7004	VIII
9	Sijunjung	0,6953	IX
10	Dharmasraya	0,6882	X
11	Pesisir Selatan	0,6879	XI
12	Pasaman	0,6715	XII
13	Solok	0,6542	XIII
14	Mentawai	0,6344	XIV

Sumber Data : DPMD Provinsi Sumatera Barat

Kenaikan Status IDM Perkembangan Desa di Kota Pariaman Tahun 2021 Untuk Desa Maju pada tahun 2021, status Desa Maju berjumlah 47 Desa mengalami peningkatan sebesar 24 % dari tahun 2020 yang berjumlah 36 Desa, Peningkatan status Perkembangan Desa Ini karean dari indikator penilaian sebagai berikut :

1. Untuk Desa Maju Menjadi Mandiri sebanyak 2 Desa, yaitu Desa Manggung dan Desa Naras 1, karena adanya kenaikan Indeks Ketahanan Sosial di Desa dengan nilai rata rata 0,0714 dan Indeks Ketahanan Ekonomi sebesar rata rata 0,0417, yang mana di dukung oleh naiknya kreatifitas dan produksi UKM yang mendorong perekonomian masyarakat di Desa Manggung dan Desa Naras 1 dengan adanya sentra kerajinan sulaman di daerah tersebut salah satu yang meningkatkan nilai ketahanan ekonomi Desa.

2. Untuk Desa Berkembang menjadi Desa Maju terdapat 13 Desa sebagaimana data berikut, dikarenakan adanya kenaikan indeks ketahanan sosial sebesar rata-rata 0,0563, indeks ketahanan ekonomi sebesar 0,0410 dan indeks ketahanan lingkungan sebesar 0,0564.
3. Adanya Dana Desa sejak tahun 2015 – 2021, sangat berpengaruh secara signifikan terhadap hasil hasil pembangunan dan ketersediaan ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan di Desa.

Tabel 3.35
KENAIKAN STATUS IDM TAHUN 2021 DARI MAJU MENJADI MANDIRI

IKS	IKE	IKL	NILAI IDM	STATUS IDM 2020	STATUS IDM 2021
0,1371	0,0167	0	0,0513	MAJU	Mandiri
0,0057	0,0667	0	0,0241	MAJU	Mandiri
0,0714	0,0417	0	0,0377		

Tabel 3.36
KENAIKAN STATUS IDM TAHUN 2021
DARI BERKEMBANG MENJADI MAJU

No.	NAMA DESA	IKS	IKE	IKL	NILAI IDM	STATUS IDM	
						2020	2021
1	PAUH TIMUR	0,0743	0,0833	0,1334	0,0969	BERKEMBANG	Maju
2	JATI MUDIK	0,04	0,0167	0,2666	0,1078	BERKEMBANG	Maju
3	NARAS HILIR	0,0577	0	0	0,019	BERKEMBANG	Maju
4	SINTUK	0,0172	0,1	0	0,0391	BERKEMBANG	Maju
5	TALAGO SARIK	0,0343	0	0	0,0115	BERKEMBANG	Maju
6	PAKASAI	0,0171	0,0333	0	0,0168	BERKEMBANG	Maju
7	KAMPUNG GADANG	0,1486	0,05	0,0666	0,0884	BERKEMBANG	Maju
8	KOTO MARAPAK	0	0,0334	0,2	0,0778	BERKEMBANG	Maju
9	BATANG KABUNG	0,1486	0,0334	0,0666	0,0829	BERKEMBANG	Maju
10	BATO	0,08	0,05	0	0,0433	BERKEMBANG	Maju
11	SUNGAI SIRAH	0,0343	0,0167	0,2	0,0836	BERKEMBANG	Maju
12	KAMPUNG KANDANG	0,0114	0,0333	0	0,0149	BERKEMBANG	Maju
13	KAJAI	0,0686	0,0834	0	0,0506	BERKEMBANG	Maju
Rata rata		0,0563	0,0410	0,0718	0,0564		

Nama-Nama dan Status Desa adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3. 37
Nama –nama dan Status Desa Tahun 2021

No.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	IKS 2021	IKE 2021	IKL 2021	NILAI IDM 2021	STATUS IDM 2021
1	PARIAMAN TENGAH	PAUH BARAT	0,7886	0,6667	0,8667	0,774	Maju
2	PARIAMAN TENGAH	PAUH TIMUR	0,7829	0,6	0,8667	0,7498	Maju
3	PARIAMAN TENGAH	RAWANG	0,8514	0,6333	0,8667	0,7838	Maju
4	PARIAMAN TENGAH	KAMPUNG BARU	0,8343	0,65	0,9333	0,8059	Maju
5	PARIAMAN TENGAH	CIMPARUH	0,8857	0,6833	0,8667	0,8119	Maju
6	PARIAMAN TENGAH	JATI MUDIK	0,7657	0,7	0,9333	0,7997	Maju
7	PARIAMAN UTARA	AMPALU	0,7314	0,5333	1,0000	0,7549	Maju
8	PARIAMAN UTARA	APAR	0,6457	0,6333	0,9333	0,7375	Maju
9	PARIAMAN UTARA	TANJUNG SABAR	0,6514	0,6667	0,8667	0,7283	Maju
10	PARIAMAN UTARA	CUBADAK AIR SELATAN	0,7314	0,5667	0,9333	0,7438	Maju
11	PARIAMAN UTARA	SIKAPAK BARAT	0,8286	0,6667	0,6667	0,7206	Maju
12	PARIAMAN UTARA	SIKAPAK TIMUR	0,6857	0,5	0,8667	0,6841	Berkembang
13	PARIAMAN UTARA	MANGGUNG	0,8057	0,75	0,9333	0,8297	Mandiri
14	PARIAMAN UTARA	CUBADAK AIR UTARA	0,7429	0,6	1,0000	0,781	Maju
15	PARIAMAN UTARA	TUNGKAL SELATAN	0,6971	0,5	0,7333	0,6435	Berkembang
16	PARIAMAN UTARA	NARAS HILIR	0,7777	0,6833	0,6667	0,709	Maju
17	PARIAMAN UTARA	NARAS 1	0,8	0,7167	1,0000	0,8389	Mandiri
18	PARIAMAN UTARA	BALAI NARAS	0,8	0,6167	0,9333	0,7833	Maju
19	PARIAMAN UTARA	PADANG BIRIK BIRIK	0,72	0,6667	1,0000	0,7956	Maju
20	PARIAMAN UTARA	SINTUK	0,7086	0,5667	0,9333	0,7362	Maju
21	PARIAMAN UTARA	SUNGAI RAMBAI	0,6457	0,4333	1,0000	0,693	Berkembang
22	PARIAMAN UTARA	TUNGKAL UTARA	0,7143	0,6	0,6667	0,6603	Berkembang
23	PARIAMAN UTARA	CUBADAK AIR	0,6457	0,55	0,9333	0,7097	Maju
24	PARIAMAN SELATAN	PASIR SUNUR	0,7543	0,467	0,933	0,7181	Maju
25	PARIAMAN SELATAN	BALAI KURAI TAJI	0,817	0,667	0,867	0,7835	Maju
26	PARIAMAN SELATAN	PAUH KURAI TAJI	0,8343	0,63	0,867	0,7781	Maju

No.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	IKS 2021	IKE 2021	IKL 2021	NILAI IDM 2021	STATUS IDM 2021
27	PARIAMAN SELATAN	SIMPANG	0,84	0,533	0,867	0,7467	Maju
28	PARIAMAN SELATAN	TOBOH PALABAH	0,777	0,7	0,867	0,781	Maju
29	PARIAMAN SELATAN	MARABAU	0,7713	0,5667	0,933	0,7571	Maju
30	PARIAMAN SELATAN	BATANG TAJONGKEK	0,7657	0,533	0,933	0,7441	Maju
31	PARIAMAN SELATAN	SIKABU	0,789	0,533	0,867	0,7295	Maju
32	PARIAMAN SELATAN	SUNGAI KASAI	0,754	0,6	0,867	0,7403	Maju
33	PARIAMAN SELATAN	PALAK ANEH	0,754	0,55	0,933	0,7459	Maju
34	PARIAMAN SELATAN	KAMPUNG APAR	0,731	0,55	0,9333	0,7383	Maju
35	PARIAMAN SELATAN	MARUNGGI	0,754	0,5	0,9333	0,7292	Maju
36	PARIAMAN SELATAN	TALUK	0,754	0,467	0,933	0,7181	Maju
37	PARIAMAN SELATAN	PADANG CAKUR	0,771	0,667	0,867	0,7683	Maju
38	PARIAMAN SELATAN	PUNGGUNG LADING	0,766	0,58	0,8667	0,7608	Maju
39	PARIAMAN SELATAN	RAMBAI	0,754	0,6	0,867	0,7403	Maju
40	PARIAMAN TIMUR	TALAGO SARIK	0,7314	0,5333	0,8667	0,7105	Maju
41	PARIAMAN TIMUR	PAKASAI	0,76	0,5333	0,8667	0,72	Maju
42	PARIAMAN TIMUR	KP. BARU PADUSUNAN	0,6857	0,5667	0,8667	0,7063	Berkembang
43	PARIAMAN TIMUR	KAMPUNG GADANG	0,8686	0,5833	0,9333	0,7951	Maju
44	PARIAMAN TIMUR	KOTO MARAPAK	0,8057	0,6167	0,8667	0,763	Maju
45	PARIAMAN TIMUR	BATANG KABUNG	0,7829	0,5667	0,9333	0,761	Maju
46	PARIAMAN TIMUR	BATO	0,8057	0,55	0,8667	0,7408	Maju
47	PARIAMAN TIMUR	AIR SANTOK	0,7943	0,5667	0,8667	0,7425	Maju
48	PARIAMAN TIMUR	CUBADAK MENTAWAI	0,7257	0,6667	0,9333	0,7752	Maju
49	PARIAMAN TIMUR	SUNGAI SIRAH	0,7086	0,6167	0,8667	0,7306	Maju
50	PARIAMAN TIMUR	SUNGAI PASAK	0,7086	0,5333	0,8667	0,7029	Berkembang
51	PARIAMAN TIMUR	BUNGO TANJUNG	0,84	1	0,8667	0,8022	Maju
52	PARIAMAN TIMUR	KAMPUNG TANGAH	0,8286	0,6167	0,8667	0,7706	Maju
53	PARIAMAN TIMUR	KAMPUNG KANDANG	0,6571	0,6333	0,8667	0,719	Maju
54	PARIAMAN TIMUR	KALUAT	0,8171	1	0,9333	0,7502	Maju
55	PARIAMAN TIMUR	KAJAI	0,6857	0,6167	0,8667	0,723	Maju
	<i>Jumlah</i>		0,7606	0,59504	0,8885	0,7485	

Tabel 3.38
DATA KOMPOSIT INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM)
KOTA PARIAMANTAHUN 2019 - 2021

No	Indeks Desa Membangun(IDM)	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	0,7230	0,7195	0,7606
2	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0,5783	0,5730	0,59504
3	Indeks Ketahanan Ekologi (IKL)	0,8703	1,6897	0,88851

Sumber : Data Olahan Bag.Organisasi Setda Kota Pariaman Tahun 2021

Untuk meningkatkan Status Desa pada target 2023 maka sangat diperlukan kesinambungan program dan kegiatan peningkatan kapasitas pemerintahan desa yang fokus kepada penguatan dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan agar Indeks Desa Membangun (IDM) Kota Pariaman dapat ditingkatkan menuju Desa Maju.

Tabel 3.39
Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari
sasaran Meningkatkan Kemandirian Desa
dengan target akhir RPJMD 2018-2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD TAHUN					REALISASI		
	SATUAN	AKHIR RPJMD	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Indeks Desa Membangun	Nilai	0,0792	0,6850	0,6880	0,7400	0,7200	0,7250	0,7485

Program yang mendukung sasaran ini:

- 1) Program Penataan Desa
- 2) Program Administrasi Pemerintah Desa
- 3) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas Keuangan Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jumlah Anggaran pendapatan sebelum perubahan APBD tahun 2021 adalah Rp. 639.480.755.235,-
2. Jumlah Anggaran pendapatan setelah perubahan APBD tahun 2021 adalah Rp. 632.793.161.257,-
3. Jumlah Anggaran belanja sebelum perubahan APBD tahun 2021 adalah Rp. 671.456.170.235,-
4. Jumlah Anggaran belanja setelah perubahan APBD tahun 2021 adalah Rp. 674.126.031.747,76,-
5. Penerimaan pembiayaan sebelum perubahan APBD tahun 2021 Rp. 31.975.415.000,-
6. Penerimaan pembiayaan setelah perubahan tahun APBD 2021 Rp. 41.332.870.490,76,-
7. Pengeluaran pembiayaan sebelum perubahan APBD tahun 2021 Rp. 0,-
8. Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan APBD tahun 2021 Rp. 0,-
9. Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2018 s/d 2021.

TAHUN	PAD	NAIK/TURUN	PENDAPATAN DAERAH	PROPORSI TERHADAP PENDAPATAN DAERAH (%)
		(%)		
2018	36.781.361.440,51	6,29 (naik)	653.325.805.028,51	5,6
2019	42.885.560.142,00	16,59 (naik)	698.660.608.548	6,1
2020	54.783.919.177,00	27,74 (naik)	689.025.589.885	7,9
2021	46.451.454.431,00	15,2	6.327.993.161.257	7,3

Dari tabel diatas dapat dilihat proporsi PAD terhadap pendapatan mengalami sebesar 5,6 %. Pada tahun 2019 proporsi PAD mengalami peningkatan sebesar 0,5 %, sehingga menjadi 6,1 % . Demikan juga pada tahun 2020 proporsi PAD terhadap pendapatan juga kembali mengalami peningkatan sebesar 1,8 % dari tahun 2019 sehingga menjadi 7,9%. Dan tahun 2021 kembali turun 0,6% sehingga proporsi PAD terhadap Pendapatan menjadi 7,3%

10. Dana Perimbangan

TAHUN	DANA PERIMBANGAN	NAIK/TURUN	PENDAPATAN DAERAH	PROPORSI TERHADAP PENDAPATAN DAERAH (%)
		(%)		
2018	525.650.863.678,00	4,3 % (turun)	653.325.805.028,51	80,45
2019	544.751.976.000,00	3,63 % (naik)	698.660.608.548,00	77,97
2020	512.152.530.064,00	5,9 % (Turun)	689.025.589.885,00	74,33
2021	569.463.000.598,00	11,19 % (naik)	632.793.161.257,00	89,99

Dari tabel diatas dapat dilihat penganggaran dana perimbangan ditahun 2018 sebesar Rp. 525.650.863.678,00. Pada tahun 2019 ini penganggarnya kembali naik sebesar 3, 63 % dari tahun 2018. Dan ditahun 2020 ini penganggaran dana perimbangan turun 5, 9 % dari tahun 2019. Sedangkan proporsi dana perimbangan terhadap pendapatan pada tahun 2018 sebesar 80,45 , pada tahun 2019 proporsi dana perimbangan terhadap pendapatan turun sebesar 2,48 dari tahun 2018 dan ditahun 2020 juga mengalami penurunan sebesar 3,64 % dari tahun 2019. Dan Tahun 2021 kembali naik sekitar 15,66% sehingga menjadi 89,99%

11. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

TAHUN	DANA LAIN-LAIN	NAIK/TURUN	PENDAPATAN DAERAH	PROPORSI TERHADAP PENDAPATAN DAERAH (%)
		(%)		
2018	15.801.577.910,00	81,43 (turun)	653.325.805.028,51	2, 4
2019	111.023.072.406,00	602,60 (naik)	698.660.608.548,00	15,8
2020	122.089.140.644,00	10,66 (Naik)	689.025.589.885,00	17,71
2021	16.878.706.228,00	86,17 (turun)	632.793.161.257,00	2,66

Dari tabel di atas dapat dilihat penganggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2018 sebesar Rp. 15.801.577.910,00 . Pada tahun 2019 naik 602,60 % dari tahun 2018 dan ditahun 2020 penganggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah . kembali naik 10,66 % dari tahun 2019. Sedangkan proporsi lain –lain pendapatan daerah terhadap pendapatan

ditahun 2018 sebesar 2,4 %. Pada tahun 2019 ini proporsi naik sebesar 13,4 % dari tahun 2018 dan ditahun 2020 juga naik sebesar 1,91 %. Dan Tahun 2021 proporsi Pendapatan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terhadap Pendapatan kembali turun sebesar 15,05 menjadi 2,66%.

12. Perkembangan Belanja Daerah

BELANJA	2019	2020	2021
Operasi	484.802.521.538,93	453.214.258.088,22	496.726.974.674,78
Modal	171.955.619.758,10	123.785.351.815,34	79.451.123.876,44
Tak Terduga	200.000.000,00	30.325.902.755,00	930.625.970.,00
Transfer	95.977.582.121,00	97.395.172.863,00	97.017.307.226,54

Dari tabel diatas dapat dilihat penganggaran belanja daerah mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Untuk masing-masing kategori belanja dapat dijelaskan belanja operasi pada tahun 2018 sebesar Rp. 445.138.680.802,53 , ditahun 2019 mengalami peningkatan 8,9 % , sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 6,5 % dan ditahun 2021 kembali naik sebesar 9,06 %. Belanja Modal pada tahun 2018 adalah Rp. 176.974.701.133,00 ditahun 2019 mengalami penurunan sebesar 2,8 % . Ditahun 2020 kembali turun 28,01 dan ditahun 2021 kembali turun 35,81%. Sedangkan penganggaran belanja tak terduga pada tahun 2018 sebesar Rp. 400.000.000,00 , ditahun 2019 mengalami penurunan sekitar 50 %, dan ditahun 2020 melonjak naik sekitar 15.000 % namun ditahun 2021 kembali melonjak turun 96,93 %. Dan terakhir belanja transfer pada tahun 2018 sebesar Rp. 92.740.265.722,00, untuk tahun 2019 dan 2020 mengalami kenaikan masing-masing 3,4% dan 14 % dan ditahun 2021 kembali turun sekitar 0,38 %.

13. Kondisi Pembiayaan Daerah

TAHUN	PENERIMAAN	NAIK/TURUN	PENGELUARAN	PROPORSI TERHADAP PEMBIAYAAN
		(%)		(%)
2018	63.727.842.629,02	17,44 (Turun)	1.800.000.000,00	2,9
2019	54.275.114.870,03	14,83 (turun)	0	
2020	24.345.095.636,56	55,14 (turun)	8.650.000.000	35,53
2021	41.332.870.490,76	69,77 (naik)	0	

Dari tabel diatas dapat dilihat penganggaran penerimaan pembiayaan daerah pada 2018 sebesar Rp. 63.727.842.629,02, Ditahun 2019 penerimaan pembiayaan ini juga turun sekitar 17,44 %. Dan diatahun 2020 kembali turun sebesar 55, 14 %. Sedangkan pengeluaran pembiayaan pada 2018 sebesar Rp. 1.800.000.000,- proporsi terhadap pembiayaan sebesar 2,9 %. Dan ditahun 2019 ini pengeluaran pembiayaan tidak dianggarkan sehingga tidak dapat dilakukan penghitungan proporsi. Kemudian ditahun 2020 ini pengeluaran pembiayaan Rp. 8.650.000.000,- dan proporsi terhadap pembiayaan sebesar 35,53 % dan proporsi terhadap pembiayaan sebesar 35,53 %. Ditahu 2021 pengeluaran pembiayaan kembali tidak dianggarkan sehingga tidak dapat dilakukan penghitungan proporsi.

14. Realisasi Pendapatan Daerah

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
A	Pendapatan asli daerah	46.451.454.431,00	38.031.950.233,97	81,87
	Pajak Daerah	10.990.000.000,00	10.891.530.132,97	99,1
	Retribusi Daerah	15.144.428.276,00	11.325.131.000,00	74,78
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	6.986.510.155,00	6.986.510.155,00	100,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.	13.330.516.000,00	8.828.778.946,00	66,23
B	Dana perimbangan	480,705,846,817.00	475,712,378,238.00	98,96
	Dana Bagi Hasil	11,690,020,817.00	17,197,093,499.00	147,10
	Dana Alokasi Umum	382,767,313,000.00	382,767,313,000.00	100
	Dana Alokasi Khusus DAK fisik	39,482,418,000.00	34,095,060,379.00	86,35
	Dana Alokasi Khusus DAK non fisik	46,766,095,000.00	41,652,911,360.00	89,06
	DID	7,148,713,000.00	7,148,713,000.00	100
	Dana Desa - LRA	49,758,531,000.00	49,758,531,000.00	100
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	31,849,909,781.00	29,399,090,052.00	92,30
C	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	16.878.706.228,00	13.201.935.000,00	78,22
	Pendapatan Hibah - LRA	5.000.000.000,00	1.182.000.000,00	23,63
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11.878.70.6228,00	12.019.935.000,00	101,2
	Jumlah Pendapatan daerah	632.793.161.257,00	613.252.597.523,97	96,91

Dari tabel diatas dapat dilihat semua jenis pendapatan tidak tercapai 100% dari target yang telah ditetapkan. Realisasi penerimaan PAD hanya mencapai 81,87 %, dan dana perimbangan tercapai 98,69 %. Sementara dari lain –lain pendapatan daerah yang sah tercapai sebesar 78,22 % sehingga realisasi pendapatan daerah tercapai sebesar 96,91 %. Seperti dijelaskan diatas tidak tercapainya target PAD dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti wabah Covid -19 yang terjangkit.

15. Realisasi Belanja Daerah

	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	BELANJA OPERASI	496.726.974.674,78	442.417.541.472,00	89,07
	Belanja Pegawai	286.107.123.419,83	264.257.176.509,00	92,36
	Belanja barang jasa	202.729.856.315,95	172.567.569.635,00	85,12
	Belanja Hibah	2.778.794.939,00	1.520.007.328,00	54,7
	Belanja Bantuan Sosial	5.111.200.000,00	4.072.788.000,00	79,68
2	BELANJA MODAL	79.451.123.876,44	69.704.141.367,19	87,73
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.131.729.991,00	17.523.370.069,00	87,04
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18.732.751.767,00	16.544.636.956,00	88,32
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	40.539.342.118,44	35.619.134.342,19	87,86
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	47.300.000,00	17.000.000,00	35,95
3	BELANJA TAK TERDUGA	930.625.970,00	0	0
	Belanja Tak Terduga	930.625.970,00	0	0
4	BELANJA TRANSFER	97.017.307.226,54	96.342.943.961,10	99,3
	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	2.613.442.827,54	1.939.079.562,10	74,2
	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Desa	1,098,999,999.97	1,096,946,170.00	99,81
	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1,514,442,827.57	842,133,392.10	55,60
	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	94.403.864.399,00	94.403.864.399,00	100
	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	5,199,600,000.00	5,199,600,000.00	100
	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	89,204,264,399.00	89,204,264,399.00	100
	Jumlah Belanja	674.126.031.747,76	608.464.626.800,29	90,26

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi belanja operasi tercapai sebesar 89,7 % dari anggaran yang telah ditetapkan, sedangkan untuk belanja modal sebesar 87,73 %., belanja tak terduga 0 % dan belanja transfer 99,3 %. Jadi jumlah realisasi belanja sebesar Rp. 608.464.626.800,29 dari total anggaran belanja Rp. 674.126.031.747,76 atau sebesar 90,26 %.

BAB IV

PENUTUP

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja yang tersaji ini merupakan cerminan kinerja yang dilaksanakan selama tahun 2021 yang merupakan media pertanggungjawaban dari upaya pencapaian Visi dan Misi dalam RPJMD 2018-2023 Kota Pariaman.

Dalam hal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Pariaman dimaksud, secara tahunan Pemerintah Kota Pariaman juga telah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, sebagai penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 .

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kota Pariaman telah melakukan pengukuran kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Pariaman, yang disusun dalam bentuk Laporan Kinerja Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2021, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja Pemerintah Kota Pariaman berjumlah 19 sasaran yang diukur dengan 23 indikator kinerja sasaran.
2. Pada Misi I terdiri dari 1 sasaran, dan 1 indikator kinerja sasaran dengan rata-rata capaian kinerja 39%.
3. Misi 2 terdapat 4 sasaran 5 indikator kinerja sasaran dengan capaian rata-rata 98%.
4. Misi 3 terdapat 3 sasaran 5 indikator kinerja sasaran dengan capaian rata-rata 94%.
5. Misi 4 terdapat 5 Sasaran 6 indikator kinerja sasaran dengan rata-rata capaian 114%.
6. Misi 5 terdapat 6 Sasaran 6 indikator kinerja sasaran dengan rata-rata capaian 259%.

Secara keseluruhan pencapaian kinerja selama tahun 2021 melalui indikator kinerja sasaran yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pariaman dapat tercapai dengan baik, dengan ditunjukkannya dari 23 Indikator 10 indikator kinerja mencapai $\geq 100\%$, 9 Indikator dengan capaian $\geq 90\%$, 1

indikator dengan capaian $\geq 80\%$, 1 indikator dengan capaian $\geq 70\%$ sedangkan 2 Indikator $\leq 66\%$.

Pencapaian di tahun 2021 lebih baik dari tahun 2020 walaupun proses dan mekanisme masih belum baik, dimulai dari proses perencanaan, Perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi yang mendalam dan menyeluruh terhadap seluruh hasil yang dicapai.

Hal ini disebabkan karena Indikator Kinerja dalam proses pencapaian target dari beberapa sasaran tersebut tergantung pada OPD terkait dan formula penghitungan ada idak jelas. Disamping itu kualitas perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari keselarasan dan sinkronisasi antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan dokumen Sistem AKIP belum terbangun secara baik. Sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan pada dokumen perencanaan belum seluruhnya memenuhi persyaratan dan kriteria sasaran dan indikator kinerja yang baik .

Agar pencapaian indikator sasaran dan pencapaian target kinerja tahun kedepannya dapat lebih optimal, maka dibutuhkan langkah-langkah perbaikan, antara lain :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Pariaman 2018-2023 Sasaran dan indikator di RPJMD harus selaras dengan dokumen Renstra OPD, perencanaan, dokumen penganggaran, dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Renja OPD, RKPD, Perencanaan Anggaran dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Pariaman serta PK OPD
2. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja setiap triwulan oleh masing-masing OPD yang menjadi pelaksana tugas teknis.
3. mengidentifikasi permasalahan yang muncul sejak dini pada saat pelaksanaan program dan kegiatan, jika muncul suatu permasalahan dapat segera terkoreksi dan diberikan langkah solusinya, agar dalam pelaksanaan selanjutnya dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan.
4. seluruh Pimpinan OPD dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman harus mempunyai kepedulian yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan mengontrol kinerja jajaran dibawahnya .

5. Melakukan koordinasi yang baik dan intensif antar OPD, serta pihak-pihak yang terkait lainnya.

PENGHARGAAN-PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

Adapun Penghargaan yang telah diperoleh Pemerintah Kota Pariaman tahun 2021 adalah :

1. Penghargaan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2021 sebagai daerah terinovatif dari Menteri Dalam Negeri RI dalam bidang tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.



2. Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya Bidang Kelautan Tahun 2021 kepada Walikota Pariaman Genius Umar dari Pemerintah Republik Indonesia yang diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.



3. Penghargaan RKCI Tahun 2021 yang merupakan ajang 2 Tahunan yang dilakukan oleh Institut Teknologi Bandung (ITB), yang melaksanakan riset terkait Transformasi Digital Indonesia (RTDI) dan Rating Kota Cerdas Indonesia (RKCI) 2021.



Kota Pariaman borong semua kategori Penghargaan RKCI Tahun 2021. Kesuksesan Kota Pariaman yang berhasil menyabet penghargaan itu, diumumkan pada acara penutupan RTDI dan RKCI 2021, yang diselenggarakan secara virtual di ruang kerja walikota, Balaikota Pariaman

Adapun 9 Kategori Penghargaan yang didapat Kota Pariaman adalah :

- 1) Kategori Kota Kecil Menuju Kota Cerdas
 - 2) Kategori Kota Kecil Ekonomi Cerdas
 - 3) Kategori Kota Kecil Masyarakat Cerdas
 - 4) Kategori Kota Kecil Lingkungan Cerdas
 - 5) Kategori Kota Kecil Mobilitas Cerdas
 - 6) Kategori Kota Kecil Kesehatan Cerdas
 - 7) Kategori Kota Kecil Kota Tangguh
 - 8) Kategori Kota Kecil Tanggap Perubahan Iklim
 - 9) Kategori Kota Kecil Energi Cerdas
4. Penghargaan Kota Layak Anak (KLA) kategori Madya Tahun 2021 dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI.



Penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, I Gusti Ayu Bintang Darmawati diserahkan secara daring

5. Walikota Pariaman, Genius Umar ketika menerima Penghargaan SAKIP dan RB Award 2021 dari Kemen PAN RB, didampingi Sekretaris Kementerian PAN RB, Rini Widyantini, dan juga Deputy Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur



6. Penghargaan Peningkatan MCP Tahun 2021 dari KPK RI, Peningkatan Skor indeks Pencegahan Korupsi atau Monitoring Center for Prevention (MCP) tertinggi kedua Tahun 2021 se Sumatera Barat.



7. Penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra 2020 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI.



8. Penghargaan dari Kementerian Keuangan RI, sebagai daerah yang mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini dari Kemenkeu



11. Penghargaan Kota Sehat tingkat Nasional Penghargaan dari Kementerian Kesehatan,



Penghargaan pada Penganugerahan Penghargaan Kabupaten Kota Sehat tingkat Nasional dan Provinsi, Stop BABS (Buang Air Besar Sembarangan), STBM Award, TPP yang menerapkan Protokol Kesehatan dan Terminal Sehat, yang digelar oleh Kementerian Kesehatan RI melalui Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, bertempat di Auditorium Gubernur Sumbar, Kamis siang (25/11). Penghargaan ini diserahkan oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audi Joinaldy, dan diterima oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pariaman, Yota Balad, dimana 2 penghargaan tersebut yaitu Penghargaan Terminal Sehat, Kategori tipe A dari Kementerian Kesehatan, dan Penghargaan Swastisaba Kategori Wiwerda dari Provinsi Sumatera Barat.